

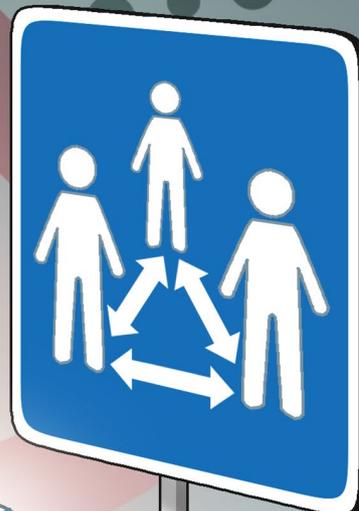
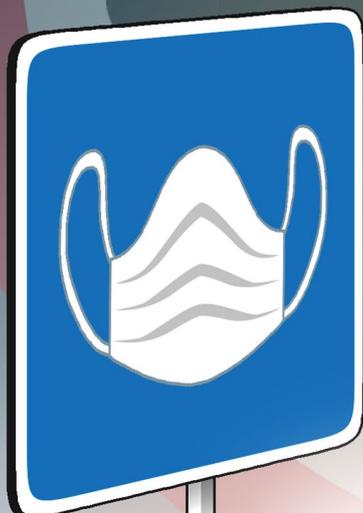


MAJALAH

# Parlementaria

EDISI 190 • TH. 2020

## Protokol Kesehatan Kunci Sukses Pilkada 2020



## PENGANTAR REDAKSI

**P**andemi Covid-19 tak jua mereda. Hal ini memunculkan kekhawatiran tersendiri, karena Bangsa Indonesia akan melaksanakan Pilkada serentak di 270 daerah pada 9 Desember 2020 kelak. Tak ingin memunculkan klaster baru, DPR RI mengingatkan agar penyelenggara pemilu menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Karena itu juga menjadi kunci sukses atau tidaknya penyelenggaraan Pemilu.

Untuk itu, pada edisi *Majalah Parleментарia 190*, tim redaksi mengangkat tema '*Protokol Kesehatan Kunci Sukses Pilkada 2020*'. Edisi ini mengupas betapa pentingnya penerapan protokol Kesehatan, sehingga aktivitas yang memicu kerumunan massa wajib dihindari. Untuk itu para kontestan dituntut lebih kreatif dan inovatif agar visi dan misinya sampai kepada masyarakat.

Sedangkan di rubrik Pengawasan, DPR RI meminta agar stimulus terhadap UMKM yang terdampak Covid-19 lebih tepat sasaran. Pemerintah juga diminta untuk memberikan stimulus berupa program pembinaan terhadap UMKM.

Pada rubrik Anggaran, tim redaksi membahas terkait keberlanjutan dana PEN pada APBN 2021. Dimana diharapkan perekonomian Indonesia akan segera bangkit. Dan di rubrik Legislasi, membahas mengenai UU Mahkamah Konstitusi, dimana Hakim Konstitusi dituntut memiliki sikap neragawan.

Masih seputaran Covid-19, di rubrik Sorotan, tim redaksi menurunkan bahasan terkait perlindungan terhadap para dokter dan tenaga kesehatan yang berjabaku merawat pasien Covid-19. Serta keberlangsungan vaksin produksi dalam negeri yang sudah sangat dinanti oleh masyarakat.

Masih banyak rubrik lainnya seperti rubrik kunjungan kerja Anggota DPR RI dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan. Adapula rubrik dail, dimana para pembaca bisa mengintip aktivitas Anggota DPR RI di dapilnya masing-masing. Semua disajikan secara komprehensif sehingga sangat layak untuk dibaca.

Selamat membaca!

*Parleментарia*



Ikuti Akun Media Sosial DPR RI  
Follow, Like & Subscribe

medsos@dpr.go.id



DPR RI



@DPR\_RI



@DPR\_RI



DPR RI

w w w . d p r . g o . i d



# Parleментарia

**PENGAWAS UMUM**  
Pimpinan DPR RI

**KETUA PENGARAH**

Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

**WAKIL KETUA PENGARAH**

Dra. Damayanti, M.Si (Deputi Bidang Persidangan)

**PIMPINAN PELAKSANA**

Y.O.I Tahapari, S.H, M.Si (Karo Pemberitaan Parlemen)

**PIMPINAN REDAKSI**

Drs.Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak)

**WK PIMPINAN REDAKSI**

Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak), Suciati, S.Sos (Kasubag Media Analisis), Nita Juwita, S.Sos (Kasubag MedSos dan Website)

**TIM REDAKTUR**

Erman Suhendri, S.Sos.I, Erlangga Panji Samudro, S.Ikom, Alfi Widoretno, S.I.Kom, Sofyan Efendi

**SEKRETARIS REDAKSI**

Hasri Mentari, Guntur Dewanto

**ANGGOTA REDAKSI**

Erman Suhendri, S.Sos.I, Erlangga Panji Samudro, S.I.Kom, Alfi Widoretno, S.I.Kom, Rahayu Setiowati, Muhammad Husen, Virgianne Meiske Patuli, Devi Iriandi, Hendra Sunandar, Surahmat Eko, Ria Nur Mega, Taufan Syahrulli, Phunto Pranowo

**REDAKTUR FOTO**

M. Andri Nurdiansyah

**FOTOGRAFER**

Naefuroji, Jaka Nugraha, Rumi Sari Budiati, Arief Rachman, R. Kresno P.D Moempoeni, Azka Restu Fadilah, Geraldii Opie

**ADMINISTRASI**

Luthfi Suci Nur'Aini, Damar Maulana Taher

**ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA**

Bagian Media Cetak & Media Sosial DPR RI Gedung Nusantara II Lt. 3  
Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta  
Telp. (021) 5715348, 5715350 Fax. (021) 5715341,  
e-mail: bag\_media@dpr.go.id, www.dpr.go.id/berita

**PENERBITAN**

**PIMPINAN PENERBITAN**

Djoko Hanggoro, S.T. (Kabag Penerbitan)

**PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI**

Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)

**STAF PRODUKSI**

Subadri, S.E, Barliansyah, Fathurahman

**DESAIN GRAFIS**

Dito Sugito

**PHOTOGRAFER ART**

Friederick Munchen

**PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI**

Eko Priyanto, S.E. (Kasubag Distribusi)

**KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI**

Siti Nur Aidah S.A.P., M.A.P, Isfandi Mulyana, Yudi Kresna

**ADMINISTRASI**

**STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI**

Arif, Lamin, Yuliana Puspita  
Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421  
Email : bag\_penerbitan@dpr.go.id

**HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)**

**ISI BERITA DAN MATERI FOTO DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN**

# Parlementaria

EDISI 190 • TH. 2020



4	PROLOG	46	Pelayanan Jamkestama Harus Paripurna
	Protokol Kesehatan Kunci Sukses Pilkada 2020	48	Ketimpangan Distribusi Subsidi Energi Harus Diselesaikan
	LAPORAN UTAMA		SOROTAN
6	Hindari Kerumunan, Paslon Harus Lebih Kreatif	50	Lindungi Dokter dan Nakes dari Covid-19
8	Sanksi Tegas Paslon Pelanggar Prokes Covid-19	52	Menunggu Vaksin Produk Bangsa Sendiri
10	Tantangan Kualitas Pilkada 2020 di Masa Pandemi		LIPUTAN KHUSUS
12	Daerah Butuh Kekuatan Legitimasi Kala Pandemi	54	Sidang Umum AIPA ke-41: DPR Suarakan Penanganan Pandemi Covid-19
14	Pilkada Harus Dilaksanakan dengan Prokes Ketat		DAPIL
	SUMBANG SARAN	56	DAPIL
16	Urgensi Gelar Pilkada saat Pandemi Antisipasi Plt Massal		TOKOH
	PENGAWASAN	66	Chris 'The Dragon' John Kepedulian Sang Legenda pada Tinju Indonesia
18	Prioritaskan Program Pembinaan dan Pemulihan Pasar UMKM		PERNIK
20	Penerbitan RIPH Harus Sesuai Kebutuhan	68	Lawan Covid-19 di Lingkungan DPR, PIA Gelar Baksos
	ANGGARAN	70	Pengelolaan Keuangan Negara di Lingkup Dpr-Ri
22	Dana PEN Berlanjut, Ekonomi Didorong segera 'Bangun'		PARLEMEN DUNIA
	LEGISLASI	72	Mengenal <i>House of Commons</i> Inggris
26	Hakim Konstitusi Harus Negarawan		KIAT SEHAT
28	FOTO BERITA	74	<i>Happy Hypoxia</i> pada Pasien Covid-19
	PROFIL		WISATA
32	Emanuel Melkiades Laka Lena: Jalan Panjang Sang Pekerja	76	Menantang Tenang ke Tebing Appalarang
	KUNKER		HOBI
36	Komisi III akan Bedah Sejumlah Kasus Impor Ilegal	78	Mulyadi: Sehat dengan Bersepeda
38	Gali Masukan RUU Pemilu dari Akademisi Untirta		POJOK PARLE
39	Apresiasi Pemanfaatan Limbah Pasar Menjadi Pupuk Organik	79	Seberapa Penting <i>Gadget</i> bagi Anggota DPR
40	Komisi V Tinjau Pembangunan Infrastruktur di Daerah		
42	Komisi VII Tinjau Kilang Minyak, PLTU dan Museum		
44	Maksimalkan Pengawasan Sektor Ekonomi dan Keuangan		

# Protokol Kesehatan Kunci Sukses Pilkada 2020

Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemi Covid-19 yang belum juga mereda memunculkan kekhawatiran di kalangan publik. Jaminan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang demokratis, aman dan berkualitas saat kondisi negeri sedang dilanda bencana non Alam menjadi tuntutan yang harus bisa dibuktikan pemerintah dan penyelenggara kepemiluan di Indonesia agar kepercayaan masyarakat pada penyelenggara Pilkada ini tetap terjaga.

para calon kepala daerah yang melanggar prokes Covid-19 dalam pelaksanaan tahapan pilkada serentak 2020 di masa pandemi ini merupakan hal yang tidak bisa ditawar lagi. Keselamatan seluruh pihak-pihak yang terlibat dalam ajang pesta demokrasi tersebut haruslah diutamakan.

Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) menindak tegas para paslon yang melaksanakan proses tahapan Pilkada 2020 tanpa mengindahkan prokes, mulai dari pendaftaran, sosialisasi hingga pemungutan suara sebagaimana diatur dalam revisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2020.

**T**antangan penyelenggaraan pilkada di era pandemi ini memang tidaklah ringan. Dibutuhkan kedisiplinan dan komitmen yang tinggi dari semua pihak untuk mendukung suksesnya penyelenggaraan pilkada. Potensi terjadinya kluster baru penyebaran Covid-19 pada setiap tahapan pilkada menjadi hal utama yang perlu diwaspadai. Penerapan protokol kesehatan (prokes) pada pilkada serentak di masa pandemi ini dianggap sebagai salah satu kunci sukses penyelenggaraan pesta demokrasi.

DPR mengimbau agar semua pihak dapat mematuhi aturan yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan pilkada, termasuk mematuhi protokol kesehatan secara disiplin dan ketat agar tidak menjadi kluster penyebaran Covid-19. Oleh karenanya diperlukan strategi yang inovatif bagi pasangan calon (paslon) dalam pelaksanaan Pilkada pada masa pandemi Covid-19 seperti sekarang ini.

Menerapkan protokol kesehatan yang ketat serta menindak tegas



Azis menilai, dengan adanya sanksi yang tegas dan berat yang dikenakan kepada calon kepala daerah pelanggar protokol kesehatan dalam tahapan pilkada maka akan membuat para cakada tersebut lebih disiplin dalam menjalankan prokes Covid-19.

Hal yang sama juga diungkapkan Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung. Doli menyampaikan bahwa sanksi penegakan disiplin berupa diskualifikasi paslon, penundaan pelantikan selama enam bulan bagi kepala daerah pemenang pilkada akan diterapkan kepada paslon yang tidak mematuhi aturan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan peta sebaran yang diberikan Gugus Tugas Covid-19 maka penting untuk diterapkan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan pilkada. Selain tantangan yang bersifat teknis, penyelenggaraan pilkada di masa pandemi Covid-19 juga menghadapi tantangan kualitas penyelenggaraan. Jika tidak diantisipasi dengan baik, pilkada yang digelar di masa pandemi ini dapat berpotensi menciptakan masalah baru.

“Indikator kualitas pelaksanaan pilkada yang demokratis, terkait erat dengan partisipasi masyarakat dalam pilkada 2020 ini. Persoalan partisipasi pemilih dalam pilkada di tengah pandemi merupakan tantangan serius bagi penyelenggara pemilu. Sebanyak 106 juta pemilih dalam penyelenggaraan pilkada di 270 daerah harus dipastikan partisipasinya dalam pilkada,” jelas Doli.

Ia menekankan, penyelenggara pilkada harus memastikan keamanan dan keselamatan pemilih atas ancaman penularan Covid-19 pada saat melakukan pencoblosan. Hal itu dapat menjadi salah satu langkah

untuk meningkatkan partisipasi pemilih di tengah pandemi. Selain itu, sosialisasi mengenai pelaksanaan pilkada juga harus lebih dimaksimalkan. Ancaman rendahnya partisipasi masyarakat membayangi pilkada di musim pandemi ini. Penyelenggara dituntut untuk melakukan terobosan dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pilkada.

Pelaksanaan pilkada di tengah pandemi sendiri memiliki payung hukum yang kuat yaitu Perppu Nomor 2 Tahun 2020. Menggelar pilkada di tengah pandemi menjadi pengalaman baru bagi penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Sangat penting bagi semua pemangku kepentingan kepemiluan baik penyelenggara pemilu, masyarakat sipil, pemerintah, partai politik, dan peserta pilkada untuk bersama-sama melindungi kesehatan publik sekaligus menjaga demokrasi.

Pilkada yang demokratis, aman dan sehat harus diwujudkan bersama-sama. Kesetaraan kompetisi antar kandidat, pemenuhan hak pilih dan penyelenggara pemilu dengan protokol kesehatan yang ketat harus dijaga.

Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa mengatakan, salah satu alasan pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020 tetap digelar pada Desember 2020 adalah untuk menghindari pelaksana tugas (Plt) dalam memimpin daerah yang melaksanakan pilkada. Dari apa yang dijelaskan pemerintah, Saan mengakui bahwa di masa pandemi Covid-19 ini daerah membutuhkan legitimasi dan kepemimpinan yang kuat. Sementara Plt tidak bisa membuat kebijakan strategis.

Ia menyatakan, tidak hanya dibutuhkan pada masa pandemi Covid-19, seorang pemimpin daerah dengan legitimasi yang

kuat juga dibutuhkan pasca pandemi. Kepala daerah harus melakukan pemulihan baik secara sosial, politik, maupun ekonomi. “Untuk bisa melakukan proses pemilihan tentu kepemimpinan kuat dan legitimasi jadi penting, maka sedemikian rupa pemerintah dan DPR menghindari yang namanya Plt,” kata Saan.

Menyikapi desakan sejumlah pihak terkait penundaan pilkada serentak 2020, Saan mengatakan bahwa Komisi II DPR akan mempertimbangkan setiap masukan yang disampaikan. Namun sampai saat ini belum ada opsi penundaan pilkada, tegasnya. Ia mengungkapkan, semua tahapan yang sudah dan sedang berjalan saat ini masih berjalan relatif baik.

Demi terselenggaranya Pilkada Serentak yang sukses di masa pandemi Covid-19, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Arwani Thomafi juga mengingatkan para pihak terkait agar seluruh tahapan Pilkada 2020 dilaksanakan dengan protokol kesehatan Covid-19 yang ketat. Ia mengatakan, ketegasan pemerintah, penyelenggara pemilu, dan aparat penegak hukum amat diperlukan agar tidak terjadi lagi pelanggaran protokol Covid-19 pada tahapan-tahapan selanjutnya.

Politisi Fraksi PPP itu mendorong pemerintah pusat untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah yang menyelenggarakan Pilkada 2020. Menurutnya, Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pengendalian Covid-19 telah memberikan kekuatan yang cukup bagi pemerintah daerah memberlakukan peraturan yang sesuai dengan kondisi di wilayahnya masing-masing.

● tim/er

# Hindari Kerumunan, Paslon Harus Lebih Kreatif



Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani. Foto: Kresno/AMAN

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 secara resmi akan digelar pada 9 Desember 2020 mendatang di tengah pandemi Covid-19 yang membuat penyelenggaraannya berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Pesta demokrasi di 270 daerah tersebut bakal digelar dengan berbagai adaptasi kebiasaan baru.

**P**enyelenggara kemudian menelurkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non alam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

PKPU merinci tiap tahapan

dengan mengedepankan protokol Covid-19 yaitu aspek keselamatan dan kesehatan. Seperti, pembatasan jumlah kehadiran pendukung saat kampanye, kewajiban *rapid test* atau *real time polymerase chain reaction* (RT-PCR), hingga penggunaan alat pelindung diri.

Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani meminta semua peserta dan penyelenggara Pilkada 2020 untuk mematuhi protokol

kesehatan di semua tahapan guna mencegah penyebaran Covid-19. Menurut Puan, aturan dalam PKPU Nomor 13 Tahun 2020 harus ditegakkan demi mensukseskan Pilkada serentak tersebut.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan ini menegaskan, semua calon kepala dan wakil kepala daerah yang berkontestasi pada Pilkada 2020 harus lebih kreatif dan inovatif menyampaikan visi dan misinya. Terlebih, pada masa kampanye di masa pandemi Covid-19 seperti saat-saat ini.

Puan mendorong penyampaian visi dan misi oleh semua calon kepala dan wakil kepala daerah dilakukan secara virtual dan tidak mengadakan kegiatan yang mengundang orang berkerumun. "Jangan sampai memobilisasi yang membuat masyarakat berkerumun. Disiplin protokol kesehatan selain karena aturan juga harus karena kesadaran," ujar Puan.

Sesuai ketentuan PKPU Nomor 13 Tahun 2020, kampanye tatap muka pertemuan terbatas, pertemuan terbuka, dan dialog harus mematuhi protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Serta, membatasi jumlah peserta kampanye yakni maksimal hingga mencapai 50 orang.

Jika ada yang melanggar, maka penegakkan hukum harus dilakukan sesuai aturan yang berlaku. "Sanksinya sudah diatur melalui PKPU terbaru. Disiplin dalam pilkada sangat penting untuk keberhasilan Pilkada 2020," tegas Legislator dapil Jawa Tengah V tersebut.



## KAMI AKAN MEMONITOR SEJAUH MANA IMPLEMENTASI DI LAPANGAN SESUAI DENGAN PERATURAN TERSEBUT

Wakil Ketua DPR RI  
Sufmi Dasco Ahmad

Foto: Dok/MAN

### IMPLEMENTASI PKPU TERBARU HARUS MAKSIMAL

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyambut baik adanya revisi PKPU. Dasco berharap, PKPU yang telah direvisi tersebut bisa membuat penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 dapat berjalan dengan baik. Namun, ia juga mengimbau agar revisi PKPU dapat diimplementasikan dengan baik di lapangan. Sehingga, revisi tersebut tidak hanya sebatas tulisan saja.

Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku) itu meminta kepada pihak penyelenggara Pilkada untuk mampu mengawasi dan

memonitor pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 sesuai dengan PKPU yang ada.

Dasco menegaskan bahwa pihaknya tidak segan untuk melakukan evaluasi PKPU yang telah direvisi tersebut, jikalau ditemukan banyak pelanggaran yang terjadi selama Pilkada. “Kami akan memonitor sejauh mana implementasi di lapangan sesuai dengan peraturan tersebut. Apabila kemudian implementasinya, dalam jangka waktu tertentu terjadi banyak pelanggaran, maka bukan tidak mungkin kami akan evaluasi kembali,” tandasnya.

Seperti diketahui, dalam revisi yang telah diubah menjadi PKPU

Nomor 13 Tahun 2020, KPU telah melarang adanya konser musik, dan juga kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan keramaian.

### PILKADA 2020 PENTING HASILKAN KEPALA DAERAH DEFINITIF

Sementara itu, Anggota Komisi II DPR RI Sodik Mudjahid mengungkapkan pelaksanaan Pilkada telah diputuskan tetap dilanjutkan. Mengingat, DPR dan Pemerintah dalam hal ini KPU, Bawaslu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menginginkan agar masyarakat memiliki kepala daerah secara definitif.

Peran kepala daerah dan wakil kepala daerah definitif sangat penting dan vital dalam berbagai kebijakan yang akan diambil masing-masing pemerintah daerah. Sebab, kepala daerah definitif yang akan memimpin masyarakat hadapi berbagai masalah termasuk masalah dan *recovery* pasca Covid-19.

Pelaksanaan tahapan Pilkada 2020 di tengah pandemi Covid-19 dilaksanakan secara seksama dan akan rutin dievaluasi antara DPR, KPU, Bawaslu, DKPP dan Kemendagri. Serta, jika diperlukan akan menggelar rapat lagi dengan pemerintah setelah melihat kondisi terakhir dan masukan dari masyarakat.

Tak kalah pentingnya, juga berbagai saran masukan dan pandangan dari tiap-tiap Anggota DPR RI yang memantau secara seksama di daerah pemilihan masing-masing. “Kemudian, seluruh masukan tersebut akan dikaji secara mendalam. Tujuannya, agar pelaksanaan Pilkada 2020 digelar dengan protokol Covid-19 secara maksimum,” pungkas Sodik.

● pun/er



## TUJUANNYA, AGAR PELAKSANAAN PILKADA 2020 DIGELAR DENGAN PROTOKOL COVID-19 SECARA MAKSIMUM

Anggota Komisi II DPR RI  
Sodik Mudjahid

Foto: Rumi/MAN

# Sanksi Tegas Paslon Pelanggar Prokes Covid-19

Salah satu prinsip dalam pelaksanaan Pilkada di era 'new normal' akibat pandemi Covid-19, adalah perlindungan keamanan jiwa dan kesehatan yang maksimal terhadap semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pilkada, mulai dari hulu sampai hilir tahapan Pilkada. Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 jangan sampai melahirkan klaster baru penyebaran Covid-19.

**S**emua pihak yang terkait Pilkada serentak diharapkan dapat bersinergi dan berperan aktif dalam mencegah terjadinya penyebaran virus Covid-19. Selain dukungan anggaran dan logistik yang tepat waktu, ikut menjaga keberlanjutan tahapan Pilkada yang jujur, adil, dan demokratis walaupun di tengah pandemi juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan pesta demokrasi ini.

Menerapkan protokol kesehatan yang ketat serta menindak tegas para calon kepala daerah yang melanggar prokes Covid-19 dalam pelaksanaan tahapan Pilkada Serentak 2020 di masa pandemi ini merupakan hal yang tidak bisa ditawar lagi. Keselamatan seluruh pihak-pihak yang terlibat dalam ajang pesta demokrasi tersebut haruslah diutamakan.

Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) menindak tegas para pasangan calon (paslon) yang tidak mengindahkan protokol kesehatan (prokes), mulai dari pendaftaran, sosialisasi hingga

pemungutan suara sebagaimana diatur dalam revisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2020.

Azis menilai, dengan adanya sanksi yang tegas dan berat yang dikenakan kepada calon kepala daerah (Cakada) melanggar protokol kesehatan dalam tahapan Pilkada maka akan membuat para Cakada tersebut lebih disiplin dalam menjalankan prokes Covid-19.

"Sanksi tegas berguna demi menyelamatkan para calon kepala

daerah, penyelenggara pemilu, dan masyarakat dalam pelaksanaan pesta demokrasi. Kejadian pada saat pendaftaran bakal calon kepala daerah di berbagai wilayah beberapa waktu lalu menjadi bukti bahwa penerapan aturan protokol kesehatan yang dibuat oleh KPU tidak diindahkan oleh para pasangan calon dan masyarakat," kata Azis.

Azis menyampaikan, Pilkada Serentak 2020 yang akan diadakan di 270 daerah di seluruh Indonesia sangat rawan terhadap potensi penyebaran Covid-19 jika protokol kesehatan tidak diterapkan dengan serius. Oleh karenanya ia mengimbau agar seluruh paslon dapat benar-benar menjalankan aturan KPU maupun aturan pemerintah pusat dan daerah terkait protokol kesehatan Covid-19.

"Jangan sampai pesta demokrasi ini memunculkan klaster baru

Wakil Ketua DPR RI  
M. Azis Syamsuddin.  
Foto: Rumi/MIAN





DIPERLUKAN  
KESADARAN KOLEKTIF,  
KHUSUSNYA KEPADA  
PARA CALON KEPALA  
DAERAH AGAR  
MEMILIKI SIFAT  
DAN SIKAP GOTONG  
ROYONG DALAM  
MELAWAN COVID-19

Wakil Ketua DPR RI  
M. Azis Syamsuddin

Foto: Azka/MAN

penyebaran Covid-19 dan menjadi catatan sejarah yang kelam bagi bangsa Indonesia dalam melaksanakan Pilkada serentak,” ujar politisi Fraksi Golkar itu.

Azis juga meminta KPU dapat memetakan daerah yang memiliki zona hitam, merah, kuning dan hijau secara baik dalam Pilkada. Langkah tersebut untuk mengantisipasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan dalam pemungutan suara.

“Harus ada pengawasan yang ketat dari aparat keamanan baik TNI dan Polri di lokasi sosialisasi maupun pemungutan suara nantinya,” imbau nya.

Di sisi lain legislator dapil Lampung II itu menilai, pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di masa pandemi perlu dimanfaatkan menjadi ajang peningkatan disiplin yang tinggi bagi masyarakat maupun para peserta Pilkada.

Menurutnya, keberhasilan penerapan protokol kesehatan dalam Pilkada serentak akan menjadi contoh yang baik. Akan tetapi sebaliknya, kegagalan dalam penerapan aturan dan disiplin akan menjadi permasalahan sosial

dan kesehatan.

Dikatakannya, calon kepala daerah (cakada) perlu mengubah dan mempertimbangkan strategi pemenangannya dalam kampanye dalam menarik minat para calon pemilih dalam Pilkada 2020. Pasangan calon kepala daerah diharapkan dapat memberikan arahan kepada tim sukses untuk mencari strategi baru pemenangan pada masa pandemi Covid-19 ini yang mampu menjaga keselamatan masyarakat dan mencegah terjadinya kerumunan massa yang bisa berdampak pada penyebaran Covid-19.

“Harus ada strategi baru dalam menggaet pemilih agar jangan sampai Pilkada menambah jumlah pasien Covid-19. Saat ini banyak kriteria masyarakat yang terkena Covid-19, misalnya orang tanpa gejala (OTG), tentunya tidak dapat dijamin ketika terjadi kerumunan di tengah lapangan atau di dalam ruang tertutup, seperti GOR atau aula, yang menyebabkan masyarakat ikut terpapar,” ungkapnya.

Dia mengatakan bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) sudah mengatur kuota jumlah orang dalam

melakukan kampanye di tengah pandemi secara terbuka. Oleh karena itu, jika melebihi kuota tersebut, maka pasangan calon kepala daerah tersebut telah melanggar protokol kesehatan dan harus diberikan sanksi tegas.

“KPU harus berperan aktif dalam mengedukasi dan mensosialisasikan pentingnya menjalankan protokol kesehatan kepada para paslon maupun tim sukses Pilkada 2020 di masa pandemi Covid-19 ini,” tuturnya.

Ia berharap, setiap partai memiliki komitmen yang sama di Pilkada Serentak 2020 ini agar bisa menjawab keinginan publik, sehingga Pilkada serentak dapat berjalan bebas, rahasia, aman, jujur dan adil.

Azis mengingatkan, diperlukan kesadaran kolektif, khususnya kepada para calon kepala daerah agar memiliki sifat dan sikap gotong royong dalam melawan Covid-19. “Caranya sederhana, jadilah ikon influencer dalam mempromosikan protokol kesehatan dengan baik dan benar,” imbuhnya.

Seperti diketahui, memang ada sejumlah kekhawatiran terhadap penyelenggaraan Pilkada di masa pandemi ini yang dianggap dapat berpengaruh pada kualitas penyelenggaraan Pilkada. Kondisi yang tidak aman dan sehat seperti biasanya dalam pelaksanaan tahapan Pilkada, dapat memicu munculnya pelanggaran terhadap aturan yang ada.

Oleh karena itu, sikap profesionalitas KPU dituntut agar kepercayaan masyarakat pada penyelenggara Pilkada ini tetap terjaga. Ketika penyelenggara sangat permisif dan mengabaikan bagaimana pelaksanaan aturan yang sudah ditetapkan, maka salah satu dampaknya tentu pada kualitas Pilkada yang dihasilkan.

● ann/er

# Tantangan Kualitas Pilkada 2020 di Masa Pandemi

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 telah diputuskan untuk tetap dilaksanakan pada 9 Desember 2020 di 270 daerah di seluruh Indonesia. Keputusan tersebut menjadi fundamen dasar diterbitkannya Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pilkada yang telah ditandatangani Presiden Joko Widodo.

**K**etentuan dalam PKPU yang mengatur tentang protokol pelaksanaan Pilkada di masa pandemi Covid-19 yang dirancang oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga telah disetujui oleh Komisi II DPR RI. Meski demikian, tantangan penyelenggaraan pilkada di era pandemi ini tetap tidaklah ringan, dibutuhkan kedisiplinan dan komitmen yang tinggi dari semua pihak untuk mendukung suksesnya penyelenggaraan pilkada.

“Pilkada di tengah pandemi harus dipastikan tidak menjadi klaster baru penularan virus Covid-19 baik bagi pemilih maupun bagi penyelenggara, khususnya petugas pilkada di lapangan. Setiap tahapan diprediksi akan terjadi ledakan Covid-19 karena adanya potensi pengumpulan massa, namun tahapan ini juga belum menunjukkan tanda-tanda adanya klaster baru Pilkada,” ungkap Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung.

Kekhawatiran akan adanya ledakan klaster Covid-19 lainnya, diprediksi akan terjadi pada tanggal 23-24 September 2020, dimana pada tanggal tersebut para calon kepala daerah akan mengikuti Penetapan Pasangan

Calon dan Pengundian Nomor Urut. Akan tetapi pelaksanaan di lapangan secara global menunjukkan bahwa semuanya masih berjalan dengan baik.

“Tahapan krusial keempat adalah pada tanggal 26 September hingga 5 Desember 2020, yakni masa kampanye. KPU sudah membuat aturan yang ketat tentang bentuk kampanye yang disesuaikan dengan protokol kesehatan. Waktu kampanye ini juga dikhawatirkan juga akan terjadi klaster Covid-19 baru,” kata Doli.

Ia mengimbau agar semua aturan dapat dipatuhi berikut dengan protokol kesehatan yang disiplin dan ketat agar tidak menjadi klaster penyebaran Covid-19. Dikatakannya, perlu strategi yang inovatif bagi Paslon dalam Pilkada pada masa Pandemi ini.

Sementara tahapan kelima adalah pada tanggal 9 Desember 2020. Di tanggal itulah para pemilih akan memberikan hak suaranya sebagai puncak dari Pilkada di sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di berbagai daerah. Oleh karenanya ia berharap supaya masyarakat tetap mengikuti protokol kesehatan dengan penuh disiplin saat menggunakan hak suaranya.

Ketua Komisi II DPR RI  
Ahmad Doli Kurnia Tandjung.  
Foto: Rumi/MAN



**PIMPINAN**

Doli menyampaikan, sanksi penegakan disiplin berupa diskualifikasi paslon, penundaan pelantikan selama enam bulan bagi kepala daerah pemenang pilkada akan diterapkan kepada paslon yang tidak mematuhi aturan yang telah ditetapkan.

Seperti diketahui, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, baru-baru ini memberikan apresiasi kepada empat kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mematuhi protokol kesehatan pada pelaksanaan tahapan Pilkada serentak 2020. Mereka mematuhi dan menerapkan protokol kesehatan dengan baik, serta pada saat deklarasi ataupun saat pendaftaran bakal pasangan calon ke KPU setempat tidak membuat kegiatan yang menyebabkan kerumunan massa.

Sehubungan dengan hal itu, politisi Fraksi Partai Golkar tersebut menyatakan apresiasinya terhadap langkah-langkah dan upaya yang telah dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri yang mulai menerapkan *reward* dan *punishment* terkait penegakkan disiplin dalam penerapan protokol kesehatan pengendalian Covid-19.

“Kita juga sudah mengetahui daerah-daerah atau kepala daerah-kepala daerah yang perlu kita beri apresiasi dan mana kepala daerah yang harus diberikan teguran. Ke depan kita harus menegakkan disiplin,” tutur Doli.

Berdasarkan peta sebaran yang diberikan Gugus Tugas Covid-19 maka penting untuk diterapkan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan pilkada. Selain tantangan yang bersifat teknis, penyelenggaraan pilkada di masa pandemi Covid-19 juga menghadapi tantangan kualitas penyelenggaraan. Jika tidak diantisipasi dengan baik, pilkada yang digelar di masa pandemi ini

## JIKA TIDAK DIANTISIPASI DENGAN BAIK, PILKADA YANG DIGELAR DI MASA PANDEMI INI DAPAT BERPOTENSI MENCIPTAKAN MASALAH BARU

Ketua Komisi II DPR RI  
Ahmad Doli Kurnia Tandjung

Foto: Rumi/IAN



dapat berpotensi menciptakan masalah baru.

Penerapan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan pilkada otomatis mendongkrak biaya penyelenggaraan pilkada. Pengadaan alat pelindung diri (APD) bagi petugas di lapangan dan juga pemilih seperti masker, sabun cuci tangan, penyanitasi tangan (*hand sanitizer*), *face shield*, ataupun baju hazmat bagi daerah yang berkategori zona merah jelas memerlukan biaya ekstra dibandingkan dengan pilkada sebelumnya yang bukan di masa pandemi Covid-19.

Kebijakan pengurangan kapasitas pemilih di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) dilakukan dengan mempertimbangkan protokol kesehatan memberi konsekuensi terjadinya penambahan TPS dan petugas di lapangan. Kondisi inilah yang meniscayakan kenaikan biaya pelaksanaan pilkada oleh penyelenggara. Untuk itu, KPU selaku penyelenggara pilkada mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 4,7 triliun, Bawaslu mengajukan tambahan anggaran Rp 478 miliar, dan DKPP mengajukan anggaran tambahan

sebesar Rp 39 miliar.

“Indikator kualitas pelaksanaan pilkada yang demokratis, terkait erat dengan partisipasi masyarakat dalam pilkada 2020 ini. Persoalan partisipasi pemilih dalam pilkada di tengah pandemi merupakan tantangan serius bagi penyelenggara pemilu. Sebanyak 106 juta pemilih dalam penyelenggaraan pilkada di 270 daerah harus dipastikan partisipasinya dalam pilkada,” jelas Doli.

Ia menekankan, penyelenggara pilkada harus memastikan keamanan dan keselamatan pemilih atas ancaman penularan Covid-19 pada saat melakukan pencoblosan. Hal itu dapat menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan partisipasi pemilih di tengah pandemi. “Selain itu, sosialisasi mengenai pelaksanaan pilkada juga harus lebih dimaksimalkan. Ancaman rendahnya partisipasi masyarakat membayangi pilkada di musim pandemi ini. Penyelenggara dituntut untuk melakukan terobosan dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pilkada,” pungkasnya. ● dep/er

# Daerah Butuh Kekuatan Legitimasi Kala Pandemi

Menggelar pilkada di tengah pandemi menjadi pengalaman baru bagi penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Sangat penting bagi semua pemangku kepentingan kepegiluan baik penyelenggara pemilu, masyarakat sipil, pemerintah, partai politik, dan peserta pilkada untuk bersama-sama melindungi kesehatan publik sekaligus menjaga demokrasi.

**P**elaksanaan pilkada di tengah pandemi memiliki payung hukum yang kuat yaitu Perppu Nomor 2 Tahun 2020.

Pilkada yang demokratis, aman dan sehat harus diwujudkan bersama-sama. Kesetaraan kompetisi antar kandidat, pemenuhan hak pilih dan penyelenggara pemilu dengan protokol kesehatan yang ketat harus dijaga.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa mengatakan, salah satu alasan pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020 tetap digelar pada Desember 2020 adalah untuk menghindari pelaksana tugas (Plt) dalam memimpin daerah yang melaksanakan pilkada. Dari apa yang dijelaskan pemerintah, Saan mengakui bahwa di masa pandemi Covid-19 ini daerah membutuhkan legitimasi dan kepemimpinan yang kuat. Sementara Plt tidak bisa membuat kebijakan strategis.

Ia menyatakan, tidak hanya dibutuhkan pada masa pandemi Covid-19, seorang pemimpin daerah dengan legitimasi yang kuat juga dibutuhkan pasca pandemi. Kepala daerah harus melakukan pemulihan baik secara sosial, politik, maupun ekonomi. "Untuk bisa melakukan proses pemilihan

tentu kepemimpinan kuat dan legitimasi jadi penting, maka sedemikian rupa pemerintah dan DPR menghindari yang namanya Plt," kata Saan.

Ia menyampaikan, ada 270 daerah yang akan melaksanakan pilkada yang sebagian besar masa jabatan kepala daerahnya akan berakhir pada Januari-Februari 2021. Oleh karena itu, apabila pilkada ditunda dan 270 daerah itu dipimpin Plt, maka kewenangan pejabatnya menjadi terbatas. "Sementara

dia harus mengatasi persoalan besar seperti pandemi. Ini juga menjadi salah satu pertimbangan mengapa DPR menyetujui pilkada ini dilanjutkan tanggal 9 Desember 2020," paparnya.

Dikatakannya, Komisi II menyetujuinya pelaksanaan Pilkada pada 9 Desember 2020 dengan dua syarat, syarat pertama yaitu terkait keselamatan masyarakat. "Ini harus terpenuhi di tengah Covid-19 karena kita punya pengalaman Pemilu 2019 banyak penyelenggara yang gugur. Jadi keselamatan penyelenggara, pemilih, peserta harus terjaga," tuturnya.

Syarat kedua, sambungnya, yakni terkait kualitas demokrasi yang tidak boleh tereduksi. Semua prinsip demokrasi harus mampu diterapkan di setiap tahapan pilkada.

## BUTUH PERPPU PILKADA

Saan Mustopa menyatakan setuju ada peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) terkait pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 yang bertujuan untuk memberikan jaminan keselamatan, dan kesehatan kepada masyarakat.



Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa. Foto: Rumi/MAN



Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI foto bersama dengan Mendagri, Menkumham, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, dan Ketua DKPP. Foto: Rumi/MAK

“Karena dalam konteks di tengah pandemi ini yang jadi fokus utama kita adalah menjaga keselamatan bersama kesehatan bersama,” ujarnya.

Oleh karenanya Saan sempat menyarankan dilakukannya penghapusan terhadap metode kampanye yang berpotensi terjadinya pelanggaran protokol Covid-19 dan membuat kerumunan, seperti konser musik yang dapat mengundang massa dan menjadi pusat berkerumunnya orang-orang.

Politisi Fraksi Partai NasDem ini juga menyarankan agar pengaturan pemungutan suara dapat dilakukan secara keliling, sebagai antisipasi jika pada 9 Desember mendatang belum ada tanda penurunan. Namun jika eskalasi (pandemi covid-19) menurun dan tanggal 9 desember membaik, maka bisa menggunakan Tempat Pemungutan Suara (TPS) secara normal.

#### **TAHAPAN PILKADA MASIH BERJALAN BAIK**

Banyak kekhawatiran dari di antara anggota masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di tengah masa

pandemi Covid-19. Namun dalam sistem presidensial, termasuk pada pemerintahan lokal, secara konstitusi jabatan kepala daerah berlaku prinsip *fix term* atau telah ditetapkan masa jabatannya. Menunda pilkada dinilai bisa menimbulkan konflik politik yang kontraproduktif dalam situasi penanganan Covid-19.

Menyikapi desakan sejumlah pihak terkait penundaan pilkada serentak 2020, Saan mengatakan bahwa Komisi II DPR akan mempertimbangkan setiap masukan yang disampaikan. Namun sampai saat ini belum ada opsi penundaan pilkada, tegasnya. Ia mengungkapkan, semua tahapan yang sudah dan sedang berjalan saat ini masih berjalan relatif baik.

“Bahwa ada sedikit masalah pada saat pendaftaran bapaslون karena banyak melanggar protokol kesehatan pencegahan Covid 19, itu sudah kita evaluasi agar dalam tahapan ke depan tidak terulang,” tandasnya.

Saan Mustofa meminta agar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Kepolisian memberikan sanksi tegas bagi para pasangan

bakal calon kepala daerah dan simpatisannya yang melanggar protokol kesehatan Covid-19 dalam tahapan Pilkada serentak 2020.

“Penegakan hukum oleh Bawaslu maupun kepolisian harus dilakukan secara tegas terhadap paslon yang melanggar protokol kesehatan pencegahan Covid 19, dan KPU harus menerapkan sanksi bagi yang melanggar UU maupun PKPU,” tukasnya.

Ita rinci masih ada tiga tahapan Pilkada 2020 yang potensial terjadi pelanggaran terhadap protokol kesehatan Covid-19. Di antaranya pengundian nomor urut, kampanye, dan pemungutan suara.

Disisi lain, organisasi nirlaba mandiri Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai bahwa jika terjadi penundaan pemilihan kepala daerah (pilkada) akibat memburuknya situasi pandemi Covid-19 bukanlah sebuah bentuk kegagalan demokrasi. Perludem beranggapan, penundaan pelaksanaan pilkada adalah suatu bentuk antisipasi agar pilkada tidak menjadi klaster baru penyebaran Covid-19.

Menurut pihak Perludem, Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih mungkin untuk menunda pelaksanaan Pilkada serentak 2020 apabila situasi pandemi Covid-19 belum membaik. Disebutkan bahwa penundaan pilkada akibat pandemi tertuang didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pilkada. Apabila situasinya bencana non-alam semakin buruk maka memang bisa dilakukan penundaan. Namun keputusan tersebut harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan pemerintah dan DPR RI. Oleh karena pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 diputuskan tetap akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020, maka penerapan protokol kesehatan yang ketat harus benar-benar bisa ditaati oleh semua pihak.

● dep/er

# Pilkada Harus Dilaksanakan dengan Prokes Ketat

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Arwani Thomafi mengingatkan agar seluruh tahapan Pilkada 2020 dilaksanakan dengan protokol kesehatan Covid-19 yang ketat. Ia mengatakan, ketegasan pemerintah, penyelenggara pemilu, dan aparat penegak hukum amat diperlukan agar tidak terjadi lagi pelanggaran protokol Covid-19 pada tahapan-tahapan selanjutnya.

“Pilkada ini bisa diselenggarakan pada 2020 karena salah satunya kesiapan kita semua, pemerintah, penyelenggara, parpol, paslon untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Jangan sampai tahapan kampanye, pemungutan suara di ribuan TPS nanti melahirkan klaster baru,” ucapnya.

Arwani menyatakan, belum tegasnya penerapan regulasi dan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan Covid-19 dalam pelaksanaan Pilkada 2020 menyebabkan masih ditemukannya pelanggaran protokol kesehatan saat tahapan pendaftaran pasangan calon peserta Pilkada 2020 beberapa waktu lalu.

“Kita tentu melihat tahap pendaftaran yang sudah berlangsung masih banyak

pelanggaran protokol kesehatan, antusiasme masyarakat menyambut pendaftaran ini luar biasa. Tapi semangat dan keinginan masyarakat untuk meluapkan kegembiraan dan menyampaikan aspirasi melalui paslon harus tetap mematuhi protokol kesehatan,” tegas Arwani.

Oleh karenanya politisi Fraksi PPP itu mendorong pemerintah pusat untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah yang menyelenggarakan Pilkada 2020. Menurutnya, Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan

dalam Pengendalian Covid-19 telah memberikan kekuatan yang cukup bagi pemerintah daerah memberlakukan peraturan yang sesuai dengan kondisi di wilayahnya masing-masing.

Arwani mengimbau para paslon agar aktif mensosialisasikan bahaya penularan Covid-19 kepada para pendukung. Ia merasa khawatir dengan situasi ketidakdisiplinan terhadap aturan dan prosedur kesehatan Covid-19 dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.

“Kejadian pada tahapan pendaftaran paslon itu menampilkan sisi paradoks yang cukup mengkhawatirkan. Padahal, tahapan masih cukup panjang seperti kampanye, sosialisasi hingga hari H pencoblosan,” ungkapnya.

Saat tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Kepala Daerah di 271 daerah di Indonesia, Arwani mengaku sangat kecewa karena mendapatkan laporan banyak terjadi pelanggaran penerapan protokol kesehatan.

Pelanggaran berupa pengerahan massa yang

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arwani Thomafi. Foto: Rumi/MAN





## KEJADIAN PADA TAHAPAN PENDAFTARAN PASLON ITU MENAMPILKAN SISI PARADOKSAL YANG CUKUP MENKHWATIRKAN. PADAHAL, TAHAPAN MASIH CUKUP PANJANG SEPERTI KAMPANYE, SOSIALISASI HINGGA HARI H PENCOBLOSAN

begitu masif di sejumlah daerah tanpa mengindahkan protokol kesehatan.

Para peserta mengabaikan penggunaan masker, menjaga jarak, dan ketersediaan sarana mencuci tangan. Secara umum, protokol kesehatan Pencegahan Covid-19 tidak diterapkan secara konsekuen oleh beberapa pihak dalam tahapan pendaftaran calon kepala daerah.

Arwani menyayangkan sikap KPU dan Bawaslu yang tidak memprediksi masalah ini sejak awal. Menurutnya, dapat diterapkan dua sanksi sekaligus pada pelanggaran prosedur seperti ini, yakni penerapan sanksi sebagaimana diatur di masing-masing pemda semisal denda. Dan kedua adalah penerapan sanksi oleh Bawaslu/Panwaslu.

### LANGGAR PROKES, PELANTIKAN PEMENANG PILKADA DITUNDA

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah selesai menggelar tahapan pendaftaran calon kepala daerah. Data sementara, ada 687 bakal pasangan calon kepala daerah yang mendaftar ke KPU, dengan rincian sebanyak 22 bakal pasangan calon mendaftar sebagai gubernur dan wakil gubernur, 570 bapaslون mendaftar sebagai calon bupati dan wakil bupati, serta 95 bapaslون mendaftar sebagai calon wali kota dan wakil wali kota.

Dari 687 bapaslون yang

mendaftar, ada ratusan bapaslون yang diduga melanggar aturan protokol kesehatan Covid-19. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencatat, selama dua hari pendaftaran peserta Pilkada 2020, terjadi 243 dugaan pelanggaran yang dilakukan bakal calon kepala daerah. Belum lagi ditambah dengan dugaan pelanggaran pada hari ketiga.

Para bakal pasangan calon tersebut diduga melanggar aturan karena umumnya membawa massa saat mendaftar ke KPU. Ada pula bapaslون yang ketika mendaftar tak membawa surat hasil tes PCR atau swab test sebagai syarat verifikasi berkas pencalonan.

Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri memastikan para pelanggar protokol Covid-19 akan mendapat sanksi tegas dari pemerintah. Untuk itu Kemendagri telah menyiapkan opsi sanksi berupa penundaan pelantikan bagi pasangan calon pemenang Pilkada Serentak 2020 jika mengabaikan protokol pencegahan Covid-19.

Kemendagri menyatakan bahwa opsi tersebut menjadi bentuk keseriusan pihaknya terhadap penerapan aturan protokol pencegahan Covid-19. Nantinya para paslون itu akan 'disekolahkan' terlebih dulu di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri selama penundaan pelantikan.

Mereka akan mengenyam pendidikan terkait kepatuhan terhadap perundang-undangan selama tiga hingga enam bulan. Ada sebanyak 50 bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota dan satu gubernur terkait tidak patuh protokol kesehatan yang telah mendapat teguran keras.

Mengadakan pemilu di masa pandemi ini memang bukanlah hal yang mudah agar sejalan dengan standar demokrasi. Proses-proses pemilu normal dengan mengumpulkan banyak orang membuka peluang penyebaran virus. Efek lain adalah potensi berkurangnya partisipasi karena tingkat kekhawatiran yang tinggi terhadap penyebaran virus.

Di samping itu, potensi terjadi malpraktik pemilu, yang bahkan sering terjadi di masa normal, semakin berpeluang pada masa pandemi jika keterbatasan dihadapi oleh pihak penyelenggara dan pihak pengawas yang dibarengi oleh tidak optimalnya keterlibatan publik yang kritis.

Di samping proses penanggulangan wabah Covid-19, proses demokrasi harus tetap berjalan dengan segala konsekuensi karena ketidakpastian kapan pandemi akan berakhir. Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemi berpotensi membawa implikasi demokratis. Oleh karena itu, pembuat kebijakan harus menyikapi dengan prakondisi yang tepat.

Indonesia belum memiliki pengalaman menghadapi pemilihan umum di tengah wabah, sehingga menuntut persiapan ekstra dari seluruh pihak untuk dapat memetakan implikasi yang berpotensi mereduksi nilai-nilai demokratis di dalam pemilu. Tantangan Mewujudkan Pilkada Serentak yang Bersih mengharuskan KPU dan Bawaslu mampu menegakkan aturan yang ada dengan tegas. ● dep/er



# Urgensi Gelar Pilkada saat Pandemi Antisipasi Plt Massal

Oleh: Hisyam Diah

Pengamat Politik / Akademisi Pradita University/ Wasekjen SAPMA Pemuda Pancasila

Penyelenggaraan Pilkada yang secara resmi akan digelar pada 9 Desember 2020 mendatang di tengah pandemi Covid-19 membuat Pilkada 2020 memasuki babak yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Pesta demokrasi yang akan diselenggarakan di 270 daerah tersebut bakal dilaksanakan dengan berbagai adaptasi kebiasaan baru.

**P**ilkada 2020 ini memiliki urgensi untuk segera diselenggarakan. Mengingat, menunda pelaksanaan Pilkada sama dengan terjadinya penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) secara besar-besaran di 270 daerah. Sedangkan, seorang Plt terlebih di tengah situasi pandemi seperti saat-saat ini tidak bisa mengambil kebijakan-kebijakan strategis. Maka, untuk itulah Indonesia harus segera memilih kepala daerah sesegera mungkin sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh DPR dan Pemerintah.

Terkait dengan tantangan penyelenggaraan Pilkada 2020 di tengah pandemi Covid-19, Indonesia bisa berkaca kepada negara-negara lain yang telah terlebih dahulu melakukan pemilihan umum (Pemilu) dalam situasi pandemi. Seperti, di Korea Selatan yang pada awal masa pandemi sekitar bulan April telah secara sukses menyelenggarakan

Pemilu.

Suksesnya negara Korea Selatan dalam penyelenggaraan Pemilu bisa dilihat dari data statistik yang menunjukkan bahwa Pemilu di Korea Selatan yang diselenggarakan di tengah pandemi justru menunjukkan tren yang sangat positif. Dimana, suara Pemilu yang masuk merupakan jumlah suara tertinggi sejak tahun 1992 yaitu mencapai angka 66 persen.

Berkaca dari itulah, semestinya Indonesia bisa mengambil pembelajaran dari apa yang telah diterapkan Korea Selatan dengan menerapkan tiga pokok utama dalam menjalankan Pemilu di tengah pandemi Covid-19.

Poin pertama, yaitu sistem Pemilu yang berkualitas baik dari segi sistem kampanye dan sistem pemilihan. Mau tidak mau, saat-saat ini para pasangan calon (paslon) Pilkada sudah harus beralih ke dunia digital. Para paslon harus mampu beradaptasi atau “mati”. Karena, itulah kunci

yang sekarang bisa dilakukan di tengah pandemi yaitu melalui sistem digital.

Beberapa negara pun tercatat sudah menerapkan kampanye digital, salah satu contohnya seperti Singapura. Tetapi, yang perlu diperhatikan oleh para paslon dalam Pilkada 2020 mendatang, beranjak ke dunia digital ini bukan hanya sekedar beranjak menjadikan digital hanya sekedar alat.

Namun lebih dari itu, para paslon harus menyadari bahwa dunia digital sudah menjadi suatu tatanan dunia baru. Maka, para paslon juga harus serius memperhatikan *engagement* dalam sosial media. Yakni, setiap paslon tidak hanya sekedar menyampaikan postingan. Namun, juga harus secara aktif menjawab pertanyaan atau merespon *comment* yang ada dari pemerhati, simpatisan maupun masyarakat luas.

Jadi, para paslon tidak hanya sekedar posting namun juga bagaimana meng-*attract* orang-orang untuk memberikan *comment* dalam kampanye digital. Jadi, sistem Pemilu yang berkualitas harus secara serius diperhatikan oleh Pemerintah.

Selain itu, masih dari negara yang sama yaitu Korea Selatan, Indonesia juga bisa belajar

dari negara tersebut mengenai penyelenggaraan Pemilu melalui sistem pos. Jadi, beberapa bulan sebelum diselenggarakan Pemilu tersebut sudah disosialisasikan secara masif kepada masyarakat.

Serta, beberapa hari sebelum Pemilu, masyarakat yang tidak berkenan datang ke tempat pemilihan suara (TPS) bisa mencoblos melalui blanko resmi yang diberikan oleh panitia pemilu setempat untuk diisi dan kemudian dikirimkan ke alamat resmi penyelenggara pemilu di Korea Selatan.



## SETIAP PASLON TIDAK HANYA SEKEDAR MENYAMPAIKAN POSTINGAN. NAMUN, JUGA HARUS SECARA AKTIF MENJAWAB PERTANYAAN ATAU MERESPON *COMMENT* YANG ADA DARI PEMERHATI, SIMPATISAN MAUPUN MASYARAKAT LUAS

Kedua, selain dengan sistem Pemilu yang baik dan benar, yaitu penanganan dan pencegahan Covid-19. Seperti diketahui, saat-saat ini pencegahan dan penanganan Covid-19 ini menjadi issue sentral yang menjadi pembicaraan utama di tengah masyarakat.

Dengan demikian, sudah semestinya momentum perhelatan Pilkada 2020 dijadikan Pemerintah sebagai momentum untuk menarik kepercayaan publik bahwa Pemerintah benar-benar serius dalam penanganan Covid-19. Melalui cara apa? Satu, lagi-lagi Indonesia harus kembali berkaca kepada negara-negara lain yang telah sukses melakukan Pemilu di tengah pandemi.

Seperti di Korea Selatan, panitia setempat menyediakan fasilitas

berbagai Alat Pelindung Diri (APD) kepada para panitia dan pemilih dalam Pemilu setempat. Jadi, tidak hanya diberikan masker semata, tetapi diperhatikan detail sampai berbagai kelengkapan fasilitas APD-nya. Bahkan, tiap-tiap bilik suara telah disemprotkan disinfektan.

Ketiga, yang tak kalah pentingnya adalah kepercayaan publik. Sebab, dengan upaya Pemerintah dalam mengembalikan kepercayaan publik khususnya dalam penanganan Covid-19, maka dengan sendirinya

masyarakat akan terpanggil untuk memberikan suaranya. Tentunya, dengan demikian hal itu akan menekan jumlah golongan putih (golput).

Meskipun, sebenarnya walaupun dalam keadaan tidak ada pandemi, golput merupakan satu permasalahan utama yang sebenarnya harus diselesaikan oleh Pemerintah. Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu atau Pilkada tiap tahunnya harus ditingkatkan.

Terlebih, dalam penyelenggaraan Pilkada di tengah pandemi seperti saat-saat ini tentunya Pemerintah harus serius memperhatikan beberapa aspek yang telah disebutkan di awal. Pertama, sistem Pemilu-nya harus benar-benar diperhatikan terlebih dahulu dan disosialisasikan betul-

betul kepada Paslon.

Sehingga, para paslon ini betul-betul bisa juga mensosialisasikan kepada para simpatisannya. Kedua, penanganan Covid-19 ini menjadi hal yang sangat *basic*, sangat penting dan sentral yang harus diperhatikan baik itu dalam segi penyediaan kelengkapan APD-APD dan sterilisasi tiap-tiap TPS.

Mengingat, dari berbagai aspek itulah Pemerintah bisa menumbuhkan kepercayaan publik. Sehingga, dari timbulnya kepercayaan publik maka akan meningkatkan partisipasi dari masyarakat untuk mengikuti Pilkada 2020 ini.

Momen Pilkada 2020 mendatang harus benar-benar bisa melahirkan pemimpin-pemimpin yang bisa dipercaya oleh masyarakat. Dimana, tentunya berangkat dari gagasan dan narasi yang memang bisa diterima oleh masyarakat.

Serta, diharapkan melalui momentum Pilkada 2020 ini juga bisa melahirkan pemimpin-pemimpin yang segera bisa mengambil kebijakan-kebijakan strategis dan konkret tentunya terutama untuk kebangkitan ekonomi nasional.

Karena, seperti diketahui bahwa sepanjang pandemi Covid-19, ekonomi nasional sudah dibilang cukup terpuruk dan bahkan akan bersiap memasuki masa resesi di kuartal III-2020 seperti yang diungkapkan oleh Menteri Keuangan.

Maka, kita harapkan bersama agar para pemimpin terpilih dalam Pilkada 2020 mendatang tersebut merupakan pemimpin dengan kebijakan-kebijakan yang sangat strategis untuk segera diterapkan oleh para pemimpin kepala daerah terpilih. Jadi, para pemimpin terpilih dalam Pilkada 2020 harus segera bekerja untuk kebangkitan ekonomi nasional. ●

# Prioritaskan Program Pembinaan dan Pemulihan Pasar UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu sektor usaha yang paling terdampak pandemi Covid-19. Pembatasan sosial yang dilakukan sejak kasus pertama virus Corona di Indonesia diumumkan pada 2 Maret lalu telah membuat banyak sektor bisnis, termasuk UMKM menjadi terganggu.

**B**erbagai langkah telah dan masih akan terus dilakukan pemerintah untuk meminimalkan dampak pandemi Covid-19, di antaranya program bantuan sosial (bansos). Kemudian, insentif perpajakan bagi UMKM. Selanjutnya, relaksasi dan restrukturisasi kredit UMKM. Keempat, perluasan pembiayaan bagi UMKM berupa stimulus bantuan modal kerja. Kelima, kementerian, lembaga, BUMN dan pemerintah daerah menjadi *buffer* dalam ekosistem usaha UMKM terutama pada tahap awal *recovery* konsolidasi usaha.

Namun, langkah tersebut dinilai oleh beberapa pihak belum optimal. Sebab, pemerintah hanya fokus menyediakan dana stimulus, namun tidak memikirkan pasar bagi UMKM.

Program pembinaan oleh beberapa pakar pun dianggap sebagai salah satu langkah yang harus diprioritaskan pemerintah terhadap para pelaku UMKM. Hal tersebut juga diamini oleh Ketua Komisi VI DPR RI Faisol Riza yang



Ketua Komisi VI DPR RI Faisol Riza. Foto: Dok/MAN

mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini kurang menyorot program pembinaan UMKM. Menurut pandangannya, terlepas dari segala akses kemudahan berusaha dan perizinan yang disiapkan, menurutnya program pembinaan merupakan satu hal penting untuk memajukan UMKM Indonesia menyentuh pasar dunia.

Dalam hal tersebut, masalah UMKM saat ini dikategorikan ke dalam tiga bagian. Pertama soal akses terhadap pembiayaan, kedua soal keberlanjutan produk melalui *quality control*, ketiga penetrasi pasar. Faisol mengatakan bahwa saat ini Pemerintah masih dalam tahap pertama, yaitu memberikan akses kemudahan pembiayaan.

“Tetapi untuk membantu melakukan pembinaan agar *quality control* terhadap produk UMKM bagus, kemudian kontinuitas dari usaha mereka karena kebutuhan pasar yang tinggi dan juga penetrasi pasar itu belum dilakukan sepenuhnya oleh Pemerintah

karena belum ada integrasi yang cukup serius dari masing-masing instansi,” terang Faisol, beberapa waktu lalu.

Integrasi yang dimaksud Faisol adalah sinergi antar kementerian untuk menciptakan sebuah modelling pasar atau model dimana UMKM bisa menjadi usaha yang memberikan masa depan bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini berharap ada inovasi yang bisa menjadi fondasi agar Indonesia mencapai ke arah tersebut.

Di lain sisi, Pemerintah juga harus segera mencari pasar di luar negeri untuk para pegiat UMKM. Sebab selama ini UMKM Indonesia memang masih kurang mendapat tempat di mata dunia. Padahal di beberapa kementerian memiliki unit kerja khusus yang fokus terhadap pengembangan pasar Indonesia.

“Penetrasi pasar ke luar negeri yang harusnya menjadi tugas Kementerian Perdagangan. Ada ITPC (International Trade Promotion Center) yang dimiliki Kemendag.

BKPM juga memiliki fasilitas yang sama selain atase perdagangan. Nah pasar-pasar pameran di luar itu sangat sedikit yang melibatkan UMKM kita, dan kalau pun dipilih itu jenisnya kalau menurut saya kurang lebih hanya soal *craft* atau kerajinan,” terang Faisol.

Mantan aktivis ini pun mendorong pemerintah untuk saling bersinergi membangun semacam ekosistem dimana UMKM dapat memenuhi pasar-pasar utama dari segala kebutuhan manusia di seluruh dunia. Sorotan pun ditujukan pada pemda yang diharapkan dapat memfasilitasi atau menyampaikan keluhan ke pusat apabila ada kesulitan yang dihadapi UMKM di daerah.

“Jadi belum ada desain dimana Pemerintah itu membangun semacam ekosistem dimana UMKM kita itu bisa ikut memenuhi pasar-pasar utama dari kebutuhan-kebutuhan manusia di seluruh dunia ini. Honda misalnya sekiranya bisa dibuat oleh UMKM. Nah gimana itu bisa terjadi? Ya itu tugas Pemerintah,” imbuh legislator dapil Jawa Timur II itu.

#### UMKM KESULITAN HADAPI PASAR

Realisasi bantuan modal kerja bagi pelaku UMKM melalui penyaluran kredit oleh bank-bank pelat merah juga dinilai tidak berjalan sesuai harapan. Anggota Komisi VI DPR

RI Amin AK menilai, setidaknya ada dua alasan yang menyebabkan kondisi tersebut terjadi. Pertama, minimnya pendampingan dan pembinaan UMKM terutama dalam konteks pemulihan pasar dari produk mereka. Kedua, program bantuan hanya terfokus pada restrukturisasi kredit semata, sehingga bank-bank penyalur terkesan asal menggugurkan kewajiban saja.

Akibatnya kebijakan yang baik dan diharapkan menjadi solusi menghindari resesi ekonomi itu tidak menyentuh akar permasalahan para pelaku UMKM. Bantuan modal kerja memang diperlukan, namun kesulitan mendapatkan pasar akibat turunya daya beli masyarakat merupakan hal yang jauh lebih berat bagi UMKM. Menurut Amin, jika modal kerja diibaratkan pertolongan pertama lewat bantuan pernafasan, maka pemulihan pasar merupakan pertolongan lanjutan agar pelaku UMKM bisa bangkit dan *survive*.

“Agar bisa *survive* dan kemudian bangkit usahanya, maka Pemerintah harus mampu memfasilitasi pemulihan pasar mereka. UMKM butuh panduan agar bisa *shifting* ke produk-produk yang banyak dibutuhkan konsumen,” tegas politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Saat ini, lanjut Amin, berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, dari total 64 juta pelaku usaha kecil dan menengah yang ada di Indonesia, 80 persen atau sekitar 51 juta di antaranya masih *unbankable* atau tidak mendapat bantuan pinjaman dari bank. Sehingga menurutnya, jumlah pelaku UMKM yang disasar pemerintah masih terlampau kecil. Memang kemudian ada bantuan Presiden sebesar Rp 2,4 juta untuk 12 juta pelaku UMKM.

Namun proses verifikasi dan validasinya dalam waktu singkat tentunya tidak mudah. Amin berharap Pemerintah mau jemput bola agar penerima bantuan betul-betul UMKM yang memang membutuhkan dengan tolok ukur yang jelas. “Pemerintah menggelontorkan Rp30 triliun kepada bank-bank BUMN agar disalurkan ke UMKM. Namun *outcome*-nya harus jelas karena program ini menggunakan uang rakyat,” kata Amin.

Selanjutnya untuk permasalahan kedua, menurut Amin, restrukturisasi kredit saja tidak cukup karena persoalan yang dialami UMKM akibat pandemi itu sangat kompleks. Restrukturisasi kredit hanya efektif bagi pelaku UMKM yang memiliki persoalan keuangan yang berat, namun usahanya masih bisa berjalan dengan suntikan modal. Sedangkan kebanyakan pelaku UMKM banyak yang kehilangan pasar karena turunya daya beli masyarakat.

“Yang lebih memprihatinkan, bank-bank BUMN mempersyaratkan debitur melunasi utang lama mereka terlebih dahulu agar bisa memperoleh kredit baru. Ini jelas *gak* menyelesaikan persoalan dan terkesan *nyari* aman. Padahal bank-bank tersebut juga harus bersama-sama aktif meminimalisir risiko,” tandas legislator dapil Jawa Timur IV itu. ● er/sf



Anggota Komisi VI DPR RI Amin AK. Foto: Jaka/MAN

# Penerbitan RIPH Harus Sesuai Kebutuhan

Kebutuhan akan impor hortikultura adalah hal yang tak bisa dihindarkan dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri, utamanya terkait dengan kekurangan produksi di dalam negeri. Namun, proses impor tersebut sedianya harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Sehingga apa yang didatangkan cukup untuk memenuhi kebutuhan serta tidak menjadi sia-sia.

Ilmu RIPH atau Rekomendasi Impor Produk Hortikultura dikenal sebagai keterangan tertulis yang menyatakan produk hortikultura memenuhi persyaratan administrasi dan teknis. Dalam beberapa bulan terakhir, Komisi IV DPR RI menaruh perhatian cukup dalam terhadap RIPH ini, yang intinya sangat mendukung adanya peningkatan kualitas produk hortikultura yang didatangkan. Komisi IV DPR RI pun menyoroti sejumlah hal terkait kebijakan RIPH oleh Kementerian Pertanian.

Ketua Komisi IV DPR RI Sudin memberikan sejumlah sorotan dan masukan terhadap Kementan berkenaan dengan RIPH ini. Sudin meminta Kementan untuk membatasi penerbitan RIPH dengan menyesuaikan antara volume dan perhitungan kebutuhan impor. Hal ini penting agar barang impor yang didatangkan tidak berakhir dengan sia-sia.

“Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk menyusun kriteria dan persyaratan atas komoditas yang diperbolehkan untuk diterbitkan RIPH, antara lain seperti komoditas hortikultura yang tidak mampu dihasilkan atau dibudidayakan oleh petani lokal

dan mengacu kepada ketersediaan dan pasokan dalam negeri,” ujar Sudin dalam kesempatan Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dengan jajaran Kementan beberapa waktu yang lalu.

Selanjutnya, imbuh politisi PDI-Perjuangan ini, Komisi IV DPR RI meminta Kementan untuk segera melakukan revisi Peraturan Menteri Pertanian tentang RIPH, sesuai dengan evaluasi terhadap daftar komoditas yang perlu diimpor. Diketahui, dalam praktiknya seringkali importir tidak melakukan realisasi impor dalam waktu yang telah ditentukan, karenanya Sudin dengan tegas mendesak Kementan untuk mencabut izin RIPH bagi importir yang tidak patuh tersebut.

“Selain itu, Komisi IV DPR RI mendesak Kementan untuk mencabut izin RIPH bagi importir yang tidak segera merealisasikan impor dalam waktu yang sudah

ditentukan,” tegas Sudin. Pihaknya juga akan menindaklanjuti sejumlah perusahaan importir yang melanggar ketentuan RPIH. Ia pun mengaku akan memanggil sejumlah perusahaan yang melanggar tersebut guna mendapatkan pendalaman guna penyelesaian persoalan lebih lanjut. Tak hanya itu, Komisi IV DPR RI juga akan melakukan pendalaman dengan pihak terkait seperti Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Satgas

Ketua Komisi IV DPR RI Sudin.  
Foto: Rumi/MAN



Pangan dan Kabareskrim Polri jika telah mendapatkan izin dari Pimpinan DPR RI.

Sudin menambahkan, ketegasan Kementan dinilai bermanfaat untuk mencegah terjadinya praktik perdagangan monopoli yang tidak sehat. Karena diakui, praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat cukup menghambat laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia. “Ini sebagai upaya mencegah terjadinya praktik perdagangan dan monopoli pelaku usaha tertentu,” tegasnya.

Sudin juga menyebut bahwa Komisi IV DPR RI meminta Kementan untuk melakukan evaluasi kebijakan wajib tanam bagi importir. Hal itu dikarekan masih temukannya sejumlah importir yang tidak melakukan kewajiban wajib tanam. Ia pun menilai tingkat pengawasan dalam sektor ini sangat minim sehingga perlu adanya penguatan infrastruktur dan SDM.

### PRODUKSI HORTIKULTURA HARUS MENINGKAT

Sudin juga terus mengupayakan agar produksi hortikultura di Indonesia bisa lebih baik dan meningkat lagi. Hal ini penting guna mengurangi ketergantungan terhadap impor. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan yakni bisa memfasilitasi petani dengan menghadirkan bibit berkualitas, sarana pengelolaan pasca panen dan membuka akses pasar kepada petani. Jika cara-cara tersebut dilakukan dengan baik maka akan mampu mengurangi ketergantungan impor.

“Kami minta Kementan agar mampu meningkatkan produksi komoditas hortikultura melalui fasilitasi benih dan bibit yang berkualitas, sarana prasarana produksi, sarana prasarana pengolahan pascapanen, dan akses pasar kepada petani. Selain

MASIH TERDAPAT  
PERSOALAN KLASIK  
SEPERTI HARGA,  
PENANGANAN PASCA  
PANEN YANG BELUM  
BAIK DAN MASALAH  
BEA MASUK PRODUK  
KITA DI LUAR NEGERI

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI  
Dedi Mulyadi

Foto: Rumi/MAN



itu Komisi IV juga mendukung Pemerintah untuk membuat indikator keberhasilan produksi bawang putih bagi importir yang wajib tanam sesuai dengan RIPH yang berlaku,” ungkap Sudin.

Legislator dapil Lampung ini pun juga meminta Kementan untuk menyusun peta penyelenggaraan produk hortikultura nasional yang mengacu terhadap agroekosistem dan kesesuaian lahan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan mencapai target swasembada produk hortikultura nasional.

Lebih lanjut guna mendalami persoalan tentang ekspor dan impor produk hortikultura, Komisi IV DPR RI telah membentuk Panitia Kerja (Panja) Hortikultura yang bertujuan membahas berbagai hal mengenai ekspor dan impor produk hortikultura. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi mengungkapkan bahwa panja hortikultura adalah diawali dengan pembahasan regulasi, dukungan dari pemerintah hingga permasalahan RIPH.

Politisi Partai Golkar itupun mengakui produk hortikultura Indonesia sangat unggul dan berdaya saing tinggi, tapi masih ada kendala di penanganan

pascapanen. Hal ini harus segera diselesaikan. “Produk hortikultura kita merupakan salah satu produk yang memiliki nilai tambah dan daya saing yang tinggi. Namun, masih terdapat persoalan klasik seperti harga, penanganan pasca panen yang belum baik dan masalah bea masuk produk kita di luar negeri,” jelas Dedi.

Pada prinsipnya, masih kata legislator dapil Jawa Barat VII itu, pihaknya ingin produk hortikultura Indonesia terpenuhi kebutuhannya. Kesejahteraan petani juga menjadi orientasi arah kebijakan yang diperjuangkan. Untuk menuju ke sana, dibutuhkan regulasi dan aturan, serta membutuhkan komitmen yang kuat dari seluruh elemen seperti petani, perusahaan serta Pemerintah.

Karenanya dalam sebuah kesimpulan RDP dengan Dirjen Hortikultura Kementan, Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk meninjau ulang Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura terkait dengan penerapan dan pengawasan kebijakan kewajiban ekspor impor yang saat ini masih terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha produk hortikultura. ● hs/sf

# Dana PEN Berlanjut, Ekonomi Didorong segera 'Bangun'

Pemerintah kembali mengalokasikan anggaran sebesar Rp 356,5 triliun guna mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada tahun anggaran 2021. Alokasi tersebut diprioritaskan untuk mendukung enam program PEN.

**P**residen Joko Widodo dalam Pidato RAPBN 2021 beserta Nota Keuangannya pada 14 Agustus 2020 lalu, menyebut bahwa rencana alokasi program PEN tahun 2021 dianggarkan senilai Rp 356,5 triliun. Alokasi tersebut menurun dibandingkan tahun ini yang mencapai Rp 695,2 triliun. Padahal, besarnya anggaran

penanganan pandemi Covid-19 tersebut masih terus bertambah. Belum lagi, sempat ada kemarahan Presiden kepada jajaran menteri karena realisasi anggarannya masih cukup rendah.

Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2021 sendiri telah resmi disahkan menjadi Undang-Undang pada Rapat Paripurna, akhir September lalu. 'Percepatan

Pemulihan Ekonomi dan penganan Reformasi' dipilih Pemerintah menjadi tema besar APBN 2021, yang telah melalui proses

pembahasan di tengah pandemi Covid-19 di Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.

Ketua Banggar DPR RI MH Said Abdullah menyatakan setidaknya terdapat tiga *concern* utama dalam APBN 2021, yang digadang-gadang menjadi rebound pemulihan ekonomi pasca pandemi.

Menurutnya, Pertama, pemerintah perlu menaati ketetapan defisit tak lebih dari 5,7 persen. Selanjutnya, jika terjadi hal darurat seperti pandemi, maka Pemerintah diberi kewenangan untuk *refocussing* dan realokasi. Terakhir, apabila penerimaan sektor perpajakan tidak terpenuhi, maka bisa dilakukan pemotongan anggaran Kementerian/Lembaga.

"Tetap kita kawal Pemerintah dalam program pemulihan nasional di tahun 2021, anggarannya kan sudah dialokasikan Rp 356 triliun, kita mendorong Pemerintah untuk menyisir kembali anggaran-anggaran K/L agar pemulihan ekonomi bisa menjadi Rp 500 triliun. Sehingga, dengan demikian Pemerintah bisa betul-betul fokus untuk penanganan Covid-19 dan pertumbuhan ekonomi nasional," kata Said saat diwawancara khusus oleh *Parlementaria*, usai merampungkan pembahasan ABPN 2021 di Ruang Rapat Banggar DPR RI, Senayan, Jakarta.

Dihadapkan dengan ancaman resesi setelah proyeksi pertumbuhan ekonomi Kuartal III-2020 berada di kisaran minus 1 persen sampai minus 2,9 persen, Said mengimbau masyarakat untuk tetap tenang. Ia menyatakan, resesi saat ini bukan berarti negara kita dalam keadaan darurat karena semua dunia tengah mengalami krisis ekonomi akibat pandemi. Untuk itu, pemerintah harus terus fokus memberikan berbagai perlindungan sosial atau *social*

Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah. Foto: Oji/AMAN





Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah berbincang dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Foto: Oji/Man

*safety net*, seperti bansos, bantuan subsidi gaji, hingga bantuan bagi UMKM.

“Sektor UMKM inilah yang harus didukung dari berbagai sisi, sehingga tercipta *demand* (permintaan), dan jika *demand*-nya tumbuh, maka produksi akan tetap jalan dan dari sisi penawaran akan lancar, sehingga *supply* dan *demand*-nya akan pulih. Kita punya keyakinan, pada 2021 ekonomi kita akan berhasil tumbuh kembali di atas 5 persen. Kalau perkiraan kita di tahun 2020 ini pertumbuhan secara tahunan kita terkontraksi ke minus 1 persen hingga minus 1,3 persen,” lanjut politisi PDI-Perjuangan itu.

Senada dengan hal itu, Wakil Ketua Banggar DPR RI Muhidin Mohamad Said mengungkap bahwa pembahasan RAPBN 2021 berlangsung secara dinamis, dimana hingga saat ini permasalahan kesehatan dalam menanggulangi pandemi Covid-19 belum usai, namun pemulihan ekonomi tetap harus berjalan.

“Dua masalah ini (kesehatan

dan ekonomi, **red**) tidak bisa dipisahkan antara satu dengan lainnya. Masalah ekonomi harus berjalan sejajar sehingga kita tidak teralut terpuruk dengan kontraksi ekonomi yang menimpa semua negara. Oleh karena itu, kita bersyukur bahwa kita sudah

sepakat merampungkan RUU tentang APBN 2021,” ungkap politisi Golkar itu kepada *Parlementaria* dalam kesempatan yang sama.

Dirancang dalam situasi pandemi, RAPBN 2021 secara garis besar ditujukan untuk percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi. Muhidin mengatakan bahwa Pemerintah diberi ruang untuk melakukan *refocussing* dan realokasi anggaran apabila terjadi sesuatu, misalnya penerimaan negara di luar target dan kesepakatan yang sudah dilakukan DPR dan Pemerintah.

Akibat pandemi dan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), perekonomian Indonesia terus mengalami penurunan. Meski sempat positif 2,97 persen pada Kuartal I awal tahun ini, namun pada Kuartal II pertumbuhan ekonomi terkontraksi minus 5,32 persen. Angka defisit juga terus mengalami pelebaran, Muhidin menjelaskan bahwa terbukti pada tahun 2020 ini angka defisit mencapai 6,34 persen.



Foto: Oji/Man

Anggota Komisi XI DPR RI itu mengungkapkan, pada tahun mendatang proyeksi defisit berada di kisaran 5,7 persen.

“Kita berikan batasan-batasan, misalnya saat defisit lebih dari 3 persen, *shortfall* pajak 30 persen, maka Pemerintah bisa melakukan revisi. Kalau itu tidak tercapai, maka Pemerintah hanya punya kewenangan untuk melakukan *refocussing* dan realokasi, dengan tidak mengurangi anggaran pemulihan ekonomi dan penanggulangan Covid-19. Itu yang lama jadi perdebatan antara Banggar DPR dengan pemerintah. Oleh karena itu, segala sesuatu yang harus kita lakukan untuk mempercepat pemulihan ekonomi ini, Pemerintah harus mengambil langkah cepat, sehingga kita bisa kembali sebagaimana biasa pada tahun 2023 nanti,” jelasnya.

### OPTIMIS CIPTAKAN *CONFIDENCE*

Sebagaimana disampaikan Presiden Jokowi, perincian anggaran senilai Rp 356,5 triliun ini terdiri atas, pertama, penanganan kesehatan dengan anggaran sekitar Rp 25,4 triliun.

Kedua, program perlindungan sosial untuk masyarakat menengah ke bawah sekitar Rp 110,2 triliun. Ketiga, dukungan sektoral K/L sekitar Rp 136,7 triliun. Keempat, dukungan kepada UMKM sekitar Rp 48,8 triliun. Kelima, pembiayaan korporasi sekitar Rp 14,9 triliun, serta keenam, anggaran untuk insentif usaha sekitar Rp 20,4 triliun.

Pada Konferensi Pers APBN KITA, September lalu, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati menegaskan APBN 2021 akan menjadi alat pemulihan ekonomi dari dampak pandemi Covid-19. Selain itu, kebijakan *countercyclical* yang ekspansif dan konsolidatif dengan memperhatikan fleksibilitas dalam merespons kondisi perekonomian dan mendorong pengelolaan fiskal yang pruden dan berkelanjutan.

“APBN menjadi alat untuk menjaga pemulihan ekonomi dari pandemi, maupun untuk menangani pandemi, yang masih terus berlanjut di 2021. Kita juga akan menjaga defisit kita ke arah yang konsolidatif berhati-hati, arahnya sudah lebih rendah dari

tahun ini dan terukur supaya momentum pemulihan ekonomi tidak terganggu,” kata Sri Mulyani dalam jumpa pers virtual selepas pengesahan RUU APBN 2021.

Dalam berbagai kesempatan, Sri Mulyani sempat menyebut setidaknya terdapat tiga faktor kunci untuk memulihkan ekonomi Indonesia di tahun depan. Pertama, penanganan Covid-19 harus lebih baik untuk tahun ini maupun tahun depan. Hal ini guna mempercepat penekanan penyebaran Covid-19 dan disiplin protokol Covid-19 yang diterapkan akan mempengaruhi percepatan pemulihan.

Kemudian, tersedianya vaksin yang sesuai dengan timeline akan menjadi solusi pandemi ini, namun hingga saat ini juga masih belum tahu apakah sudah dapat digunakan dan dapat mengurangi ketidakpastian ini. Terakhir, dengan mendorong sisi permintaan dan pasokan yang harus dijaga, dimana Pemerintah tetap akan mengucurkan bantuan sosial untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan memberikan relaksasi bagi beberapa pihak terkait. ● alw/sf



Suasana Rapat Banggar DPR RI dengan Menteri Keuangan. Foto: Oji/MAN

# ANGGARAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Pemerintah telah mengalokasikan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2021 senilai Rp 356,5 triliun. Besaran alokasi tersebut nantinya akan diprioritaskan untuk mendukung 6 Program PEN.



## PENANGANAN KESEHATAN

**Rp 25,4 Triliun**

- Pengadaan Vaksin Covid-19
- Imunisasi
- Sarana dan prasarana
- Laboratorium
- Penelitian dan Pengembangan
- Cadangan bantuan iuran BPJS



## PERLINDUNGAN SOSIAL MASYARAKAT MENENGAH KEBAWAH

**Rp 110,2 Triliun**

- PKH untuk 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM)
- Kartu sembako bagi 18,8 juta KPM
- Kartu prakerja
- Bantuan Langsung Tunai (BLT) desa dan BUMDes
- Bansos tunai bagi 10 juta KPM



## SEKTORAL KEMENTERIAN/ LEMBAGA DAN PEMDA

**Rp 136,7 Triliun**

- Dukungan Pariwisata
- Ketahanan Pangan
- Pengembangan IT
- Pinjaman ke daerah
- Padat karya K/L
- Kawasan Industri
- Cadangan belanja PEN



## DUKUNGAN BAGI UMKM

**Rp 48,8 Triliun**

- Subsidi bunga KUR
- Pembiayaan koperasi dan UMKM
- Penjaminan dan penempatan dana di perbankan



## PEMBIAYAAN KOPERASI

**Rp 14,9 Triliun**

- Penyertaan Modal Negara (PMN) bagi BUMN
- PMN bagi lembaga penjaminan
- Penjaminan backstop loss limit



## INSENTIF USAHA

**Rp 20,4 Triliun**

- Pajak ditanggung pemerintah
- PPh 22 Impor
- Pengembalian pendahuluan PPN

# Hakim Konstitusi Harus Negarawan

Rapat Paripurna DPR RI telah menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi Undang-Undang (UU) pada awal September 2020. Dalam UU diatur mengenai kedudukan susunan dan wewenang MK, pengangkatan dan pemberhentian Hakim Konstitusi dan perubahan masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua MK.

**W**akil Ketua Komisi III DPR Adies Kadir yang juga Ketua Panitia Kerja (Panja) Revisi UU MK menjelaskan, pembahasan RUU MK dimulai sejak 25 Agustus 2020 sampai 28 Agustus 2020. Panja telah melakukan perumusan dan sinkronisasi pada seluruh materi RUU MK. Panja juga telah membahas dan menyempurnakan substansi terhadap undang-undang sebelumnya. Politisi Ia pun menjabarkan tentang poin-poin perubahan seperti usia dan tata cara seleksi hakim.

“Perubahan mengenai usia minimal, syarat dan tata cara seleksi hakim, penambahan ketentuan baru mengenai unsur Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, pengaturan mengenai ketentuan peralihan agar jaminan kepastian hukum yang adil bagi hakim konstitusi yang saat ini masih mengemban amanah sebagai negarawan penjaga konstitusi tetap terjamin secara konstitusional,” papar Adies dalam laporannya di hadapan Rapat Paripurna.

Politisi Fraksi Partai Golkar ini juga melaporkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang telah disampaikan oleh

Pemerintah berjumlah 121 DIM. Dengan rincian jumlah DIM yang dinyatakan tetap sebanyak 101 DIM, yang bersifat redaksional sebanyak 8 DIM bersifat substansi sebanyak 10 DIM, dan yang bersifat substansi baru sebanyak 2 DIM.

Adies juga melaporkan bahwa Panja RUU MK terdiri dari 27 orang Anggota Komisi III DPR RI yang mewakili 9 Fraksi yang ada di DPR RI. Panja ditugaskan untuk membahas beberapa hal yang sistematis terhadap materi dan DIM RUU MK. Panja pun telah membentuk Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) untuk melakukan perumusan dan sinkronisasi seluruh materi substansi yang ditugaskan oleh Panja.

“Pada tanggal 28 Agustus 2020 hasil kerja selama pengesahan di Timus dan Timsin telah

dilaporkan pada Pleno Panitia Kerja,” ungkap Adies. Jabatan hakim konstitusi merupakan salah satu jabatan yang persyaratannya diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945. Salah satu syarat yang ditegaskan dalam UUD 1945, seorang hakim konstitusi adalah seorang negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. Syarat negarawan ini tidak ditentukan untuk jabatan kenegaraan lain dalam UUD 1945, sehingga memiliki makna tersendiri apabila dikaitkan dengan wewenang MK.

Dari sisi gramatikal, negarawan adalah orang yang memiliki pengetahuan dan keahlian penyelenggaraan negara, medan pengalaman yang cukup, serta komitmen untuk melaksanakan dan mengawal kehidupan bernegara sesuai dengan koridor konstitusi. Negarawan juga dapat diartikan sebagai sosok yang visioner, berorientasi jangka panjang, mengutamakan

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir. Foto: Rumi/MAN



APA YANG MENJADI  
DASAR PEMIKIRAN, KITA  
MENGINGINKAN AGAR  
POSISI HAKIM KONSTITUSI  
ADALAH PENGABDIAN  
YANG PALING TERAKHIR,  
PENGABDIAN YANG  
TERPUNCAK DARI  
SESEORANG UNTUK  
NEGARA INI. KARENA  
SYARATNYA NEGARAWAN

Anggota Komisi III DPR RI  
Taufik Basari

Foto: Jaka/MAN



kesejahteraan masyarakat, mampu berlaku egaliter serta adil dan mengayomi semua komponen bangsa. Dalam bahasa Inggris negarawan disebut *statesman* atau *stateswoman*, sebagai sebutan terhadap tokoh yang mempunyai karier terhormat atau *respected career* di bidang kenegaraan baik nasional maupun internasional.

Dalam kesempatan berbeda, Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari menekankan kembali tentang dasar pemikiran itu saat pembahasan UU tersebut. Baginya syarat negarawan merupakan orang yang tidak terikat dengan kepentingan apapun kecuali untuk mengawal konstitusi secara benar dan baik. “Apa yang menjadi dasar pemikiran, kita menginginkan agar posisi hakim konstitusi adalah pengabdian yang paling terakhir, pengabdian yang terpuncak dari seseorang untuk negara ini. Karena syaratnya negarawan,” papar politisi F-NasDem itu.

Adies menambahkan, dalam UU MK juga diatur soal perubahan mengenai usia minimal syarat dan tata cara seleksi hakim konstitusi, penambahan ketentuan baru mengenai unsur majelis

kehormatan mahkamah konstitusi, serta; pengaturan mengenai ketentuan peralihan agar jaminan kepastian hukum yang adil bagi hakim konstitusi yang saat ini masih mengemban amanah sebagai negarawan, menjaga konstitusi tetap terjamin secara konstitusional.

Dalam draf UU MK Pasal 87 ayat b yang telah disahkan disebutkan: “Hakim konstitusi yang sedang menjabat pada saat Undang-Undang ini diundangkan dianggap memenuhi syarat menurut Undang-Undang ini dan mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 tahun. “Dalam UU MK yang baru, tak ada lagi masa jabatan hakim MK selama lima tahun dan dapat dipilih lagi untuk satu periode masa jabatan berikutnya. DPR dan Pemerintah menghapus ketentuan masa jabatan tersebut yang sebelumnya diatur di dalam Pasal 22,” imbuh Adies.

Sementara itu, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (HAM) Yasonna H Laoly dalam pidatonya mewakili Pemerintah mengungkapkan, MK merupakan penafsir tunggal

dan penjaga konstitusi, dengan adanya revisi UU tersebut diharapkan peran MK dapat lebih optimal sesuai harapan para pencari keadilan. Tak lupa pula ia mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam pembahasan RUU tersebut.

“Kami mewakili Presiden dalam Rapat Paripurna yang terhormat ini dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Presiden menyatakan setuju rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi untuk disahkan menjadi Undang-Undang,” papar Yasonna.

Sebelum disahkan dalam Rapat Paripurna, Komisi III DPR RI telah melaksanakan Rapat Kerja dengan Menteri Hukum dan HAM, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan perwakilan Kementerian Keuangan membahas UU tersebut. Dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi III DPR RI Herman Herry, seluruh Fraksi menyatakan persetujuan atas laporan Panja Komisi III dengan Pemerintah dan telah mengambil keputusan Tingkat I.

• eko/sf



Suasana Foto Bersama Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin, menyepakati pengesahan Omnibus Law RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020). Foto : Tim/Man



Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad (kiri) saat meminta persetujuan kepada para Anggota Dewan atas RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dapat disetujui untuk disahkan mejadi undang-undang di ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (1/9/2020). Foto : Tim/Man





Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI dipimpin oleh Ketua Komisi III DPR RI Herman Hery melakukan pertemuan dengan jajaran Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (29/9/2020). Foto : Ann/Man



Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh meninjau pelayanan SIMMADE (SIM Masuk Desa) yang dijalankan oleh Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), di DIY, Jumat (2/10/2020). Foto : Rizka/Man



## FOTO BERITA



Tim Kunspek Komisi X DPR RI dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi X Dede Yusuf Macan Efendi berdialog langsung dengan para pelatih dan atlet binaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bandung, di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Kamis (1/10/2020). Foto : Erman/Man



Ketua Tim Kunspek Panja SKN Komisi X DPR RI berkunjung ke Stadion Pakansari di Kabupaten Bogor, Kamis (1/10/2020). Foto : Oji/Man



Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih saat meninjau Stadion Manahan Solo, Surakarta, Jawa Tengah, Kamis (1/10/2020). Foto : Kresno/Man





Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar secara resmi melantik Inosentius Samsul sebagai Kepala Badan Keahlian (BK) DPR RI.

Foto : Oji/Man



Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar meninjau penyemprotan disinfektan di Gedung Nusantara I dan II DPR RI dalam rangka mencegah penyebaran virus Covid-19 di lingkungan DPR RI, Senin (12/10/2020).

Foto : Jaka/Man



## Emanuel Melkiades Laka Lena: Jalan Panjang Sang Pekerja

**“*Kerja keraslah bagaikan seorang hamba, agar kau makan layaknya seorang raja*”. Kata-kata ini keluar dari alm. Yohanes Gadjoo Kede, agar anak-anaknya terus bekerja keras dan tidak gampang menyerah.**

**E**manuel Melkiades Laka Lena, memang merupakan pendatang baru di parlemen periode 2019-2024. Sosok pekerja keras dan amanah ini dipercaya fraksi Partai Golkar sebagai Wakil Ketua Komisi IX DPR RI yang diantaranya membidangi kesehatan dan tenaga kerja.

Kental dengan logat Indonesia Timur, politikus Partai Golkar ini mengaku, dirinya tidak terlalu ribet jika ada persoalan menyangkut kepentingan bersama. Dengan berkelakar, ia mencocokkan sifatnya dengan tanggal lahirnya, yaitu 10 Desember 1976. Sebagaimana diketahui, 10 Desember juga diperingati sebagai hari Hak Asasi Manusia (HAM).

Anak kedua dari empat bersaudara ini merupakan alumni SDK Don Bosco 3 Kupang. Melki mengakui, sejak SD ia memang tidak terlalu suka main berkelompok. Kalaupun terpaksa berkelompok, itupun harus jelas ujung dan pangkalnya. Ini juga yang menyebabkan ia kerap dikeroyok teman-teman sebayanya.

“Zaman itu orang-orang berkelompok hanya untuk emosional *doang* kan gitu. Saya tu agak kurang cocok seperti itu.

Kalau mau berhimpun itu harus jelas tujuannya untuk apa. Bukan karena kita dekat secara emosional, harus ada hal yang memang kita lakukan di tempat itu.

Karena tidak suka berkelompok atau ikut *genk-genk-an*, Melki kerap jadi bulan-bulanan teman-temannya. Tak jarang, Melki yang sendirian dikeroyok hingga babak belur. Sejak itulah, ia memutuskan untuk berlatih karate dengan pamannya.

“Maka dari itu saya latihan karate lah di Telkom tempat Om saya. Sejak latihan karate, saya hantam juga mereka, karena di karate kita diajarin jurus-jurus. Tapi kalau dikeroyok banyak orang, ya tetap kalah juga lah. Kalau jumlahnya masih cukup dan bisa diatasi, ya menang jugalah saya. Pulang ya kadang-kadang bonyok, biasa itu,” kenangnya.

Selepas dari SD, ia melanjutkan pendidikan di SMP Seminari Pius XII, kemudian melanjutkan lagi ke Sekolah Menengah Farmasi Kupang. Selanjutnya, Melki mulai melanjutkan pendidikannya S1 di Fak. Farmasi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta serta mengambil program Profesi Apoteker di universitas yang sama.

Ada yang menarik dari jenjang pendidikan yang dilalui Melki. Sebagaimana diceritakannya,



saat kecil Melki sudah tertarik kepada dunia politik, surat kabar dan berita di televisi dengan tema politik memang sudah menjadi santapannya sedari kecil. Namun, di jenjang pendidikan, Melki lebih memilih jurusan Farmasi. Yang notabene adalah program kejurusan.

Inilah yang dikatakan Melki sebuah *kecelakaan*. Saat lulus SMP, ia sebenarnya mengidamkan SMAK Kolese Santo Yusup di Malang, Jawa Timur. Terbujuk dengan rayuan temannya, Melki memutuskan untuk melanjutkan sekolah ke SMK Farmasi di Kupang. Padahal Melki sama sekali belum pernah melihat sekolah tersebut. “Sudah kita ke Kupang saja, di sana ada Sekolah Farmasi, fasilitas olahraganya lengkap, ada basket, ada kolam renang,” kata Melki menirukan ajakan temannya.

Melki yang memang gemar berolahraga tertarik dengan rayuan temannya yang mengatakan bahwa sekolah tersebut fasilitas olahraganya lengkap. Bukan pada kejuruannya ataupun kesempatan kerja yang ditawarkan pasca lulus.

“Pas sudah masuk, saya merasa ditipu sama dia. Basket ga ada, kolam renang ga ada. Tapi sudah terlanjur masuk dan sudah ga mungkin lagi kalau ke Malang. Dia ajak saja masuk, biar saya bisa bareng sama dia. Akhirnya dia jujur ke saya dan mengatakan, ‘Di sini kan banyak cewek mel,’ ungkap Melki sembari tertawa.

Dari sekolah ini pulalah, Melki mulai belajar berorganisasi. Ia sempat menjadi ketua OSIS di SMK tersebut. Pesan dari kedua orang tua yang senantiasa diingatnya adalah seimbangkan antara studi dengan organisasi. Studi mesti bagus, sehingga kita tidak dijadikan organisasi sebagai kambing hitam atas hasil studi. “Jadi studi harus tetap bagus dan



Melki saat memimpin Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI. Foto: Mhr/MAAN

organisasi terus jalan,” ucap Melki mempertegas pesan orang tuanya.

#### AWAL TERJUN KE DUNIA POLITIK

Karir politik Melki dunia politik, diawali di Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Yogyakarta yang selanjutnya mengantarkan dirinya menjadi Sekretaris Jendral Pengurus Pusat PMKRI.

Timbul perasaan bimbang kala Melki akan menerima amanah sebagai Sekjen PMKRI Pusat. Dimana, pada saat yang bersamaan dirinya juga dinyatakan lulus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Badan Pengelolaan Obat dan Makanan (POM) RI penempatan Papua. Sebagaimana diketahui, bekerja di Badan POM merupakan impian dari setiap mahasiswa jurusan Farmasi.

Dalam kebimbangan itu, Melki sering berkonsultasi dan *sharing* dengan alm. Cosmas Batubara. kepadanya, Melki meminta diberikan pandangan untuk menguatkan pilihannya antara

menjadi politisi atau menjadi PNS Badan POM.

“Dan Pak Cosmas bilang begini ke saya. Kamu mau jadi apa Mel? Saya bilang, politisi. Kata Pak Cosmas, kalau mau jadi politisi, kamu ga bisa jadi PNS, karena ini bukan zaman orde baru. Kalau orde baru, bisa rangkap. Kamu mesti pilih Mel, pilih PNS tutup buku jadi politisi. Kalau politisi, kamu mesti ambil Sekjen PMKRI. Akhirnya saya tidak jadi ambil PNS,” ungkapnya.

Melki mungkin salah satu sekian banyak politisi yang benar-benar turun ke jalan saat melengserkan rezim orde baru. Pertama kali aksi masa yang dipimpinnya di pada tahun 1998 bersamaan dengan saat meninggalnya Moses Gatotkaca di Yogyakarta.

Saat demonstrasi, massa yang dipimpin Melki juga pernah melakukan penahanan terhadap salah satu Anggota TNI Angkatan Darat berpangkat Kolonel yang juga merupakan Anggota DPRD Yogyakarta, padahal kolonel

tersebut merapat ke barisan massa yang sedang berdemonstrasi untuk bernegosiasi. Penahanan itu berujung kemarahan dari berbagai pihak, tak terkecuali rektor kampusnya. “Jam enam sore kan setup aksi. Diserbu tentara, kita lari, kabur dan dijaga NU (Nahdlatul Ulama) kita. Seluruh kampus kami dijaga NU, dan NU tidak dikasih akses (tentara) masuk,” ujarnya.

Hal menarik lainnya saat memimpin aksi massa, Melki diharuskan untuk bolak-balik ke kampus untuk mengikuti ujian praktek kefarmasian. “Dekan cuma kasih izin untuk urusan teori saja, praktek harus tetap hadir. Pokoknya semua aktivis yang turun demo, untuk urusan teori, ada dispensasi. Tapi kalau ujian praktik harus masuk. Jadi jam satu siang saya pimpin demo, setelahnya saya pamit sama teman-teman untuk praktik. Selesai praktik, balik lagi, pimpin demo lagi,” ungkap Melki.

Pasca penahanan salah satu Anggota TNI/Anggota DPRD

oleh massa demonstrasi, Melki mengakui bahwa dirinya sempat akan diculik. Hal tersebut baru diketahuinya setelah lengsernya rezim orde baru. “Intel-intel tersebut bilang, lu harus bersyukur Pak Harto lengser, kalo ga, kita ambil juga lu,” ujarnya menirukan ucapan intel tersebut.

Dari lima puluh nama aktivis Yogyakarta yang ada dalam daftar yang akan diperiksa, nama Melki berada di urutan belasan. “Itu adalah daftar nama rahasia yang disimpan, dan baru kami ketahui sampai keadaan benar-benar kondusif,” kata Melki. Pasca suharto turun, ia benar-benar kembali ke kampus untuk menyelesaikan perkuliahannya.

Melki mulai serius menggeluti kancah perpolitikan tanah air ketika menyatakan bergabung ke Partai Golkar tahun 2005. Di partai berlambang pohon beringin itu, ia merintis betul-betul dari bawah yakni dari Pokja Partai Golkar kemudian perlahan merangkak dan mendapat tanggung jawab di departemen, hingga diamankan

menjadi pengurus harian Partai Golkar dan diberi kepercayaan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di berbagai kapasitas.

“Sebagaimana umumnya para aktivis, kalau dikasih amanah, maka kami akan coba bekerja semampu kami. Soal nanti ada yang triksi-triksi politik, itu urusan pimpinan. Saya tidak mau ribet, kerja saja semampu kita, biar pimpinan yang menilai,” tegasnya.

### MELKI DAN KELUARGA

Universitas Sanata Dharma Yogyakarta sangat bermakna bagi Melki dan keluarganya. Bagaimana tidak, selain pengalaman berorganisasi, di kampus ini jua Melki dipertemukan dengan belahan jiwanya. Adalah Mindriyati Astiningsih, sosok perempuan asli Semarang, Jawa Tengah berhasil menaklukkan kerasnya pemuda Flores.

Kala itu, Mindriyati sebagai Ketua Senat Farmasi aktif di dalam kampus sedangkan Melki



Melki dan Tim Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI berfoto bersama dengan mitra kerja saat menjalankan fungsi pengawasan. Foto: Mhu/MAN



Melki bersama keluarga tercinta. Foto: Dok/MAN

menjadi anggota senatnya yang sangat aktif dan banyak memiliki kegiatan di luar kampus. Keduanya bersepakat untuk urusan internal kampus, aktivitas kampus pada tataran akademik diurus oleh Mindriyati sedangkan Melki fokus pada urusan luar kampus.

“Kalau saya kan kesana-kemari urus-urusan politik sampai *keblinger*-lah dulu itu. pokoknya siap jiwa raga untuk mati pada zaman itu. Saya takut dia terlibat dalam aktivitas seperti itu. Makanya saya bilang, kamu di kampus saja, bahaya, jadi kalau ada apa-apa, cukup saya saja yang

nanggung resiko,” tuturnya.

“Kami pacaran saat itu rada-rada unik, cuma liat-liatan selama lima menit karena dia di lantai 2 dan saya di lantai 1. Yang penting kodenya tertangkaplah,” kenangnya.

Saat ini, Mindriyati lebih menyibukkan dirinya dengan aktivitas sosial, hanya sesekali saja terlibat dalam urusan partai. Melki pun banyak terbantu dengan aktivitas sosial yang digalang istrinya. Pernah suatu ketika ada bakti sosial yang akan dilaksanakan di NTT, Mindriyati adalah orang yang paling sibuk. Mindriyati pulalah yang merencanakan dan membuat jadwal kegiatan baksos tersebut. Hal yang demikian sangatlah disyukuri Melki. “Kita bersyukur dapat istri yang seperti itu. Carilah istri yang tepat biar kita juga terbantu. Istri dunia akhirat. Demikian pula yang perempuan, carilah suami yang tepat dunia akhirat,” pesan Melki.

Pada tahun 2014 lalu, Melki dan Mindriyati dikaruniai anak semata wayang yang diberi nama Michelle Pininta Rivera Laka Lena, yang beberapa waktu lalu baru saja masuk sekolah dasar. Melki menceritakan bagaimana anaknya mengkritisi kesibukannya sebagai anggota parlemen.

“Anak saya ini ampun deh. Kita pusing juga dengan anak-anak milenial saat ini. Omongannya kritis. Dia pasti ngejar saya terus, Pakbro pulang jam berapa? karena dia manggil saya Pakbro. Pakbro ini lebih mentingin pekerjaan daripada Michelle. Saya cuma bisa bilang siap salah,” urainya.

Diakui Melki, dirinya merupakan sosok yang betah di rumah, suka makanan masakah rumah, dan merasa damai dengan suasana di rumah. Namun, pekerjaanlah yang menyebabkannya banyak kesibukan di luar rumah.

## BANGUN GENERASI YANG PARIPURNA

Cita-cita Melki di dunia politik sangat mulia. Dimana ia menginginkan munculnya generasi yang terdiri dari pemuda dan juga kaum perempuan yang paripurna untuk melanjutkan estafet dan berkontribusi bagi bangsa dan Negara.

“Saya punya mimpi kedepan ada anak-anak muda binaan saya itu mereka bisa tampil jadi pemimpin yang paripurna. Otaknya bagus, karakter yang kita harapkan juga bagus, memiliki keterampilan teknis sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi pengusaha, pemikir, akademisi, aktivis, pertanian, pokonya yang fokus dan menjalani itu semua dengan benar, karakternya bagus juga rendah hati,” terang Melki.

“Inilah mimpi yang sedang saya kerjakan di NTT. Mudah-mudahan regenerasi dari yang senior ke yang muda dan perempuan ini bisa berjalan,” harap Melki.

Upaya Melki menyiapkan generasi muda yang paripurna sedikit banyak terinspirasi dari tokoh inspirasinya yaitu Bung Karno. Dimana ada Presiden Pertama Republik Indonesia itu pernah berujar, ‘Berikan aku sepuluh pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia’. “Dari kecil saya suka baca-baca tentang Bung Karno,” kata Melki.

Menurutnya, Bung Karno dengan segala plus minusnya merupakan sosok politikus sejati. Melki tertarik bukan hanya pada pemikiran Bung Karno saja, melainkan juga dari praktik politik yang dijalankan Bung Karno. “Diantara plus minusnya itu, Bung Karno adalah yang paling idealis. Tentu ada banyak juga kekurangannya tapi saya tidak mau peduli, sebagai seorang panutan politik, saya rasa dia paling sempurna,” tutup Melki.

• es



Tim Kunspek Komisi III DPR RI saat pertemuan dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur di Surabaya. Foto: Eko/MAN

# Komisi III akan Bedah Sejumlah Kasus Impor Ilegal

Komisi III DPR RI memberi perhatian khusus pada persoalan yang dipengaruhi oleh lingkungan strategis global yakni krisis ekonomi dan pemanfaatan potensi sumber daya yang tidak terdistribusi secara merata.

**K**etidakpatuhan pada hukum yang berlaku akan berdampak pada kerugian negara di berbagai sektor. Oleh sebab itu, Komisi III menelaah persoalan penegakan hukum di berbagai bidang yang mengakibatkan terjadinya kebocoran terhadap penerimaan negara. Penyimpangan terhadap aturan yang berlaku dan penyelewengan kewenangan membuat penerimaan negara tidak mampu dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir mengungkapkan telah mendapat banyak masukan atas kasus ini. Salah satunya terkait kejadian penyelundupan tekstil di

Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, tak hanya itu ada dugaan barang lain yang masuk ke Indonesia, seperti bawang, mobil mewah hingga barang elektronik yang tidak sesuai prosedur.

“Kita tidak akan berhenti, ini pintu masuknya di sini, kami mendapatkan banyak masukan terkait kebocoran hal ini,” tandas Adies usai rapat dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, di Surabaya, awal September 2020.

Atas maraknya masalah tersebut, Komisi III berencana membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengawal penyidikan kasus penyelundupan tekstil di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Adies Kadir mengatakan pansus ini akan menggandeng komisi lain di DPR

RI untuk meminimalisir terjadinya kebocoran devisa negara dari kasus penyelundupan tekstil. Menurut politisi Fraksi Golkar ini, sepulang dari kunjungan kerja spesifik, Komisi III akan langsung membahas pembentukan Pansus.

Kasus tersebut bermula dari dugaan penyimpangan 69 kontainer tekstil melalui Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya yang dilakukan oleh PT Anugerah Citra Cendana sebagai pengimpor (pada 3 Agustus 2020). Dugaan terjadi terhadap tujuh kontainer milik PT Anugerah yang masuk ke Pelabuhan pada 29 Juni 2020, 28 kontainer yang berisi kain berbahan polyester dan woven sebulan kemudian, dan terakhir 45 unit.

Kasus ini selanjutnya ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Kejaksaan menduga surat keterangan asal kontainer ini bermasalah atau diduga pengimpor menghindari kutipan bea masuk (bea safeguard). Kejaksaan kemudian telah menyegel semua kontainer yang diduga terdapat kegagalan, karena pengimpor selalu mendatangkan kontainer berisi bahan baku tekstil lewat Pelabuhan Tanjung Perak.

Perkara ini menjadi perhatian serius Komisi III, oleh sebab itu langkah penelusuran atas perkara impor tekstil yang tak sesuai dengan Peraturan Menteri

(Permen), di mana Bea dan Cukai Tanjung Perak diduga selalu memberi jalur hijau. Sehingga pengimporan tidak menjalani pemeriksaan fisik seperti pemindaian kontainer. Pengimpor diduga memanfaatkan fasilitas ini untuk melakukan impor ilegal. Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond Junaidi Mahesa mendorong Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur untuk mengusut penyelundupan yang terjadi di Bea Cukai Jatim.

Dalam kesempatan rapat yang digelar di Kejati Jatim dengan melibatkan pihak Bea Cukai dan Importir, Desmond beranggapan, pembuktian terhadap kecurigaan pada Bea Cukai sangat penting, Kejati melihat ada sesuatu yang aneh di kelembagaan Bea Cukai, maka dilakukanlah proses penyidikan.

“Kita terima kasih juga kepada Kejaksaan Tinggi menjalankan fungsinya dengan benar untuk melakukan langkah-langkah hukum yang objektif terhadap perkara penyelundupan yang terjadi di Bea Cukai Jawa Timur,” papar Desmond.

Desmond memastikan, Komisi III DPR RI selalu mengevaluasi secara menyeluruh terhadap proses penegakan hukum di Indonesia sebagai upaya melakukan reformasi, khususnya terhadap lembaga-lembaga penegak hukum yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dengan demikian masyarakat dapat merasakan dan mengawasi secara langsung kehadiran penegak hukum yang bersih dan berwibawa.

Sesuai dengan Pasal 10 Permendag Nomor 64 Tahun 2015 tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil menyebutkan impor tekstil harus dimasukkan ke pelabuhan terdekat dari lokasi industri yakni seharusnya adalah Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.



Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond Junaidi Mahesa. Foto: Eko/AN

### PERKETAT SCREENING MASUK WNA

Saat ini berbagai negara di belahan dunia menghadapi tantangan Covid-19, oleh sebab itu arus keluar masuk warga negara asing (WNA) perlu diperketat. Kebijakan yang mengatur perlintasan WNA ke Indonesia perlu dievaluasi secara reguler, secara berkala untuk mengantisipasi pergerakan Covid-19 dari berbagai negara yang ada di dunia. Anggota Komisi III DPR RI Eva Yuliana meminta Kantor Imigrasi Kelas I Semarang, Jawa Tengah, untuk terus berpedoman pada asas kehati-hatian dalam pengetatan lalu lintas warga negara asing (WNA) yang hendak keluar-masuk wilayah Indonesia.

Dia juga menegaskan agar pihak keimigrasian wajib konsisten menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran

Covid-19. Selain itu yang juga telah menjadi peraturan yakni, meninjau ulang dokumen kelengkapan yang harus dipenuhi WNA, khususnya yang berstatus Tenaga Kerja Asing (TKA). Hal itu dipaparkan Eva usai mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI (Tempat Pemeriksaan Imigrasi) Semarang, Jateng, pertengahan September 2020.

“Setiap WNA yang masuk ke Indonesia wajib melalui tahap screening yang sangat ketat. Serta, dicek lagi kelengkapan yang harus dipenuhi oleh TKA. Saya minta, pihak keimigrasian Jateng untuk seketat-ketatnya menerapkan aturan yang harus dilengkapi oleh WNA atau TKA baik dokumen maupun aspek kesehatan bebas Covid-19,” ujar politisi F-NasDem tersebut. ●eko,pun/es



Anggota Komisi III DPR RI Eva Yuliana. Foto: Puntho/AN

# Gali Masukan RUU Pemilu dari Akademisi Untirta

Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu Komisi II DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arif Wibowo berkunjung ke Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) untuk menyerap masukan dari akademisi Untirta untuk memperkaya materi muatan yang sebagai penyempurna RUU Pemilu.

teknologi hingga daerah terpencil, rekapitulasi elektroniknya serta kesiapan masyarakat yang akan menerapkan *e-voting*.

“Ide bagus tentang bagaimana *e-voting* dijalankan walaupun tentu kita juga sudah mengkajinya bagaimana *e-voting* ini bisa diterapkan agar kita sepakati rekapitulasi elektroniknya. Tapi *e-voting*, karena masyarakat kita guyub, suka dengan kumpul, mungkin masih perlu kita pertimbangkan ulang,” ujar Mardani.

Mardani memaparkan beberapa hambatan teknis jika itu akan

“U U Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sudah cukup panjang perjalanannya. Kita diingatkan oleh akademisi Untirta tentang bagaimana penyusunan UU yang sesuai dengan UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, legal *drafting*-nya harus cermat betul baik dari judul, isi dan selanjutnya,” ujar Arif di Untirta, Serang, Banten, baru-baru ini.

Dalam pertemuan tersebut, lanjut Arif, pihaknya mendapat masukan mengenai panitia rekrutmen dan seleksi anggota KPU, Bawaslu, DKPP dan seterusnya agar lebih diperhatikan dan juga mengenai penyelesaian sengketa Pemilu dari berbagai perspektif.

“Materi yang sifatnya teknis seperti panitia rekrutmen dan seleksi anggota KPU, Bawaslu, DKPP agar lebih diperhatikan guna menjamin kelembagaan penyelenggaraan yang lebih baik, lebih kuat, lebih demokratis. Juga menyangkut penyelesaian sengketa Pemilu dari berbagai



Tim Kunspek Komisi II DPR RI Foto Bersama dengan Akademisi Untirta Serang, Banten. Foto: Kresno/MAN

perspektif, apakah itu sengketa administrasi, sengketa antar lembaga penyelenggara maupun sengketa pemilihan,” ujar Arif.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera mengatakan, ide penerapan *e-voting* dalam penyelenggaraan Pemilu tampaknya perlu dikaji lebih dalam. Terutama terkait kesiapan

diterapkan, seperti jaringan yang sulit menjangkau tempat-tempat terpencil dan ada juga hambatan kultural seperti masyarakat yang belum terbiasa dengan sikap demokrat. Dengan begitu, ketika *e-voting* ini diterapkan, peluang gugatan masyarakat yang tidak menerima kekalahan akan menjadi besar. ● es

# Apresiasi Pemanfaatan Limbah Pasar Menjadi Pupuk Organik

Dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan yang melekat pada DPR RI, baru-baru ini Komisi IV DPR RI mengunjungi pabrik pengolahan limbah PT Bio Konversi Indonesia, Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat.

**D**alam kunjungan tersebut, Wakil ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi mengapresiasi pemanfaatan limbah atau sampah pasar menjadi pupuk organik yang berguna untuk tanaman pertanian yang dilakukan oleh PT Bio konversi Indonesia.

“Selama ini limbah organik dan non organik belum optimal dimanfaatkan. Dan kebetulan

ada industri (walaupun saya lihat skalanya masih kecil), mampu memanfaatkan seluruh limbah. Tadi kami lihat bersama, limbah yang digunakan merupakan limbah pasar. Dan ini menurut saya sangat baik untuk pertumbuhan ekonomi, yang diawali dengan pertumbuhan ekosistem,” ujar Dedi.

Pemanfaatan sampah pasar ini, lanjut Dedi, tidak hanya berguna

untuk kesehatan lingkungan sekitar, namun juga bermanfaat untuk pertanian. Bahkan tidak hanya itu pupuk organik ini selain harganya lebih terjangkau oleh petani, juga sebagai salah satu solusi untuk mengatasi ketergantungan petani kita terhadap pupuk kimiawi, yang notabene menggunakan bahan baku impor.

Diakuinya, saat ini pengembangan usaha pertanian di Indonesia masih mengandalkan penggunaan pupuk kimia yang memberikan hasil panen tinggi, namun menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.

Dengan kata lain Penggunaan pupuk kimia masih menjadi primadona. Tetapi dengan adanya kondisi carut marut pasokan pupuk Nasional serta penggunaan pupuk yang tidak berimbang dan terus menerus tanpa memperhatikan kaidah-kaidah konservasi tanah dan air, mengakibatkan tingkat kesuburan tanah menurun, merusak lahan pertanian, serta mencemari lingkungan hidup.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 memberikan acuan tentang Pengelolaan Sampah. Cara efektif dalam mengurangi jumlah timbunan sampah dari sumbernya yaitu dengan memanfaatkan kembali sampah organik menjadi kompos.

Tidak berlebihan jika kemudian Dedi yang didampingi oleh beberapa anggota Komisi IV DPR RI lainnya seperti Guntur Sasono, alien Mus, Slamet, Vita Ervina, Emma Umiyatul chusna, Abdullah Tuasikal, T.A Khalid, dan Mutarom berharap kedepan akan dapat muncul pabrik-pabrik sejenis di seluruh Indonesia, yang bisa mengolah limbah atau sampah pasar menjadi pupuk organik yang bermanfaat bagi pertanian. ● ayu/es



Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedy Mulyadi saat mengunjungi pabrik pengolahan limbah PT Bio Konversi Indonesia di Bekasi. Foto : Ayu/MAH

# Komisi V Tinjau Pembangunan Infrastruktur di Daerah

Komisi V melakukan pengawasan di bidang infrastruktur dengan menurunkan tim kunjungan spesifik ke tiga Provinsi yaitu Banten, Jawa Barat, Jawa Timur. Kunjungan ini untuk melihat sejumlah pembangunan yang sudah terealisasi dan yang sedang dalam perencanaan.

**K**omisi V DPR RI mendorong penuh pembangunan *fly over* Sudirman di Kota Serang, Provinsi Banten, seperti yang diusulkan Pemerintah Provinsi Banten. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae mengatakan, pembangunan *fly over* tersebut untuk kepentingan masyarakat luas, sehingga harus terealisasi di tahun 2022.

Ridwan menambahkan, alasan pembangunan *fly over* harus segera dilakukan, mengingat jumlah kendaraan yang melintas di Jalan Sudirman sangat padat, sementara terdapat perlintasan

kereta api di jalan tersebut. Sehingga keberadaan *fly over* yang memisahkan arus kendaraan itu diharapkan tidak membahayakan nyawa masyarakat.

“Saya melihat usulan yang disampaikan begitu progresif. Negara harus hadir untuk menangani persoalan-persoalan yang berdampak membahayakan masyarakat, satu nyawa manusia sangat berarti. Jangan sampai sudah ada yang celaka baru kita memulai pembangunan,” tegas Ridwan usai pertemuan dengan Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy, di Serang, pertengahan September lalu.

## TINJAU PEMBANGUNAN PASAR LEGI PONOROGO

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sedang melaksanakan proyek pembangunan pasar tradisional modern terbesar di Indonesia yaitu Pasar Legi di Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur (Jatim). Proyek Pemerintah senilai Rp 133 miliar ini dilaksanakan oleh PT. Adi Persada Gedung, adapun progres pengerjaannya saat ini sudah mencapai 50 persen.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Nurhayati menilai, progres pembangunan Pasar Legi berlangsung baik. Hal ini terlihat dari kualitas bangunan dan instalasi airnya sudah memenuhi syarat jika nantinya mulai dioperasikan. “Ini rencananya akan jadi pasar tradisional modern terbesar di Indonesia. Pasar dengan empat lantai ini cukup fenomenal di Ponorogo,” ujar Nurhayati di Ponorogo, Jawa Timur.

Politisi Fraksi PPP ini berharap pasar tersebut bisa bermanfaat untuk masyarakat Ponorogo. Para pedagang yang terdampak oleh terbakarnya Pasar Songolangit juga diharapkan bisa ditampung di Pasar Legi ini, mengingat satu lantainya bisa menampung sekitar



Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae saat memimpin Tim Kunspek meninjau Bendungan Sindang Heula, Serang, Banten. Foto: Runi/MAN



Wakil Ketua Komisi V DPR RI Nurhayati saat meninjau pembangunan Pasar Legi, Ponorogo, Jawa Timur. Foto: Eno/MAN

400 pedagang. “Semoga jika sudah jadi nantinya bisa menampung para pedagang, dan pesan kami dijaga kebersihannya,” ujar Nurhayati.

Sementara itu Project Manager PT Adi Persada Gedung (PT. APG) Agung Dwi Mulyana menjelaskan pembangunan secara fisik rencananya akan selesai pada bulan Desember nanti. Namun, jika sudah selesai membutuhkan waktu dua bulan, yakni sekitar bulan Februari 2021 untuk bisa dioperasikan.

Agung menyebut selama pembangunan Pasar Legi ini tidak menemui kendala yang berarti. Permasalahan dalam proyek pembangunan ada, tetapi secara teknis bisa diselesaikan. “Semoga pembangunan lancar sampai Desember, sehingga 100 persen selesai fisiknya tanpa kendala yang berarti,” pungkasnya.

### PERCEPAT PEMBANGUNAN TOL CISUMDAWU

Komisi V DPR RI meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) beserta jajaran terkait untuk segera menyelesaikan proses pembangunan Tol Cisumdawu (Cileunyi - Sumedang - Dawuan) yang menghubungkan Kota Bandung dengan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Kertajati, Majalengka. Proses pembangunan tersebut apabila dipercepat diyakini akan

mampu mempercepat juga mobilitas yang ada di BJB.

“Pada prinsipnya Komisi V memberikan dukungan penuh atas Bandara Internasional Jawa Barat di Kertajati ini agar dapat berfungsi secara optimal dan bisa memberikan manfaat bagi masyarakat di Jawa Barat,” ujar Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan di Majalengka, Jawa Barat.

Untuk optimalisasi BIJB tersebut, Komisi V DPR RI memberikan perhatian pada aksesibilitas bandara dengan mendesak percepatan jalan tol agar jarak tempuh dari Bandung bisa dicapai dengan waktu 90 menit.

“Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah infrastruktur akses jalan dari dan menuju Bandung menuju Kertajati ini untuk dipercepat pembangunannya. Komisi V akan meminta pemerintah

provinsi dan kabupaten serta pemerintah pusat untuk dapat segera menyelesaikan proses pembebasan lahannya dengan baik,” tegas Andi Iwan.

Politisi Partai Gerindra ini juga menyebut sejumlah wilayah yang akan dijadikan jalan tol ini berkaitan dengan wilayah hutan, sehingga perlu ada koordinasi antara Kementerian PUPR dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

“Karena ada beberapa wilayah yang berkaitan dengan perhutanan sehingga kita akan melakukan koordinasi dengan Menteri LHK sehingga ada sinergi yang baik dan diselesaikan,” ujarnya.

Legislator asal daerah pemilihan (dapil) Sulawesi Selatan ini juga menyebut bahwa kendala anggaran tidak menjadi persoalan dalam pembangunan tol Cisumdawu ini, karena pemerintah pusat sendiri telah mengintervensi pembebasan lahan ini melalui APBN, tinggal bagaimana pemerintah mampu mensosialisasikan pembebasan lahan ini dengan cara yang baik.

Untuk mewujudkan pembangunan tersebut memerlukan kerja sama yang baik antara kementerian, namun dari sisi dukungan politik, Komisi V DPR RI akan mendukung percepatan pembangunan tol Cisumdawu yang menghubungkan BIJB dengan Kota Bandung tersebut. ● rmi,eno,hs/es



Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke BIJB di Kertajati, Majalengka, Jawa Barat. Foto: Hendra/MAN



Tim Kunspek Komisi VII DPR RI foto bersama di PT Pertamina Refinery Unit (RU) IV Cilacap, Jawa Tengah. Foto: Oji/AMAN

# Komisi VII Tinjau Kilang Minyak, PLTU dan Museum

Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto menerima aspirasi terkait Peraturan Menteri (Permen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 42 Tahun 2018 tentang Prioritas Pemanfaatan Minyak Bumi Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri. Pada Pasal 2 aturan ini dinyatakan, PT Pertamina (Persero) dan Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Pengolahan Minyak Bumi wajib mengutamakan pasokan minyak bumi yang berasal dari dalam negeri.

**P**olitisi Partai NasDem ini menambahkan bahwa aspirasi dari Direksi PT. Pertamina Refinery Unit (RU) IV Cilacap beserta jajarannya ini akan dibahas di rapat kerja Komisi VII DPR RI dengan kementerian terkait untuk memperoleh solusi yang terbaik dan tepat. “Kami kebetulan ada Panja Migas yang nantinya akan membawa persoalan ini. Intinya bagaimana negara tetap memperoleh pemasukan dari *crude oil*. Namun Pertamina juga tetap bisa untung dan rakyat terpenuhi kebutuhan BBM dengan harga terjangkau dan mudah

mendapatkannya,” imbuhnya.

Sugeng juga mendorong komitmen Pertamina pada energi yang bersih dan berkelanjutan. Disinilah (kilang minyak Cilacap) diproduksi BBM dengan *Research Octane Number* (RON) tinggi. Perlahan RON rendah akan dikurangi, mengingat hanya tinggal 7 negara saja yang masih memakai BBM dengan RON rendah yaitu di bawah 91. “Kita sudah masuk di RON 92 ke atas sehingga lingkungan hidup kita menjadi lebih bersih bagi anak cucu kita kelak,” ungkapnya.

Sementara itu, Direktur Operasional RU IV Cilacap Djoko Priyono mengakui, pihaknya

terkendala Permen ESDM No. 42 Tahun 2018 ketika harga *crude oil* dunia anjlok, sementara Pertamina tetap harus membeli *crude oil* dalam negeri yang harganya lebih mahal.

## PLTU CIREBON POWER TINGKATKAN RASIO ELEKTRIFIKASI

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Ramson Siagian memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI memantau perkembangan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Unit II PT. Cirebon Electric Power yang sedang berjalan dengan progres pembangunan PLTU mencapai 85 persen dari target yang ditentukan.

“Komisi VII DPR RI mendesak PLTU Cirebon Power berupaya menemukan teknologi baru untuk mengurangi dampak lingkungan hidup, mengedepankan kepentingan masyarakat di sekitarnya. Terkait masalah pemasangan tower di daerah tertentu, agar dengan segera bisa diselesaikan secara bersama-sama,” tambah Ramson.

Menurut Politisi Partai Gerindra ini, Indonesia masih menggunakan 56 persen energi primer yang berasal dari batu bara, karena memiliki *cost* terendah per-kwh-nya. Sehingga pembangunan PLTU 35.000 Megawatt masih berlanjut dalam program Pemerintah. Komisi VII juga mengapresiasi PLTU Unit II Cirebon yang memperkerjakan 5000 pekerja, 3500 orang diantaranya berasal dari daerah sekitar. Hal ini sangat membantu menaikkan perekonomian masyarakat di Cirebon.

Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti Widya Putri sangat mendukung pembangunan PLTU Unit II PT. Cirebon Electric Power yang sedang berjalan dan berharap besar akan berdampak positif terhadap masyarakat sekitar. Sudah waktunya *sustainability energy* (energi keberlanjutan) didorong, dalam arti Negara Indonesia bisa berkembang tanpa melupakan aspek lingkungan hidupnya.

#### MUSEUM GEOLOGI BANDUNG SARANA PENDIDIKAN SEJARAH

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno menilai Museum Geologi Bandung menjadi salah satu museum yang paling tinggi pengunjungnya di Indonesia, yakni



Tim Kunspek Komisi VII DPR RI foto bersama saat melakukan kunjungan spesifik ke Cirebon, Jawa Barat. Foto: Chasbi/MAN

rata-rata satu juta pengunjung per tahunnya. Museum ini menjadi sarana pendidikan yang sangat baik tidak hanya untuk anak-anak, tetapi juga untuk mahasiswa dan pelajar, serta bagi pihak-pihak yang masih punya keinginan untuk belajar.

“Kita juga bisa mengetahui betapa kaya sejarahnya Indonesia dan juga di sini kita bisa mengetahui betapa kompleksnya kita untuk menemukan rangkaian sejarah kita, mulai dari sejarah manusia, sejarah pembentukan batu dan lain-lain,” ungkap Eddy saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI meninjau Museum Geologi Bandung, di Bandung, Jawa Barat.

Lebih lanjut, Eddy menyampaikan bahwa kehadiran museum tersebut sangat penting, agar setiap pengunjungnya mengetahui runtutan sejarah, misalnya guna pengembangan *geothermal*,

pengeboran minyak, penemuan batu bara dan lain-lain. “(Museum) Ini saya kira memberikan masukan dan memberikan perluasan pandangan bagi kita semua dan sangat bermanfaat bagi seluruh anggota Komisi VII DPR RI,” tegas Eddy.

“Saya kira selama ini temuan-temuan geologi sudah tercatat dengan baik, terkelola dengan baik dan saya memberikan apresiasi kepada Kepala Museum Geologi yang telah mengorganisir dan mengelola museumnya dengan baik. Kita berharap setelah pandemi nanti, museum ini kembali ramai dikunjungi,” harap politisi Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) ini.

Sebelumnya Eddy menjelaskan, kunjungan Komisi VII DPR RI ke Museum Geologi Bandung ini dalam rangka fungsi pengawasan, khususnya guna memperoleh informasi tentang koleksi, program kegiatan, dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi Museum Geologi Bandung dalam pelaksanaan fungsinya.

“Dengan adanya kondisi geografis dan geologis Wilayah Indonesia yang berada dalam jalur cincin api pasifik (*Pacific Ring of Fire*) dan terletak diantara 3 lempeng aktif yang berinteraksi, yaitu Lempeng Eurasia, Lempeng Pasifik, dan Lempeng Indo-Australia, maka peran Badan Geologi Kementerian ESDM RI menjadi sangat vital dalam pengelolaan sumber daya geologi dan mitigasi kebencanaan di Indonesia,” tutur Eddy. ● oji,chas,skr/es



Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno saat meninjau Museum Geologi Bandung. Foto: Singih/MAN

# Maksimalkan Pengawasan Sektor Ekonomi dan Keuangan

Dalam rangka memantau secara langsung kinerja para *stakeholder* sektor keuangan dalam masa pandemi Covid-19, Komisi XI DPR RI melakukan beberapa kunjungan ke daerah dengan tujuan mencari permasalahan dan kesulitan, serta progres yang dihadapi mitra kerjanya ketika harus melanjutkan aktivitas kerja di saat pandemi.

**T**erbitnya Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) Perekonomian Nomor 6 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Permenko Nomor 8 Tahun 2020, telah memberikan perlakuan khusus bagi debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR). Hal ini kemudian yang mendasari salah satu keberangkatan Tim Anggota Dewan Komisi XI DPR RI mengunjungi Jawa Tengah guna meninjau implementasi Permenko tersebut.

Perlakuan khusus yang diterima

debitur KUR tersebut antara lain berupa pemberian tambahan subsidi bunga enam persen untuk tiga bulan pertama dan tiga persen untuk di tiga bulan kedua sejak April 2020.

“Sampai dengan 14 September 2020, di Jawa Tengah telah disalurkan tambahan subsidi KUR senilai Rp 242.827.828.136 kepada 1.035.317 debitur. Penyaluran subsidi bunga KUR di Jawa Tengah ini menduduki urutan pertama secara nasional,” ucap Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto saat konferensi pers usai pertemuan

Tim Kunspek Komisi XI DPR RI Komisioner OJK, Kemenkeu, BI dan Himbara di Semarang, Jawa Tengah, pertengahan September lalu.

Dito berharap KUR yang tetap tersalurkan atau terserap debitur ini menjadi pertanda bahwa geliat ekonomi terutama Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (UMKM) di masa pandemi ini tetap bertahan dan pulih ke depannya.

Politisi Partai Golkar ini berharap sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sangat diperlukan agar program-program di bidang kesehatan, jaring pengaman sosial dan ekonomi dapat tersalurkan dengan cepat dan tepat sasaran. Termasuk implementasi program KUR yang bertujuan untuk membangkitkan kembali aktivitas UMKM secara berkelanjutan dan momentum perbaikan perekonomian tercipta.



Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto menyerahkan cinderamata kepada mitra kerja di Jawa Tengah. Foto: Erman/MAN

## GAGALKAN PENYELUNDUPAN

Sementara itu dalam kunjungan lainnya di hari yang sama, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Eriko Sotarduga memberikan apresiasi atas kinerja Bea dan Cukai yang telah menjalankan tugas dan semua fungsinya dengan baik. Dengan pengawasan yang dilakukan di tengah pandemi Covid-19, Bea dan Cukai Tipe C Bandara Soekarno-Hatta telah berhasil menggagalkan penyelundupan 315 colly benih lobster dan 2.092 gram narkotika jenis sabu-sabu.

Hal tersebut disampaikan Eriko dalam Konferensi Pers antara Tim Komisi XI DPR RI bersama Bea dan Cukai Tipe C Bandara Soekarno-Hatta beserta Tim Gabungan dan Bareskrim Polri di Gedung Kantor Pelayanan Umum (KPU) Bea Cukai Bandara Soetta, Tangerang, Banten. Eriko menilai di tengah pandemi seperti ini kinerja pengawasan memang harus diperketat.

“Pandemi tidak boleh membuat Bea Cukai menjadi lengah, tetapi tetap mengencangkan ikat pinggang untuk menekan pelanggaran dan kegiatan menyimpang yang dapat mempengaruhi kehidupan bangsa serta mengakibatkan

kebocoran penerimaan negara. Kami mengapresiasi kinerja Tim Gabungan beserta Bareskrim Polri dalam komitmen memberantas penyelundupan,” terang Eriko.

Eriko pun meminta agar ke depan Bea dan Cukai turut menggandeng peran aktif masyarakat dalam upaya pencegahan. “Upaya dalam pemberantasan ini tidak akan bisa maksimal tanpa peran aktif masyarakat. Komisi XI DPR RI akan senantiasa mendukung kinerja Bea Cukai dalam rangka mencapai penerimaan negara dan pengawasan dari masuknya barang ilegal,” tutur politisi Fraksi PDI-Perjuangan tersebut.

## SOROTI KINERJA PERURI

Selanjutnya pada tim kunjungan Komisi XI ke Karawang menyoroti sejumlah hal terkait kinerja Perusahaan Umum Percetakan Uang Indonesia (Perum Peruri). Ketika diwawancara, Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menjelaskan bahwa bisnis utama Peruri adalah mencetak uang atas permintaan Bank Indonesia. Hal ini mengakibatkan kinerja Peruri yang fluktuatif. Kontribusi bisnis pencetakan uang di Peruri sekitar 60-70 persen di banding bisnis lain.



Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati. Foto: ARI/AMAN

Anis menambahkan, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Peruri, khususnya pengaturan penugasan, disebutkan bahwa Pemerintah dapat memberikan penugasan lain kepada perusahaan dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perusahaan.

“PP ini menjadi dasar hukum pengembangan usaha Peruri ke produk digital yang sedang digalakkan pada saat ini. Tercatat Peruri memiliki tiga produk digital yaitu Peruri Code, Peruri Sign dan Peruri Trust. Di era digital sekarang ini, produk digital memang harus lebih diperkuat,” kata Anis.

Pengembangan ke produk digital ini menurut Anis, perlu diselaraskan dengan kesiapan SDM. Saat ini, ketersediaan SDM di bidang *digital business* dan ICT hanya sebanyak 54 orang. Selebihnya, SDM di sektor bisnis utama uang RI sebanyak 1477 orang, SDM di sektor bisnis utama produk non uang sebanyak 587 orang, dan SDM untuk *production support* sebanyak 125 orang. “Jika Peruri akan memperluas produk digital, sebaiknya Peruri merubah komposisi struktur ini” imbuhnya.

• es,alw,er/es



Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Eriko Sotarduga bersama mitra kerja memperlihatkan bayi lobster yang berhasil diamankan dari penyelundupan. Foto: Erlangga/MAN

# Pelayanan Jamkestama Harus Paripurna

Selaku operator Jaminan Kesehatan Utama (Jamkestama), PT Asuransi Jasindo harus menjamin rumah sakit provider untuk memberikan pelayanan yang paripurna terhadap Anggota DPR RI beserta keluarganya.

unggulan seperti *eye center*, akupunktur, kanker, jantung dan syaraf, radiologi, laboratorium serta inovasi-inovasi lainnya sudah sangat luar biasa.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota BURT Gatot Sudjito menekankan pentingnya bagi Jasindo melakukan *update* data peserta Jamkestama, tak terkecuali keluarga yang ada di daerah pemilihan. Agar tetap



Ketua BURT DPR RI Agung Budi Santoso menyerahkan cendera mata kepada pihak PT Jasindo Bandung. Foto: Erman/MAN

**D**itemui usai memimpin pertemuan tim kunjungan kerja Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI dengan jajaran direksi Rumah Sakit (RS) Santosa, Bandung, Ketua BURT Agung Budi Santoso menyampaikan, RS Santosa merupakan rumah sakit swasta yang terakreditasi A dan sudah lolos dalam sertifikasi Amerika.

“Kalau kita lihat ,RS Santosa ini sudah luar biasa. Sebagai rumah sakit swasta satu-satunya yang terakreditasi A, dan juga lolos dalam sertifikasi Amerika. Ini luar

biasa untuk rumah sakit swasta. Kalau yang tidak swasta (RS Pemerintah) sudah cukup banyak. Inilah yg menjadi poin dari RS Santosa ini. Artinya bahwa, RS ini sudah bisa memberikan pelayanan paripurna untuk para Anggota DPR dan keluarganya,” ungkap Agung, di Kantor PT Jasindo, Bandung, Jawa Barat, baru-baru ini.

Agung juga mengapresiasi pihak Jasindo yang menetapkan RS Santosa sebagai provider Jamkestama sudah sangat tepat. Dari paparan yang disampaikan pihak RS Santosa, Agung berkesimpulan bahwa pelayanan

mendapatkan haknya yaitu pelayanan yang maksimal dari RS provider, karena tidak semua anggota keluarga dari wakil rakyat itu tinggal di Jakarta.

“Misalkan saya, di dapil Jawa Timur VII ini, manakala ada suatu hal menyangkut istri dan anak saya sakit, maka rujukannya ini jangan sampai RS Provider dari Jasindo ini tidak ada data tentang keluarga, sehingga membuat pelayanan tidak memadai. Tentu saja ini mengganggu konsentrasi kinerja dewan manakala Anggota Dewan-nya di sini, dan anaknya sakit (di dapil) tidak diberikan



Wakil Ketua BURT DPR RI Achmad Dimiyati Natakusumah meninjau ruang perawatan bagi peserta Jamkestama di RS Siloam Karawaci. Foto: Dewi/AMAN

pelayanan yang baik,” terang Gatot.

Hal senada juga diungkapkan Anggota BURT DPR RI Paramitha Widya Kusuma. Ia menilai kecepatan dalam melakukan *updating* data harus ditingkatkan baik itu oleh pihak rumah sakit juga PT Asuransi Jasindo. Jangan sampai ditemukan nama Anggota DPR RI beserta keluarganya tidak tercantum dalam *database* rumah sakit provider.

“Perlu peningkatan kualitas *updating* data. Karena saat ini harusnya sudah menggunakan sistem *online*. Dimanapun rumah sakitnya, harusnya ada data dari Anggota DPR RI ditambah keluarga dari Anggota DPR RI tersebut. Kita juga menekankan kepada Jasindo untuk memberikan kualitas yang prima terhadap Anggota DPR RI,” ungkapnya.

Sementara itu, Direktur Rumah Sakit Santosa dr. Tammy J Siarif mengungkapkan, suatu kehormatan bagi pihak RS Santosa dikunjungi oleh BURT DPR RI. Seyogyanya, kunjungan ini dilaksanakan di RS Santosa guna melihat langsung fasilitas dan pelayanan yang dimiliki.

“Merupakan suatu kehormatan bagi kami dikunjungi oleh BURT, kami sudah bekerja sama dengan PT Jasindo dan siap melayani Anggota DPR serta keluarganya,” ungkapnya.

#### FASILITAS PENANGANAN KESEHATAN RS SILOAM TERDEPAN

Di tempat terpisah, Wakil Ketua BURT DPR RI Achmad Dimiyati Natakusumah yang memimpin tim kunjungannya ke RS Siloam Karawaci, Tangerang, menilai RS Siloam sangat *recommended* untuk dijadikan rujukan bagi Anggota DPR RI yang memang sedang membutuhkan penanganan kesehatan.

“Rumah Sakit Siloam fasilitasnya sudah terdepan. Kalau kita lihat, rumah sakit ini sudah terdepan dalam penanganan kesehatan di Indonesia karena memiliki fasilitas yang komplit. Bisnisnya juga bagus dan sosialnya berjalan. Tujuan kedatangan kami adalah ingin melihat apa kelebihan yang dimiliki RS Siloam Karawaci ini,” ucap Dimiyati.

Mengutip paparan yang disampaikan pihak RS Siloam, Dimiyati menyampaikan, RS Siloam telah memiliki

fasilitas *Gamma Knife* atau Pisau Gamma yang merupakan salah satu pengobatan *radiosurgery* atau bedah radiasi untuk mendestruksi tumor di dalam otak tanpa harus melakukan pembedahan. Sistem penanganannya juga cepat, hanya membutuhkan waktu kurang lebih satu jam, setelah itu pasien dapat beraktivitas kembali.

“Kami melihat Rumah Sakit Siloam lebih maju dan terdepan, sehingga tidak perlu pergi keluar negeri untuk berobat. Ketika masuk ke kawasan RS Siloam Karawaci ini, kita melihat suasananya tidak seperti ketika kita masuk ke rumah sakit pada umumnya, di sini kita seakan tengah memasuki sebuah mal atau public utility yang membuat seseorang tidak merasa takut. Oleh karenanya saya mereferensikan RS Siloam Karawaci ini kepada Anggota DPR yang ingin pergi berobat,” tuturnya.

Ada lebih dari 200 orang Dokter Spesialis, baik dari dalam maupun luar negeri, yang tergabung dalam grup Rumah Sakit ini, sambung Dimiyati. “RS Siloam sangat *recommended* bila ada anggota DPR yang memang memerlukan penanganan kesehatan,” tegasnya lagi.

Dalam pertemuan dengan pihak RS Siloam, Dimiyati juga sempat mempertanyakan mengenai masalah penanganan Covid-19 yang dilakukan oleh Siloam. “Ternyata di Siloam memang ada tempat untuk penanganannya. RS Siloam di daerah Kelapa Dua yang dikhususkan untuk penanganan pasien Covid-19. Untuk itu kami berharap kerjasama ini bisa lebih ditingkatkan dan diperlukan juga peralatan peralatan medis yang lebih bagus dan modern lagi. Meskipun saat ini sudah sangat baik. Mudah-mudahan kerjasama ini bisa terus dibangun,” tandasnya. ● dep/es



Ketua BAKN DPR RI menyerahkan cinderamata kepada mitra kerja. Foto: Hendra/MAH

# Ketimpangan Distribusi Subsidi Energi Harus Diselesaikan

Subsidi merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah dalam rangka menjaga pemerataan terhadap akses ekonomi dan pembangunan. Fungsi subsidi sendiri adalah melakukan koreksi terhadap ketidaksempurnaan pasar atau market *imperfections*.

Tujuan utama dalam kebijakan subsidi di Indonesia guna menjaga kelompok masyarakat miskin agar tetap akses terhadap pelayanan publik, pembangunan ekonomi dan sosial. Tapi pada prakteknya, kebijakan subsidi di Indonesia justru keluar dari konteks perlindungan terhadap masyarakat miskin.

Terjadi disorientasi sasaran pada kebijakan subsidi di Indonesia yang manfaatnya jatuh pada kelompok yang tidak semestinya. Ketidaktepat sasaran distribusi itu

menjadi fokus Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI saat kunjungan spesifik Ke Jawa Barat dan Banten baru-baru ini dalam rangka pengawasan terhadap penelaahan distribusi subsidi energi.

Disampaikan, Ketua BAKN DPR RI Marwan Cik Asan ketimpangan dalam pengalokasian sasaran penerima subsidi energi yang terus berulang merupakan permasalahan yang harus diselesaikan bersama. Perlu ada terobosan-terobosan agar pengelolaan subsidi itu tepat

sasaran.

“Perlu adanya cara baru dalam pengelolaan subsidi agar tepat sasaran. Penelaahan secara menyeluruh dengan pihak-pihak terkait subsidi energi, mulai dari pemerintah sebagai pihak pengambil kebijakan, badan usaha sebagai pelaksana atau distributor, dan kelompok masyarakat sebagai konsumen subsidi energi juga perlu dilakukan,” ungkapnya.

Disorientasi sasaran alokasi subsidi, menurut Marwan terjadi karena pengelolaan dan pemanfaatan yang tidak optimal. Untuk itu, *refocusing* dan pengawasan program pemerintah terkait kebijakan subsidi energi perlu dimaksimalkan agar tujuan subsidi energi benar-benar tepat sasaran.

“Masih banyak masyarakat yang berpenghasilan rendah dan layak mendapatkan subsidi namun belum merasakannya. Sementara di sisi lain, pengusaha-pengusaha dengan penghasilan di atas rata-rata banyak yang menikmati subsidi energi tersebut. Pengawasan terkait kebijakan subsidi energi perlu dimaksimalkan agar pelaksanaan subsidi energi agar tujuan subsidi energi benar-benar terwujud,” katanya.

Pasalnya, masih kata Marwan, adanya kebijakan subsidi di Indonesia agar kelompok masyarakat miskin tetap memiliki akses terhadap pelayanan publik, pembangunan ekonomi dan sosial. “Diperlukan kajian ulang terhadap peraturan-peraturan terkait pelaksanaan subsidi energi, agar jangkauan subsidi tepat sasaran,” jelasnya.

Politisi Partai Demokrat ini pun berharap subsidi bisa menjadi bantalan untuk masyarakat menuju kesejahteraan.

“Oleh karena itu, kebijakan subsidi di Indonesia diharapkan dapat memastikan kelompok masyarakat miskin agar tetap memiliki akses terhadap pelayanan publik, pembangunan ekonomi dan sosial,” katanya.

Diketahui, subsidi energi di Indonesia dalam satu dekade terakhir mencapai angka lebih dari seratus triliun rupiah setiap tahunnya. Lebih dari itu, pada tahun 2014 angka subsidi energi mencapai angka Rp 246,5 triliun atau 2,8 persen terhadap produk domestik bruto. Angka itu setara pula dengan belanja di lebih dari 5 kementerian lembaga. Bahkan, belanja subsidi secara keseluruhan pernah dialokasikan hampir Rp 400 triliun atau sekitar 30 persen dari total APBN tahun 2014.

Tercatat subsidi energi dalam postur sementara APBN

”

...KEBIJAKAN SUBSIDI DI INDONESIA DIHARAPKAN DAPAT MEMASTIKAN KELOMPOK MASYARAKAT MISKIN AGAR TETAP MEMILIKI AKSES TERHADAP PELAYANAN PUBLIK, PEMBANGUNAN EKONOMI DAN SOSIAL



Tim Kunjungan Kerja BAKN DPR RI foto bersama para mitra kerja. Foto: RisaMAN

2020 sebesar Rp 125,3 triliun, sedangkan dalam RAPBN 2020 sebesar Rp 137,5 triliun. Secara rinci, subsidi BBM dan LPG turun Rp 4,7 triliun menjadi Rp 70,6 triliun dibandingkan RAPBN 2020 yang sebesar Rp 75,3 triliun. Subsidi listrik dalam postur sementara APBN 2020 sebesar Rp 54,8 triliun, turun Rp 7,4 triliun dibandingkan RAPBN 2020 yang sebesar Rp 62,2 triliun.

Dalam konteks besarnya angka subsidi itu, maka selama bertahun-tahun, subsidi energi dinilai menjadi salah satu beban fiskal yang signifikan bagi Pemerintah Indonesia. “Rerata, pengeluaran terkait subsidi konsumen saja sudah mencapai sekitar 3,1 persen dari PDB tahunan per tahun fiskal. Biaya ini menyebabkan ketidakstabilan

makroekonomi dan cenderung membebani belanja pembangunan,” ungkapnya

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Provinsi Banten Al Muktabar mengapresiasi atas kunjungan kerja BAKN DPR RI. Pihaknya berharap kebijakan pemerintah harus berpihak pada rakyat, khususnya masyarakat pesisir di Banten.

“Kelompok Nelayan tadi menyampaikan masih kekurangan kuota (dalam hal ini solar) untuk melaut. Kami berharap arah kebijakan berpihak pada rakyat, kami (Pemda) akan terus berupaya agar hak-hak masyarakat makin dekat dengan masyarakat itu sendiri namun kami butuh dukungan dari DPR,” katanya. ● hs,rnm/es

# Lindungi Dokter dan Nakes dari Covid-19

Penularan Covid-19 masih terjadi di tengah masyarakat. Tak hanya masyarakat umum saja yang potensial terinfeksi, namun para tenaga kesehatan yang berada di lini terdepan seperti dokter spesialis, perawat, dan dokter residen yang sedang mengikuti Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) juga berpotensi terjangkit virus corona.

**B**erdasarkan data Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), hingga 3 Oktober 2020 sudah ada 130 dokter yang meninggal dunia akibat Covid-19. Bergugurnya para tenaga kesehatan disebabkan karena minimnya APD, kekurangan skrining pasien di fasilitas

kesehatan, kelelahan para tenaga medis karena jumlah pasien Covid-19 yang terus bertambah, jam kerja yang panjang serta tekanan psikologi. Karena durasi pandemi ini yang diperkirakan panjang, IDI mengatakan butuh langkah-langkah untuk melindungi tenaga medis sebagai benteng terakhir melawan Covid-19.

Salah satu langkah yang diharapkan IDI adalah pemerintah menekan kasus Covid-19 agar tidak semakin bertambah. Jika tidak, masyarakat

yang terkonfirmasi akan terus bertambah, tenaga kesehatan akan makin kewalahan karena jumlahnya yang terbatas. Ketimpangan antara pelayanan dengan fasilitas dan tenaga kesehatan mesti menjadi perhatian.

Hingga 11 oktober 2020, Indonesia memiliki 903 rumah sakit rujukan Covid-19. Terdiri dari 132 RS rujukan Covid-19 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Kesehatan dan 771 RS rujukan Covid-19 berdasarkan SK Gubernur.

“Keselamatan tenaga kesehatan adalah fokus Komisi IX DPR RI sejak awal virus Corona masuk ke Indonesia,” demikian diungkapkan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh saat membahas krisis tenaga Kesehatan di masa pandemik bersama dokter Nadhira Afifah di salah satu platform media sosial beberapa waktu lalu.

Politisi yang akrab disapa Nini ini mengungkapkan, Komisi IX yang membidangi Kesehatan senantiasa menekankan pentingnya keselamatan tenaga kesehatan yang langsung merawat pasien Covid-19. Mulai dari pemenuhan alat pelindung diri (APD) yang sesuai dengan standar WHO hingga pemberian intensif tambahan atau perlindungan jaminan tenaga kesehatan. “Pendistribusian APD Alhamdulillah sudah semakin baik, sementara terkait intensif yang belum berjalan dengan lancar, masih terus kita kejar, karena itu hak tenaga kesehatan,” tegasnya.

Selain terus mendorong pencairan intensif bagi tenaga kesehatan, pihaknya di Komisi IX DPR juga terus mengingatkan kepada pemerintah untuk memberikan vaksin pertama (jika sudah didistribusikan) kepada

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh. Foto: Dok/MAN





Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetyani. Foto: Azka/MAN

tenaga kesehatan terlebih dahulu.

“Ketika ada kebijakan vaksin, kami (Komisi IX) meminta pemerintah memberikan pertama untuk para tenaga kesehatan,” tegasnya, seraya mengatakan, Komisi IX sangat terbuka menerima aspirasi dari berbagai kalangan tidak terkecuali para tenaga kesehatan.

“Saran, masukan untuk memperkuat perlindungan tenaga kesehatan bisa disampaikan kepada Komisi IX, kami akan perjuangkan melalui kebijakan-kebijakan,” ungkapnya. Legislator Fraksi PKB itu menambahkan, pandemi Covid-19 telah mengajarkan banyak hal dalam memperbaiki sektor kesehatan di Indonesia.

#### **PEMERINTAH HARUS SERIUS**

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetyani tak pernah lelah menyuarakan keselamatan tenaga kesehatan. Netty bahkan meminta pemerintah menunjukkan keseriusan untuk melindungi tenaga kesehatan khususnya

terhadap mereka yang menangani Covid-19.

“Tenaga medis harus terlindungi dengan aman dalam menjalankan tugas di masa pandemi. Sebab mereka bekerja di zona yang rentan penularan,” ungkap Netty.

Tak ada yang menginginkan tenaga medis yang terpapar atau gugur akibat prosedur penanganan Covid-19 yang kurang standar. Jika perlindungan terhadap dokter dan tenaga kesehatan lainnya tidak diprioritaskan, maka bangsa ini akan mengalami kerugian besar di masa depan. Sebab, saat ini jumlah dokter belum sebanding dengan jumlah penduduk.

“Jumlah dokter kita kurang dari 200 ribu orang, masih belum sepadan dengan jumlah penduduk. Jika kebijakan perlindungan terhadap dokter tidak efektif, bukan tidak mungkin kita akan mengalami krisis dokter dan tenaga medis,”katanya.

Untuk itu, Legislator Fraksi PKS itu meminta agar pemerintah membuat kebijakan perlindungan

terhadap tenaga kesehatan dan kebijakan itu harus ditindaklanjuti dengan implementasi konkrit di lapangan. Adapun beberapa hal yang disorotinya diantaranya terkait transmisi Covid-19 yang saat ini masih tinggi.

Perlu ada upaya keras untuk memutus mata rantai penularan di perkotaan, angkutan publik, pasar dan pusat perbelanjaan, asrama sekolah atau kampus, pertemuan-pertemuan dan rumah sakit. Bahkan, perkantoran pemerintah menjadi penyumbang angka kasus paling banyak di DKI. Tempat-tempat publik tersebut harus selalu steril dan semua orang wajib hukumnya mematuhi protokol kesehatan. “Jika perlu gunakan TNI-Polri untuk menjaga ketertiban di sana,” tegasnya.

Selanjutnya, perlu dipastikan fasilitas kesehatan seperti ruang isolasi, ICU, dan SDM kesehatan memadai. Kemudian peningkatan kapasitas pelacak dan tes Covid-19.

Netty juga mengajak masyarakat juga turut andil memberikan perlindungan bagi dokter dan tenaga kesehatan. Perlindungan itu dapat berupa menerapkan protokol kesehatan yang baik dalam kehidupan sehari-hari.

Soal penambahan jumlah tenaga kesehatan, menurut dia, Komisi IX DPR RI yang membidangi urusan kesehatan sudah sempat membahas ini bersama Kementerian Kesehatan dalam rapat koordinasi terkait rencana kerja dan anggaran (RKA) belum lama ini. Salah satunya yang dibahas dalam rapat tersebut adalah usulan Komisi IX untuk menambah penambahan jumlah tenaga kesehatan. Baik untuk rumah sakit vertikal atau rumah sakit daerah. Usulan itu perlu dibarengi dengan penambahan sarana atau peralatan untuk perawatannya. ● rmm/es

# Menunggu Vaksin Produk Bangsa Sendiri

Sejak akhir Februari 2020, ketika virus Corona mulai masuk “menginvasi” penduduk Indonesia, virus ini belum tertangani dengan baik. Satu per satu korban berjatuh tak terkendali. Kamar-kamar rumah sakit penuh oleh pasien Covid-19. Maka untuk konteks hari ini, penanggulangan Covid-19 jadi kebijakan hulu yang harus didahulukan sebelum menata hilir kebijakan, seperti ekonomi, politik, dan sosial.

**K**ebijakan hulu itu dimulai dengan menekan angka pasien Covid-19. Selain itu, riset atas temuan obat dan vaksin Corona juga sangat krusial untuk menanggulangi wabah ini. Kampanye cuci tangan dengan sabun, penggunaan masker, hingga pembatasan sosial berskala besar (PSBB) jadi keniscayaan yang harus dilakukan secara masif. Semua ini bagian dari kebijakan hulu. Riset untuk memproduksi vaksin dan obat Corona sedang dilakukan.

Tanpa produksi vaksin, bangsa ini akan terus terpuruk hidup bersama virus corona. Untuk itulah, pemerintah memberi mandat kepada perusahaan BUMN, PT Bio Farma memproduksi vaksin Corona. Dijanjikan akhir tahun 2020 ini, vaksin sementara diproduksi sebanyak 250 juta untuk kebutuhan di dalam negeri. Komisi IX DPR RI yang membidangi kesehatan juga sudah berkomitmen dengan pemerintah agar riset yang dilakukan para akademisi dan bahan vaksin diproduksi di dalam negeri.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka

Lena dalam siaran persnya awal September lalu mengatakan, Indonesia harus memiliki kemandirian produksi obat, vaksin, dan alat kesehatan. “Komisi IX mengapresiasi dan mendukung penuh keterlibatan aktif seluruh pihak yang telah melakukan riset dan inovasi untuk penanggulangan Covid-19, termasuk pengembangan

Vaksin Merah Putih yang menggunakan *isolate* virus asli di Indonesia,” kata Melki.

Pihaknya mendorong agar konsorsium riset dan inovasi Covid-19 meningkatkan komunikasi, koordinasi, juga sinergi dalam menyusun kebijakan dan implementasi riset serta inovasinya di dalam negeri. Politisi Partai Golkar itu, mendesak konsorsium tersebut menyusun *grand design* riset dan inovasi pengembangan kemandirian obat, vaksin, dan alat kesehatan. Kerangka waktu (timeline) dan infrastruktur distribusi vaksin juga harus diketahui Komisi IX DPR RI.

Kemenkes RI diharapkan memanfaatkan hasil riset dan inovasi vaksin dan obat Covid-19 yang telah dikembangkan di Indonesia tersebut dengan berpedoman kepada Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan. Tak kalah pentingnya, lanjut Melki, Badan Pengawasan



Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena. Foto: Ena/MAW



Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay. Foto: Rumi/MAN

Obat dan Makanan (POM) RI harus proaktif melakukan pendampingan, penelitian, dan pengembangan obat dan vaksin yang memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu.

Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay berkomentar, riset dan inovasi vaksin Covid-19 merupakan kerja besar bangsa ini untuk membangun kehidupan baru, setelah terus terpuruk diserang wabah virus yang kali pertama ditemukan di Wuhan, China ini. Bila riset dan inovasi sudah rampung dilakukan, maka hasilnya merupakan sumbangsih besar para peneliti bagi bangsa ini dalam membasmi virus corona.

“Kita semua sedang menunggu hasil kerja besar para peneliti kita. Kalau berhasil, *insyaAllah* akan mendapatkan ridho dari Allah,” tutur Saleh. Untuk itu, Komisi IX DPR RI sudah mendesak pemerintah agar Vaksin Merah Putih bisa segera diuji klinis. Pada rapat dengar pendapat umum dengan Lembaga Biologi Molekuler Eijkman yang dipimpin Amin

Soebandrio, terungkap, khusus Vaksin Merah Putih baru bisa diproduksi pada 2021.

Di hadapan Komisi IX DPR RI, Eijkman akan menguji coba vaksin pada hewan 2-3 bulan mendatang. “Kami sedang menunggu ekspresi dari protein tersebut dalam bentuk protein rekombinan. Nanti *insyaallah* dalam 2-3 bulan ke depan kami akan uji coba pada hewan,” ujar Amin. Pada Februari atau Maret 2021 sampel vaksin bisa diserahkan kepada Bio Farma.

Di lain pihak, Presiden Joko Widodo sudah membentuk Tim Nasional Percepatan Pengembangan Vaksin Covid-19. Pembentukan tim berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Tim Nasional Percepatan Pengembangan Vaksin Covid-19. Anggota Komisi IX DPR RI lainnya Rahmad Handoyo, menilai, sebenarnya rencana produksi sedikit terlambat di tengah virus sudah mewabah dan meluas ke seluruh pelosok negeri.

“Meskipun sebenarnya sedikit terlambat bila dibandingkan negara lain, tapi kita tetap mengapresiasi

keputusan ini. Ini demi anak bangsa, karena itu tim nasional percepatan pengembangan vaksin wajib didukung semua pihak,” kata Rahmad dalam keterangan persnya, September lalu. Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini melihat, keterlambatan yang dimaksud karena dukungan anggaran dari pemerintah sangat terbatas.

“Kan, anggaran yang tersedia untuk penemuan vaksin sangat terbatas, sementara porsi untuk vaksin ini sangat signifikan,” imbuh Rahmad lagi. Namun di sisi lain, ia yakin bila anggaran sudah memadai, maka kolaborasi anak bangsa, perguruan tinggi, akademisi lembaga penelitian bisa bergotong royong menemukan vaksin Covid-19. “Saya kira anggaran yang memadai akan mendorong semangat penemuan vaksin akan semakin bagus,” tutur Rahmad,

Semua ini, lanjut Rahmad, menunjukkan bahwa bangsa Indonesia bisa mandiri menemukan dan menciptakan vaksin sendiri. Apalagi, produksi vaksin plus obat corona jadi harga diri bangsa. Bila kelak vaksin sudah diproduksi massal, niscaya perekonomian negara kembali pulih. Sejalan dengan itu, kehidupan sosial masyarakat di Tanah Air juga ikut pulih, setelah sekian lama tertekan. Kehidupan baru jadi impin semua warga bangsa.

“Tentu dengan penemuan vaksin ini, kita bisa memenuhi kebutuhan di negara sendiri. Kita bisa menghindari dari perusahaan-perusahaan vaksin yang berorientasi bisnis semata,” pungkas legislator asal Boyolali Jawa Tengah itu. Jika saatnya nanti anak bangsa bisa membuat vaksin sendiri, tentu kita sebagai umat bisa membantu negara-negara lain yang kesusahan,” tutup Rahmad.

● mh/es

## Sidang Umum AIPA ke-41: DPR Suarakan Penanganan Pandemi Covid-19

Sidang Umum ke-41 ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) digelar secara virtual pada 8-10 September lalu di Hanoi, Vietnam. Dalam sidang bertema “Diplomasi Parlemen untuk Mewujudkan Komunitas ASEAN yang Kohesif dan Responsif” itu, DPR RI mendorong AIPA untuk menghasilkan kebijakan penanganan Covid-19 dan menjaga stabilitas perdamaian serta keamanan di Asia Tenggara. Pandemi Covid-19 membawa dampak pada manusia dan pembatasan kegiatan ekonomi yang dapat mengakibatkan kawasan berada di ambang resesi.

**K**etua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani mendorong parlemen Negara Anggota ASEAN untuk menghasilkan kebijakan yang memadai dalam rangka membatasi penyebaran Covid-19, mengurangi dampak ekonomi yang lebih besar, dan memastikan kesejahteraan sosial.

“Optimalkan peran parlemen dengan menjalankan tugas legislasi terkait penanggulangan Covid-19 dan dampak sosial ekonominya, seperti merumuskan undang-undang terkait stimulus fiskal atau penguatan jaring pengaman sosial,” ujar Puan dalam Sidang



Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani. Foto: Geraldi/MAN

Umum ke-41 AIPA.

“Dengan semangat ‘Gotong Royong’, yang merupakan istilah tradisional Indonesia untuk bekerja secara kolektif, kita akan dapat mencapai satu tujuan bersama untuk melalui pandemi Covid-19 ini,” sambung Puan yang menjadi pimpinan Delegasi DPR RI dalam sidang yang digelar secara virtual dari Vietnam tersebut.

Politisi PDI-Perjuangan itu mengungkapkan, parlemen harus meningkatkan pengawasan untuk memastikan undang-undang benar-benar diterapkan dan manfaatnya dirasakan rakyat.

Mengenai isu perdamaian, Puan berpandangan bahwa perdamaian, keamanan, dan stabilitas selalu menjadi faktor penting dalam

pembangunan dan pertumbuhan di Asia Tenggara. “Penting bagi kita untuk tetap memelihara Asia Tenggara menjadi kawasan yang damai, bersahabat, dan harmonis, guna meningkatkan kerja sama untuk membatasi penyebaran Covid-19 dan mengatasi dampak buruk yang ditimbulkannya,” ujar Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Periode 2014-2019 itu.

Masih dalam rangkaian Sidang Umum ke-41 AIPA, Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Charles Honoris mengatakan, perlu adanya kerja sama dan gotong royong dari negara-negara Asia Tenggara agar bisa sama-sama keluar dari permasalahan wabah virus

Covid-19. Ia menuturkan, Parlemen memiliki peran penting dalam mengawasi kebijakan pemerintah di negaranya masing-masing.

“Sebagai Parlemen tentu saja mempunyai peran penting bersama pemerintah negara masing-masing dan juga mengawasi kebijakan negara, sehingga negara-negara di kawasan Asia Tenggara bisa saling bekerjasama untuk sama-sama bangkit dari sisi kesehatan dan ekonomi akibat wabah Covid-19,” jelas Charles. Politisi PDI-Perjuangan itu percaya Pemerintah beserta masyarakat bisa gotong royong bersama menjaga protokol kesehatan.

#### AIPA TAK SEPAKAT SOAL ROHINGNYA

Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon dalam sidang Komisi Politik memperjuangkan dua draf resolusi, antara lain mengenai pentingnya stabilitas kawasan di masa pandemi khususnya dalam konteks isu Laut China Selatan (LCS) dan bantuan kemanusiaan bagi pengungsi Rohingya di Rakhine. Ia menekankan pentingnya perdamaian, keamanan dan stabilitas kawasan ASEAN, termasuk dinamika yang terjadi di perairan Laut China Selatan.

Kesolidan dan kolektivitas ASEAN dibutuhkan dalam mengurangi penyebaran Covid-19 dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan. Selain itu, ASEAN diharapkan dapat menyelesaikan isu-isu internal kawasan secara mandiri, termasuk isu kemanusiaan bagi pengungsi Rohingya. Menyangkut isu Rohingya, Fadli menyesalkan Parlemen Myanmar yang menolak usulan DPR RI mengenai perlunya penguatan dari parlemen, sebagaimana disepakati Pemerintah Negara ASEAN, agar Pemerintah Myanmar memberikan bantuan kemanusiaan.

Akhirnya, untuk kesekian kalinya, AIPA kembali gagal meraih kata sepakat mengenai isu Rohingya. “Kita perlu penguatan dari parlemen atas kesepakatan di antara pemerintah negara ASEAN. Paragraf itu terkait dukungan bagi Myanmar untuk memberikan bantuan kemanusiaan, menjamin proses repatriasi yang aman dan bermartabat bagi para pengungsi Rohingya di Rakhine,” terang politisi Partai Gerindra itu.

#### AIPA DIHARAPKAN PERKUAT KERJA SAMA KAWASAN ASEAN

Sidang Umum AIPA menghasilkan berbagai resolusi baik dari bidang politik, ekonomi, sosial, perempuan, parlemen muda, dan keorganisasian yang berasal dari 10 negara anggota AIPA dan sejumlah negara pengamat yang hadir. Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin menekankan bahwa setiap negara anggota AIPA perlu bekerja sama untuk saling membantu untuk menyelesaikan masalah Covid-19, mulai dari penyelesaian dari segi kesehatan dengan mengupayakan pengembangan vaksin hingga penyelesaian dari sektor ekonomi.

“Pandemi ini menjadi masalah

bersama, 10 negara sebagai member dari AIPA berkomitmen untuk saling bekerja sama dan saling bantu menyelesaikan masalah-masalah pandemi baik dari strategi mengatasi menurunnya daripada pandemi ini. Baik penyelesaian dari sisi vaksin, dan kemudian juga bagaimana menyelesaikan dari sisi ekonomi sehingga dampak daripada ini bisa dilakukan penyelesaian secara ekonomi, sehingga negara *member* bisa cepat *recovery*, pandeminya turun, vaksinnnya selesai, dan pemulihan ekonominya berjalan baik,” jelas Azis.

Meski sidang kali ini digelar secara virtual, Azis meyakini bahwa pertemuan yang turut dihadiri oleh 200 anggota parlemen dari 10 negara anggota ASEAN, serta pengamat atau *observer* dari parlemen negara lain dan sejumlah organisasi internasional tersebut, merupakan wujud nyata atas komitmen anggota parlemen AIPA dalam mewujudkan ASEAN yang kohesif dan responsif dalam menanggulangi masalah regional, utamanya dalam mengatasi pandemi serta dampaknya bagi berbagai sektor di wilayah Asia Tenggara. • sf



Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon. Foto: Rumi/IAN

**DAPIL**



## Sutrisno: Panen Bawang Putih Lokal di Desa Nunuk

Sutrisno merupakan salah seorang anggota dewan yang memang *concern* terhadap sektor pertanian, terutama di daerah pilihnya.

desa terakhir yang ia mekarkan sebelum akhir jabatannya, sehingga ia merasa memiliki tanggung jawab untuk kemudian memajukan desa tersebut. Dalam wawancara dengan *Tim*

ke tempat itu. Justru di tempat itu berbeda dari tempat lainnya. Mulai menanam bawang putihnya di antara bulan Mei hingga Juli,” jelasnya.

Anggota Komisi IV dari Fraksi PDI-Perjuangan pun menyatakan komitmen politiknya bahwa pemerintah harus menganggarkan secara khusus pembebasan lahan-lahan pertanian untuk bawang putih. Ia juga akan mendorong adanya aliran dana untuk pengembangan bawang putih di Desa Nunuk Baru.

**D**alam masa sidang kali ini pun, ia menyempatkan mengunjungi Desa Nunuk di Majalengka untuk melakukan panen bawang putih lokal bersama Kelompok Tani Desa Nunuk.

Ketika mendapat informasi bahwa para Poktan Desa Nunuk dapat melakukan panen bawang putih hanya dalam waktu tiga bulan usia tanam, ia pun terkejut serta optimis. Menurutnya hal tersebut adalah temuan baru yang bisa diselaraskan dalam program swasembada bawang putih 2021 Kementerian Pertanian. Ia pun telah mendorong pemerintah untuk memprioritaskan Desa Nunuk jadi sentra bawang putih.

“Ya justru itu karena inikan menggunakan pola tanam yang berbeda daripada umumnya jadi artinya bawang putih bukan hanya spesifik ditanam habitatnya bawang putih saja. Tetapi ternyata bisa ditanam dengan tanaman lain. Jadi akan dijadikan sentra juga pusat pengembangan bawang putih, saya juga minta pada Dirjen Hortikultura,” jelas Sutrisno.

Mantan Bupati Majalengka ini pun mengaku bahwa Desa Nunuk Baru merupakan salah satu



Anggota DPR RI Sutrisno saat memanen bawang putih bersama para petani. Foto: Ist/MAN

*Parlementaria*, ia menjelaskan bahwa dirinya telah meminta prioritas lahan jatah Jawa Barat dapat dialihkan sebagian ke desa tersebut.

“Justru saya sudah sampaikan ke Dirjen Hortikultura, jatah untuk Jawa Barat yang 175 hektar alihkan ke Nunuk. Karena dengan saluran air yang tidak jauh, itu fasilitasnya juga sangat ringan, tinggal difasilitasi pompa sama selangnya

“Artinya manakala dikelola dengan baik, bumi pertiwi ini bisa mandiri asal kita ada kemauan, dengan kemauan itu didorong terus agar tidak mengimpor. Karena selalu saya katakan tidak ada yang tidak bisa dikembangkan di Bumi Pertiwi ini. Intinya kita harus mau, kalau mau kita pasti bisa,” imbuhnya mengakhiri.

• er/es

Sutan Adil Hendra:

# Bantu Masyarakat Terdampak Covid-19

Di tengah kondisi pandemi yang terus memuncak, kembali ke daerah pemilihan untuk membantu masyarakat yang terdampak Covid-19 adalah suatu keharusan bagi seorang wakil rakyat.

**B**ukan hanya untuk menyerap aspirasi, Anggota DPR yang kembali ke dapil berusaha untuk meringankan beban masyarakat terdampak dengan melakukan kegiatan sosial berupa pembagian paket bantuan makanan, obat, masker, hingga vitamin vitamin tambahan.

“Pandemi Corona sangat memukul ekonomi kita. Jutaan orang kehilangan pendapatan. Resiko ini mengakibatkan masyarakat kesulitan pangan, ini menjadi sesuatu yang perlu diatasi. Lewat bantuan ini, saya berharap dapat ikut membantu masyarakat

dalam menghadapi pandemik Covid-19,” kata Anggota Komisi IX DPR RI Sutan Adil Hendra.

Politikus yang akrab disapa SAH ini menjelaskan rencananya yang menargetkan penyaluran bantuan sebanyak 25.000 paket sembako dan obat-obatan akan dilakukan di puluhan titik di Provinsi Jambi. Namun, tidak hanya untuk masyarakat dan tenaga kesehatan, bantuan yang diberikan SAH juga menyasar kepada petugas kebersihan dan petugas pemadam kebakaran.

“*InsyAllah*, saya akan terus membagikan sembako serta obat-obatan di banyak lokasi dalam Prov Jambi. Saat ini baru

di seluruh kelurahan Telanaipura, Kel Pematang Sulur, dan Jerambah Bolong,” katanya.

Dalam kegiatannya, SAH juga tidak pernah terlewat dalam menyosialisasikan protokol kesehatan serta menerapkan 3M. “Selain itu, kita juga terus mengingatkan masyarakat agar disiplin patuhi protokol kesehatan dan saling bahu membahu bekerja sama melawan Covid-19,” harapnya.

Kegiatan itu mendapat respon baik dari masyarakat yang menerima bantuan. Salah satunya H. Misran salah satu tokoh masyarakat di Kelurahan Telanaipura, Misra mengungkapkan terimakasih kepada SAH yang telah peduli terhadap masyarakat. Karena memang banyak masyarakat yang mengharapkan bantuan di masa pandemi ini.

“Kepedulian Pak SAH terhadap warga masyarakat tidak perlu diragukan lagi, dari ratusan ribu beasiswa untuk masyarakat sampai puluhan ribu paket sembako saat pandemi ini, pak SAH selalu turun membantu masyarakat Jambi,” ungkapnya.

● rmm/es



Anggota DPR RI Sutan Adil Hendra foto bersama usai menyalurkan paket bantuan kepada para petugas kebersihan. Foto: Ist/MAN

# Endang Maria Astuti Kampanyekan *E-Learning* Berkualitas

Di masa pandemi virus Corona seperti sekarang ini, hampir semua aktivitas dibatasi termasuk kegiatan pendidikan di sekolah dan kampus. Adalah Endang Maria Astuti yang ikut mengampanyekan *e-learning* atau pembelajaran jarak jauh lewat akses *online* di Kabupaten Wonogiri.



Anggota DPR RI Endang Maria Astuti saat menjadi pemateri dalam PPA STAIMAS Wonogiri secara daring. Foto: Ist/MAN

**E**ndang menekankan pada kualitas pentingnya revolusi pembelajaran berbasis *online* atau *e-learning*. Hal ini ia sampaikan ketika menjadi pemateri dalam Program Pengenalan Akademik (PPA) Sekolah Tinggi Agama Islam Mulia Astuti (STAIMAS), Wonogiri, pada September lalu. Dalam konteks hari ini, revolusi pembelajaran berbasis *online* sangat diperlukan dengan meningkatkan kualitas.

“Revolusi pembelajaran saat ini sangatlah diperlukan karena tidak mungkin melakukan pembelajaran secara tatap muka langsung di tengah pandemi Covid-19. Namun demikian, kualitas pembelajaran yang ada harus tetap mengedepankan ketercapaian tujuan pembelajaran dan proses belajar yang bermakna bagi peserta didik,” ucap legislator dapil Jateng IV (Wonogiri, Karanganyar, Sragen).

”

REVOLUSI PEMBELAJARAN SAAT INI SANGATLAH DIPERLUKAN KARENA TIDAK MUNGKIN MELAKUKAN PEMBELAJARAN SECARA TATAP MUKA LANGSUNG DI TENGAH PANDEMI COVID-19

Anggota Komisi VIII DPR RI itu selalu mengupayakan peningkatan kemampuan guru dan dosen dalam pembelajaran *online*. Menurut Endang, pembelajaran dengan cara ini juga harus menyenangkan bagi peserta didik. Bahkan, Endang siap memfasilitasi upaya-upaya peningkatan kualitas pembelajaran di tengah pandemi Covid-19.

*E-learning* berkualitas yang disuarakan politisi Partai Golkar

itu disambut baik para guru dan dosen di Wonogiri. Pelatihan pembelajaran *online* pun menjadi tren di masa pandemi. Tidak sekadar belajar jarak jauh, kualitas pembelajarannya harus sama dengan tatap muka. Di sinilah pentingnya pelatihan bagi para pendidik untuk belajar bagaimana strategi jitu meningkatkan kualitas belajar *online* plus menyenangkan.

● mh/es

Fathan Subchi:

# Serahkan Bantuan Operasional Pendidikan Keagamaan

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fathan Subchi menyerahkan bantuan operasional untuk pendidikan keagamaan di Kabupaten Demak, akhir Agustus lalu. Bantuan tersebut untuk Pondok Pesantren Madrasah Diniyyah (Madin) dan Taman Pendidikan Alquran (TPQ).



Anggota DPR RI Fathan Subchi memberikan bantuan operasional pendidikan keagamaan di dapilnya. Foto: Ist/MAN

**P**olitisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut menyampaikan, bantuan stimulus atau subsidi pemerintah kepada pendidikan keagamaan tersebut telah diperjuangkan cukup lama. “Ini menjadi diskusi panjang termasuk dengan Kementerian Keuangan. Akhirnya, bantuan ini

bisa terwujud,” ujar Fathan.

Semula, kata dia, pemerintah mengajukan dana ke DPR RI sekitar Rp 690 triliun. Setelah anggaran tersebut disetujui, baru muncul skema bantuan untuk diberikan kepada pendidikan keagamaan yang ada di Indonesia. Fathan menambahkan, bahwa bantuan itu merupakan bagian

dari perhatian negara terhadap masyarakatnya.

Kewajiban membarikan bantuan tersebut adalah tanggung jawab Pemerintah agar subsidi terhadap sektor UMKM, kelompok miskin, maupun terhadap dunia keagamaan dapat terlaksana, termasuk pesantren, Madin dan TPQ. “Kalau subsidi untuk pesantren hanya sekitar Rp 2,9 triliun itu memang kecil sekali. Masih kurang. Kalau dirata-rata untuk membantu 75 ribu pesantren, maka masing-masing cuma dapat Rp 20 juta sampai Rp 25 juta saja,” ujarnya.

Di sisi lain, Pemerintah juga membuat kebijakan untuk keringanan pajak, stimulus untuk UMKM dan lainnya. Selama pandemi ini, kata Fathan, Pemerintah telah mempunyai niat baik untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Negara hadir dan bisa memberikan pendampingan serta meringankan beban masyarakat. “Berupa, stimulus untuk UMKM, dunia pendidikan dan keagamaan, korporasi, BUMN dan lainnya,” kata legislator dapil Jawa Tengah II yang meliputi Demak, Kudus dan Jepara ini

Tokoh Muslimat NU Demak, Hj Umi Hanik mengatakan, adanya bantuan untuk operasional pendidikan keagamaan yang disalurkan Fathan Subchi tersebut dinilai sangat membantu sekali kelancaran pendidikan di Demak. “Baru kali ini, bantuan langsung tunai tanpa inden. Segera bisa dieksekusi dan cair. Itu tidak lepas dari apa yang diperjuangkan Bapak Fathan Subchi selaku Anggota DPR RI dari PKB,” kata Umi Hanik.

● sf/es

Tamanuri:

# Sosialisasikan Protokol Kesehatan di Lampung Timur

Anggota DPR RI Tamanuri melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Lampung Timur (Lamtim). Adapun dalam kunjungannya ini, Tamanuri mengimbau kepada masyarakat Lamtim agar lebih waspada terhadap Covid-19 mengingat virus tersebut sangat mematikan dan belum ada obatnya. Kendati demikian masyarakat tetap ikuti protokol kesehatan namun jangan panik.

**D**alam kegiatan tersebut Tamanuri juga memberikan bantuan berupa sembako kepada masyarakat. Dalam hal ini adalah wujud keterlibatan DPR RI dalam membantu pemerintah dalam

memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak Covid 19.

“Saya selaku wakil rakyat yang mewakili rakyat Lampung dapil II, prihatin kepada masyarakat Lamtim. Semoga bantuan ini dapat meringankan.

Saya mengimbau agar tetap waspada namun jangan panik karena kita bisa sama-sama melawannya dengan catatan tetap mengikuti arahan dari pemerintah untuk tetap di rumah,” ujar Tamanuri di Kecamatan Mataram Baru Desa Mataram Baru, Lampung Timur.

Tamanuri menyampaikan, untuk warga Lamtim jika ada kepentingan mendesak dan harus keluar rumah tetap menggunakan masker dan jaga jarak minimal 2 meter. Hal tersebut untuk menghindari penularan covid-19.

Menurutnya, penularan virus ini dapat berkurang, apabila masyarakat mengikuti arahan dari pemerintah maka akan berangsur-angsur berkurang.

“Kalau kita sayang kepada orang sekitar kita, maka ikuti aja apa yang sudah di minta pemerintah. Nah, untuk bantuan selama Covid ini sudah kita bahas di pusat, dan akan segera terealisasi, bahkan ada yang sudah. Dan kita pastikan semua terbagi rata. Namun saya berpesan agar di bawah tidak ada yang nakal karena ini sangat di butuhkan sehingga jangan ada yang main-main terhadap bantuan tersebut,” tandasnya.

Selain itu, Politikus Fraksi Nasdem juga bertemu dengan satgas Covid-19 Desa Mataram Baru yang sedang bertugas di Posko Covid-19. Ia ingin memastikan protokol kesehatan di Lamtim berjalan dengan baik. ● hs/es



Anggota DPR RI Tamanuri menyerahkan bantuan paket sembako usai sosialisasi protokol kesehatan di dapilnya Lampung Timur. Foto: Ist/MAN

Ahmad Syaikh:

# Serahkan Bantuan Alsintan kepada Petani

Bagi anggota Komisi V DPR RI, Ahmad Syaikh untuk bertemu dengan masyarakat atau konstituennya di daerah pemilihannya di Jawa Barat VII yang meliputi Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta dilakukannya setiap saat.

**N**amun khusus di masa reses politisi dari Fraksi PKS ini benar-benar digunakannya untuk bertemu secara langsung masyarakat yang diwakilinya.

Perjalanan pertama Syaikh di masa reses kali ini dilakukan dengan menemui para petani di Desa Mekar Asih, Kecamatan Banyusari, Karawang, Jawa Barat. Selain menyerap aspirasi dari para petani, tak lupa ia mengingatkan petani untuk terus mempertahankan status Karawang yang selama ini dikenal sebagai lumbung padi nasional.

Atas dasar itulah, ia memperjuangkan bantuan alat mesin pertanian (alsintan). Dengan didampingi Bupati Karawang Celica Nurachdiana, Wakil Ketua BAKN

(Badan Akuntabilitas Keuangan Negara) DPR RI ini mengungkapkan bahwa bantuan alsintan yang diperjuangkannya ini sebagai wujud kepeduliannya terhadap masyarakat Karawang. Tidak lain untuk meningkatkan produktivitas pertanian.

Oleh karena itu ia berharap alsintan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal. Tidak lupa ia berjanji akan kembali memberikan bantuan serupa agar petani Karawang dapat hidup lebih sejahtera. Adapun alsintan yang diberikan berupa *Handsprayer* 5 Unit, Traktor R2 sebanyak 2 Unit dan 13 unit pompa air.

Usai memberikan bantuan Alsintan kepada para petani Karawang, Syaikh juga ikut meresmikan jembatan gantung

Babakan Renteng – Linggarsari (Bali) yang menghubungkan Kecamatan Telagasari – Lemahabang. Jembatan yang baru rampung dalam beberapa pekan terakhir, dan sempat dijadikan ajang swa foto (selfie) masyarakat ini merupakan hasil dari bantuan fisik Ahmad Syaikh.

“Jembatan ini akhirnya rampung juga dan harus disyukuri bersama. Siapa tahu, setelah jadi dan di resmikan, bukan saja jadi akses masyarakat, tetapi bisa jadi tempat wisata seperti halnya di Sukabumi. Tidak banyak yang saya berikan, tapi ini merupakan tanggungjawab kami sebagai anggota DPR RI dapil Karawang, Purwakarta dan Bekasi untuk selalu memberikan terbaik bagi masyarakat. Semoga bermanfaat dan bisa dirawat dengan baik,” paparnya.

Masih di masa resesnya kali ini, Syaikh menyempatkan diri mengunjungi SMKN 1 Babelan, Bekasi. Sebagaimana diketahui pembangunan gedung SMKN 1 Babelan, Bekasi ini sudah beberapa lama terhenti alias mangkrak. Gedung tersebut terdiri dari 6 ruang kelas. Kondisi bangunan baru sebatas tembok dan rangka atap ini sudah lima tahun dibiarkan begitu saja.

Mantan Wakil Walikota Bekasi itu melihat mangkraknya pembangunan gedung sekolah ini akibat belum adanya kejelasan soal status bangunan. Seharusnya sudah jadi wewenang provinsi. Namun mungkin karena masa transisi dari kabupaten ke provinsi, sehingga ini belum tuntas.

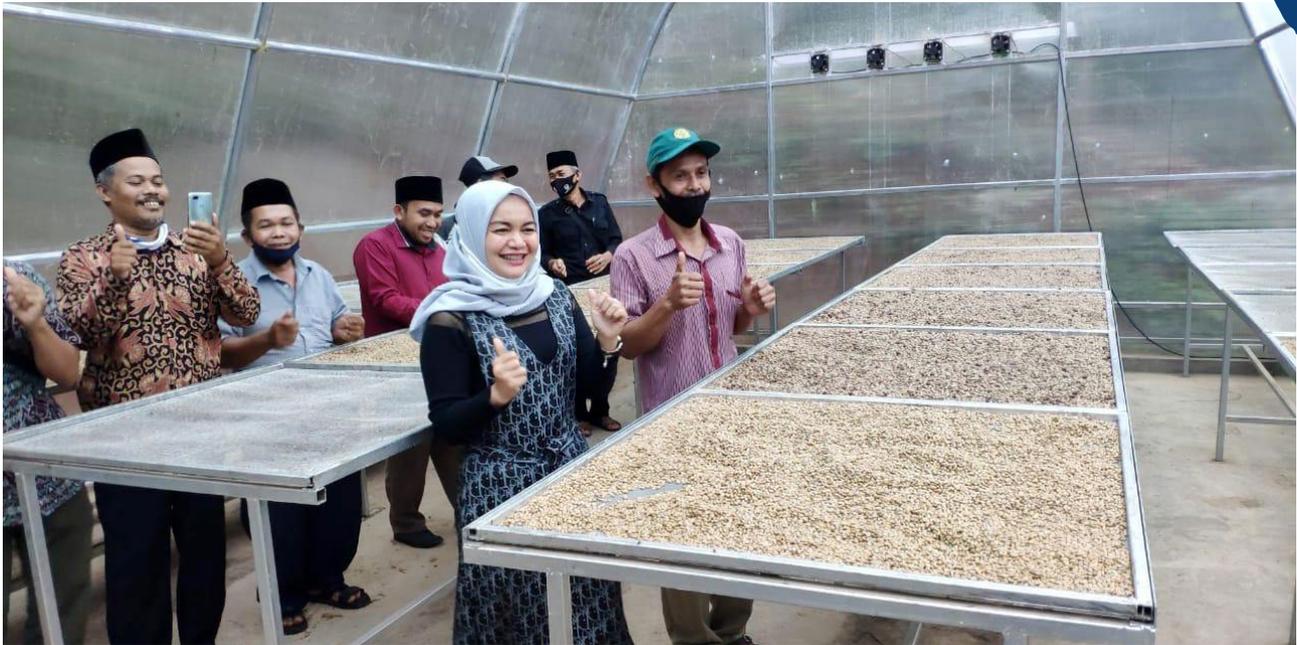
“Saya mengibaratkan situasi mangkrak ini ibarat seorang anak yang minta ke ayah ditolak, minta ke ibu tidak diberikan,” kata Syaikh.

Padahal terlihat berbagai piala dari tingkat kabupaten, provinsi dan nasional. Artinya meskipun sekolah ini terletak di tengah sawah, namun sekolah tersebut cukup berprestasi.

• ayu/es



Anggota DPR RI Achmad Syaikh saat penyerahan bantuan alsintan di Karawang. Foto: Ist/MAN



Anggota DPR RI Nur'aeni menyerap aspirasi dari para petani di dapilnya Banten II. Foto: Ist/MAN

Nur'Aeni:

## Serap Aspirasi dari Kalangan Petani

Sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai Anggota DPR RI, sudah seharusnya Nur'Aeni melakukan kunjungan ke daerah pemilihannya (dapil) Banten II dalam rangka mengisi masa reses.

Ia mengatakan kegiatan kali ini difokuskan untuk memberikan bantuan Alat Pelindung Diri (APD) kepada masyarakat dan menyerap aspirasi dengan tujuan membantu dapilnya menjadi jauh lebih baik.

“Kunjungan Kali ini kita fokuskan untuk memberikan bantuan APD kepada masyarakat dan menyerap aspirasinya, terutama karena saya di Komisi IV DPR yang membahas bidang pertanian dan perikanan maka kita juga menemui para petani dan nelayan untuk saling diskusi membahas masalahnya dan bersama-sama mencari jalan

untuk solusinya,” katanya.

Ia menyampaikan saat ini para petani masih sulit untuk mendapatkan pupuk dan akses permodalan serta alat-alat pertanian yang memang dikeluhkan setiap harinya. Disisi perikanan dan kelautan nelayan juga menginginkan bantuan-bantuan yang membantu untuk bertahan dalam situasi pandemi Covid-19 saat ini.

“Di dapil saya ada banyak keluhan seperti para petani yang membutuhkan tambahan permodalan dan kemudahan mendapatkan pupuk serta alat yang menunjang pertanian,

namun di sisi perikanan dan kelautan para nelayan juga membutuhkan bantuan berupa kapal juga tambahan modal apalagi saat ini sedang pandemi Covid-19,” kesannya.

Ia menilai situasi pandemi Covid-19 selain berdampak buruk terhadap kesehatan juga perekonomian, banyak masyarakat yang terkena PHK dari tempatnya bekerja. Sebagai seorang legislator sudah seharusnya ia bertugas memberikan arahan-arahan yang terbaik di dapilnya agar mengeluarkan masyarakat dari zona kesulitan.

“Banyak sekali yang kesulitan ekonomi akibat terkena PHK terutama para nelayan itu, saya sebagai seorang legislator sudah memberikan bantuan-bantuan yang diperlukan dan mengarahkan juga ke arah yang lebih baik jadi harapan saya adalah program-program yang ada dikembangkan lagi agar bantuannya lebih menyeluruh,” imbuhnya. ● tn/es

Saleh Partaonan Daulay

# Kampanyekan Germas dan Distribusikan Bahan Pokok

Di masa pandemi virus corona ini, gerakan masyarakat sehat (Germas) terus disosialisasikan secara masif ke tengah masyarakat. Tradisi mencuci tangan dengan sabun, penggunaan masker, dan menjaga jarak, adalah bagian penting dari Germas di masa pandemi.



Anggota DPR RI Saleh Partaonan Daulay memberikan bantuan alat cuci tangan portable di dapilnya. Foto: Ist/MAN

**A**dalah Anggota DPR RI Saleh Partaonan Daulay yang aktif mengampanyekan Germas di daerah pemilihannya, Sumatera Utara II. Bekerja sama dengan Direktorat Kesehatan Lingkungan, Kemenkes, pola hidup sehat disosialisasikan ke beberapa desa di dapilnya. Di Desa Parmompong, Kabupaten

Mandailing Natal, misalnya, Saleh memberikan alat cuci tangan *portable* yang bisa ditempatkan di masjid, sekolah, dan tempat umum lainnya.

Dihadiri 250 warga setempat, politisi PAN itu juga membagikan masker dan *handsanitizer*. Pola hidup sehat di tengah wabah Corona penting diingatkan kepada masyarakat agar korban akibat terpapar

virus ini tak terus berjatuh. Hampir semua wilayah di dapilnya pernah ia singgahi untuk menyosialisasikan hidup sehat. Dapil Sumut II meliputi wilayah yang sangat luas, terdiri dari 19 kabupaten/kota.

Tak hanya itu, Anggota Komisi IX DPR RI ini mendistribusikan pula kebutuhan bahan pokok tambahan bagi masyarakat yang ia temui. Bahan pokok tambahan itu berupa kacang hijau, kacang tanah, kornet, ikan kaleng, dan minyak goreng bagi masyarakat yang tinggal di beberapa desa, diantaranya Desa Salambue, Desa Pagur, Desa Hutaimbaru, Desa Tebing, Desa Kayu Jati, Desa Lumban Pasir, Desa Pagaran Tonga, dan Desa Parmompong.



POLA HIDUP SEHAT DI TENGAH WABAH CORONA PENTING DIINGATKAN KEPADA MASYARAKAT AGAR KORBAN AKIBAT TERPAPAR VIRUS INI TAK TERUS BERJATUHAN

Bahkan, Wakil Ketua MKD DPR RI ini juga menunjukkan kepeduliannya dengan mendistribusikan alat kesehatan seperti ventilator dan *oxigenconsentrator*. Selain itu ada alat pelindung diri (APD) seperti masker, *handsanitizer*, dan APD lainnya untuk sejumlah RSUD di dapilnya. Di Kab. Labuhanbatu, misalnya, bantuan tersebut diterima langsung Bupati dan Direktur RSUD Rantau Prapat.

● mh/es

Anwar Idris:

## Salurkan Bantuan Mesin Roasting Kopi

Anggota DPR RI Anwar Idris mengisi masa reses dengan turun langsung ke daerah pemilihannya dapil Aceh II. Ia hadir ke tengah masyarakat dengan membagikan mesin roasting kopi bagi puluhan warga.

Anwar mengatakan, kegiatan kali ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya petani di Gayo yang merupakan salah satu penghasil kopi terbaik saat ini. Selain membagikan mesin kopi untuk warga, Anwar juga memberikan kemasan bubuk kopi.

“Mesin kopi sangat dibutuhkan bagi masyarakat Gayo yang berjiwa bisnis. Dan mudah-mudahan bermanfaat untuk perekonomian keluarga. Memang bantuannya tidak seberapa tentunya kedepan akan

kita tingkatkan kembali dalam bentuk yang lain,” kata Anwar.

Anwar menilai, bantuan yang dibutuhkan masyarakat khususnya petani Gayo saat ini adalah mesin kopi yang canggih, karena menurutnya warga masih kesusahan mengolah kopi dengan alat-alat yang ada, padahal kopi-kopi yang dihasilkan sangat baik hingga dapat bersaing dengan produk luar negeri.

“Di sini petaninya dapat menghasilkan salah satu kopi terbaik namun alat-alat yang ada masih sangat minim hingga menyusahakan para petani. Untuk

itu kita hadir langsung dengan memberikan bantuan mesin tersebut, jika alatnya bagus tentu akan berpengaruh terhadap produk yang dihasilkan nanti juga bisa memperkenalkan kopi asli sini hingga ke luar negeri,” jelasnya.

Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyampaikan bantuan kali ini diberikan dengan bekerja sama langsung dengan Kementerian Ristek Dikti serta Politeknik Negeri Lokseumawe. Anwar berharap dengan adanya bantuan mesin kopi dan lainnya perekonomian masyarakat menjadi tergerak dan maju perlahan tapi pasti.

“Kegiatan dapil kali ini kami bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi serta Universitas Negeri yang ada di sana tentunya kita semua berharap bantuan mesin roasting kopi ini dapat meningkatkan ekonomi masyarakat yang ada menjadi tergerak perlahan-lahan tetapi pasti,” paparnya. • tn/es



Anggota DPR RI Anwar Idris menyalurkan alat roasting kopi kepada warga di dapilnya Aceh II. Foto: Ist/MAN

# Chris 'The Dragon' John

## Kepedulian Sang Legenda pada Tinju Indonesia

**CHRIS JOHN, SIAPA YANG TIDAK KENAL DENGAN PETINJU HEBAT INDONESIA SATU INI. IA MERUPAKAN SALAH SATU SOSOK LEGENDA TINJU YANG PALING BERPENGARUH DI INDONESIA. MENDAPAT JULUKAN THE DRAGON, CHRIS JOHN ADALAH MANTAN JUARA DUNIA KELAS BULU WBA SUPER, DAN BERHASIL DIPERTAHANKANNYA SELAMA 10 TAHUN SEJAK DIREBUTNYA DARI PETINJU KOLOMBIA, OSCAR LEON, DI BALI PADA 26 SEPTEMBER 2003.**

Lahir di Banjarnegara, Jawa Tengah, 14 September 1979, Chris merupakan anak kedua dari empat bersaudara dari pasangan Johan Tjahjadi dan Maria Warsini. Dunia tinju untuknya bukanlah hal baru karena sang ayah juga merupakan seorang petinju.

Siapa sangka, sosok yang kelak akan menjadi juara dunia ini mengawali karir di cabang olahraga Wushu. Kemudian, setelah tahun 1996, Chris mulai fokus menjadi petinju professional. Kesuksesannya mulai ditapaki ketika ia berhasil

menundukkan Word Kanda di laga profesional perdananya.

Selama 15 tahun berkarir di dunia tinju, tepatnya 2013 silam, The Dragon mengejutkan dunia dengan memutuskan gantung sarung tinju dengan kata lain, ia memutuskan untuk pensiun dari dunia olahraga yang sudah membesarkannya. The Dragon menutup karirnya dengan rekor 52 kali bertanding, 48 kali menang, 28 seri, tiga kali seri dan hanya sekali kalah.

Usai gantung sarung tinju, Chris John ternyata tidak benar-benar bisa berjauhan dari dunia yang

membesarkan namanya. Dimana, ia memilih untuk terjun ke dunia promotor tinju, sekaligus dapat mengamati sejauh mana potensi-potensi atlet petinju muda yang dimiliki Indonesia.

Dilansir dari salah satu media nasional, pemilik gaya tarung orthodox berbicara mengenai bakat-bakat petinju muda yang dimiliki oleh Indonesia. Besar harapannya agar kedepannya event-event untuk wadah para petinju muda berkompetisi kembali digalakkan. "Kalau sekarang minat masyarakat masih besar terhadap tinju dan bakat tinju di tanah air berpotensi bisa meraih prestasi di dunia," ujarnya.

"Sangat disayangkan saat ini event tinju seperti mati suri," tambahnya melanjutkan.

Menurut Chris John, potensi petinju Indonesia tidaklah jelek, tetapi masih ada beberapa hal yang harus diperbaiki agar petinju-petinju muda bisa terus berkembang. Chris John sudah membuktikan bahwa bakat dan kemauan saja tidaklah cukup untuk menjadi juara dunia. Harus ada tim yang hebat serta dukungan moril dan dana yang cukup besar.

"Fokus, belajar untuk jadi lebih baik, bekerja keras, selalu *update* ilmu, adalah hal yang harus dilakukan seorang atlet. Tapi kalau semuanya sudah dipenuhi, sudah menjadi seorang petinju yang bagus, lalu tidak bertanding, mau *ngapain?*" ucapnya.

Ia berharap, Pemerintah terlibat langsung dalam menangani perkembangan tinju Indonesia. Pemerintah diharapkan bisa merangkul para pengusaha untuk memberi *support*. Ia berpandangan, kalau pemerintah sudah bertindak, tidak akan ada yang berani menolak. Dirinya sendiri dengan senang hati siap membantu untuk kemajuan tinju Indonesia, asal ada *support* yang bagus.



## KALAU SEKARANG MINAT MASYARAKAT MASIH BESAR TERHADAP TINJU DAN BAKAT TINJU DI TANAH AIR BERPOTENSI BISA MERAIH PRESTASI DI DUNIA

Dengan dukungan dana yang cukup, akan ada pertandingan-pertandingan reguler yang sudah pasti bisa mengasah kemampuan para petinju muda. Selanjutnya, tinggal mencari link yang akan membawa mereka ke kancah internasional. Jalan yang tidak mudah, tetapi jika banyak pihak terlihat, bukan mustahil Indonesia akan memiliki lebih banyak juara dunia.

### DIRIKAN CHRIS JOHN FOUNDATION

Didorong semangat mengembangkan olahraga tinju tanah air dan demi lahirnya juara-juara dunia baru asal Indonesia, mantan petinju nasional Chris John, melakukan gebrakan dengan mendirikan Chris John Foundation.

Chris John mengungkapkan, setelah era Ellyas Pical hingga Daud Jordan, Indonesia tidak lagi mempunyai juara dunia tinju baru yang bisa membuat bangga serta menginspirasi anak-anak Indonesia. “Bukan hanya tidak mempunyai juara dunia baru, tapi olahraga yang merakyat dan menjadi tontonan semua kalangan ini, sekarang benar-benar terpuruk,” ujar Chris John.

“Banyak atlet tinju profesional beralih profesi dan meninggalkan dunia tinju karena mereka tidak mempunyai masa depan yang pasti,” tambah Chris John.

CJF sendiri didirikan dengan tujuan mencari, mendidik, membina dan melahirkan juara-juara dunia baru di bidang olahraga tinju. Lewat CJF ini pula, Chris John berusaha menarik kembali pelatih, mantan pelatih, atlet

tinju yang masih aktif maupun yang sudah pensiun dari arena ring tinju untuk diberdayakan kembali.

“Salah satu obsesi saya ialah menjadikan tinju sebagai salah satu industri kreatif yang menghasilkan buat semua orang, baik berupa materi maupun prestasi,” kata Chris John.

### HUMAS KONI

Kini, The Dragon mempunyai kesibukan baru, yaitu menjadi Wakil IV Ketua Umum Bidang Kerja Sama Luar Negeri, Media dan Humas pada kepengurusan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat di bawah pimpinan Marciano Norman,

“Ini memang hal yang baru bagi saya. Saya harus berhubungan langsung dengan media,” kata Chris John usai dikukuhkan dan dilantik menjadi pengurus KONI Pusat periode 2019-2023.

Chris John merupakan salah satu dari beberapa mantan atlet yang dilibatkan langsung dalam kepengurusan KONI Pusat. Selain dia, ada nama mantan petenis Yayuk Basuki, mantan pebulu tangkis Ickuk Sugiarto, atlet tenis meja Lieng Lieng Agustin. Ia pun mengatakan akan segera menyesuaikan diri dengan tugas barunya. Langkah awal, dia akan lebih dulu berkoordinasi dengan pimpinan KONI lainnya.

“Saya akan pelajari dulu tugas pokok dan fungsinya. Makanya saat ini saya belum bisa bicara banyak. Saya nanti punya tim. Yang jelas saya akan lebih dekat dengan media,” kata Chris John. • tn/es



Foto: Erman/MAN

# Lawan Covid-19 di Lingkungan DPR, PIA Gelar Baksos

Persaudaraan Isteri Anggota (PIA) DPR RI kembali menggelar bakti sosial dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-75 DPR RI tahun yang jatuh pada 29 Agustus 2020 lalu. Bakti sosial yang digelar dalam kondisi pandemi Covid-19 ini dilakukan di beberapa titik Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, yakni berupa pembuatan wastafel umum sebagai tempat cuci tangan, guna meminimalisir penyebaran virus Covid-19.

Tidak hanya itu, PIA DPR RI juga memberikan ribuan *masker* dan *hand sanitizer* gratis kepada pegawai dan karyawan yang bertugas di lingkungan Gedung DPR RI, seperti Petugas Pengamanan Dalam (Pamdal), hingga petugas kebersihan atau

*cleaning service*.

“Meskipun dalam kondisi pandemi Covid-19, namun PIA DPR RI tetap ikut memperingati HUT DPR RI sebagaimana pada tahun-tahun sebelumnya. Salah satunya dengan acara bakti sosial yang kali ini mengambil tema ‘PIA DPR RI Melawan Covid-19

di Lingkungan Gedung DPR RI, Senayan Jakarta’,” ujar Ketua Umum PIA DPR RI Tri Hatmanti Utut Adianto usai penyerahan wastafel ke Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, pertengahan September 2020.

Dijelaskan Tri, tujuan dari baksos kali ini tidak lain untuk kembali mengingatkan kepada seluruh karyawan dan pegawai di lingkungan DPR RI untuk terus menjaga kebersihan, sekaligus meningkatkan protokol kesehatan. Misalnya dengan selalu menggunakan masker, sering cuci tangan atau menggunakan *hand sanitizer*, serta tidak lupa untuk tetap menjaga jarak atau *physical distancing*.

Dalam kesempatan itu, Tri Hatmanti Utut Adianto juga didampingi oleh beberapa perwakilan pengurus PIA DPR RI seperti Wiwin Agung Budi Santoso, Ike Soelistio, Nurul Andre Rosiade dan Cynthia Imron Amin.



PIA DPR RI bersama Ketua BURT DPR RI Agung Budi Santoso didampingi Sekjen DPR RI Indra Iskandar dan Deputi Persidangan Setjen DPR RI Damayanti. Foto: Rumi/MAN



Ketua BURT DPR RI Agung Budi Santoso menyerahkan kit new normal kepada perwakilan Pamdal. Foto: Rumi/MAN

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Agung Budi Santoso menyambut baik dan mengapresiasi kegiatan bakti sosial yang diadakan oleh PIA DPR RI tersebut. Hal ini menurutnya sejalan dengan apa yang dihasilkan dalam rapat BURT DPR RI yakni untuk memperketat protokol kesehatan.

“Dengan adanya tambahan lima buah tempat cuci tangan atau *hand washer* (wastafel) di titik-titik yang sering dilalui orang, maka secara langsung hal ini membantu Setjen DPR RI dalam memutus rantai penyebaran Covid-19. Oleh karena itu kami sangat mengapresiasi kegiatan yang sangat positif ini,” ungkap politisi Partai Demokrat itu.

Senada dengan Agung, Sekjen DPR RI Indra Iskandar yang ikut mendampingi pengurus PIA dalam kegiatan bakti sosial tersebut mengucapkan rasa terima kasihnya atas kepedulian PIA untuk ikut memperketat protokol kesehatan di lingkungan DPR RI.

Lebih lanjut Indra berjanji bahwa instansi yang dipimpinnya akan ikut menjaga dan melestarikan



PIA DPR RI bersama Ketua BURT DPR RI Agung Budi Santoso didampingi Sekjen DPR RI Indra Iskandar dan Deputi Persidangan Setjen DPR RI Damayanti. Foto: Rumi/MAN

bantuan yang diberikan oleh PIA DPR RI berupa tempat cuci tangan tersebut. Bahkan bukan tidak mungkin ke depan pihaknya akan menambah wastafel tersebut. Jika pun kelak angka Covid-19 melandai, maka kebersihan dan kesehatan akan terus menjadi budaya di lingkungan DPR RI.

Sebagaimana diketahui, meski telah lebih dari satu semester Indonesia dan berbagai negara lainnya di dunia mengalami pandemi Covid-19, namun

kurva penyebaran virus Corona ini bukannya melandai, malah semakin meningkat. Data terakhir Satuan Tugas Penanganan Covid-19 angka penderita Covid-19 pada pertengahan Oktober 2020 sudah mencapai lebih dari 300 ribu orang, dengan korban meninggal lebih dari 11 ribu jiwa. Tak heran jika kemudian beberapa kota besar seperti DKI Jakarta kembali menerapkan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). ● ayu/sf/es

# Pengelolaan Keuangan Negara di Lingkup DPR-RI

Oleh : Setyanta Nugraha - Inspektur Utama Setjen DPR RI

Sistem ketatanegaraan Republik Indonesia tidak terlepas dari ajaran *Trias Politica Montesquieu* sebagaimana terlihat dari adanya praktik pemisahan kekuasaan negara menjadi tiga, yaitu Legislatif, Eksekutif, dan Judikatif.

**K**ekuasaan Eksekutif dipegang oleh Presiden sebagaimana diatur dalam Undang-undang Dasar Pasal 4 ayat (1): “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-undang Dasar”.

Sebagai kepala pemerintahan, Presiden memegang kekuasaan pengelolaan keuangan Negara berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Kekuasaan tersebut meliputi kewenangan yang bersifat umum dan kewenangan yang bersifat khusus.

Untuk membantu Presiden dalam penyelenggaraan kekuasaan dimaksud, sebagian dari kekuasaan tersebut dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan, serta kepada

Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang kementerian negara/ lembaga yang dipimpinnya.

Dalam kaitan ini, di Lembaga Legialatif (DPR-RI) yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan negara adalah Sekretaris Jenderal sebagai pimpinan Lembaga (Lembaga Kesekretariatan Jenderal) DPR-RI.

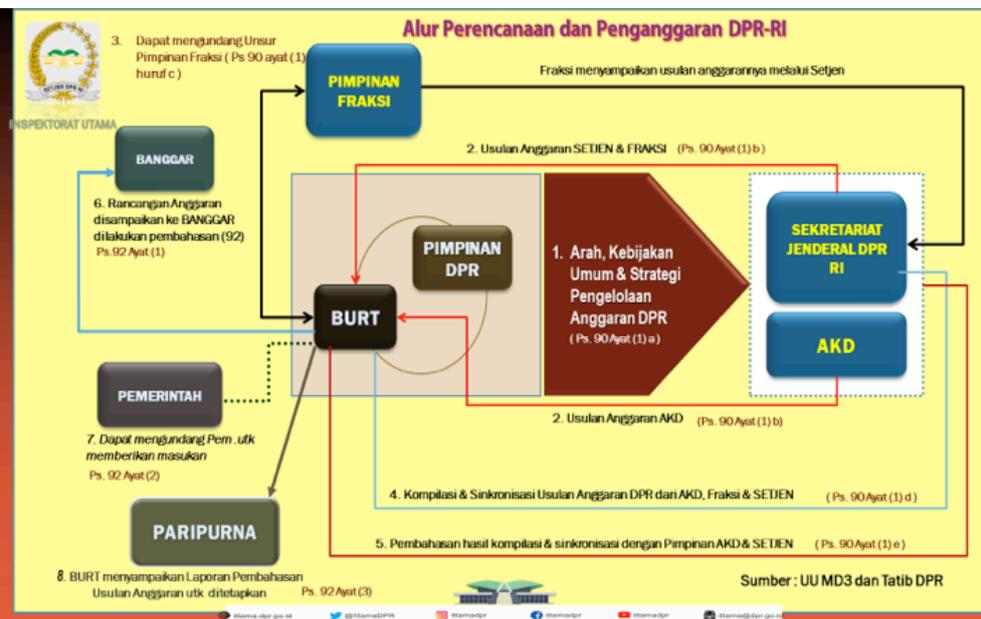
Penyusunan dan pelaksanaan anggaran termasuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran di lingkup DPR dilakukan melalui pendelegasian wewenang kepada unit organisasi yang dilaksanakan pejabat yang menjalankan fungsi pemerintahan, yaitu Sekretaris Jenderal. Pendelegasian kekuasaan pengelolaan keuangan Negara dari Presiden kepada Sekretaris Jenderal tidak secara penuh, artinya tidak termasuk wewenang untuk *pembentukan kebijakan pengelolaan keuangan Negara*, karena Sekretaris Jenderal hanya sebagai pengguna anggaran dan barang/jasa.

Sesuai dengan Pasal 75 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau biasa disingkat UU MD3, dinyatakan bahwa, “*Dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya, DPR memiliki kemandirian dalam menyusun anggaran yang*

*dituangkan ke dalam program dan kegiatan disampaikan kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan*”. Dalam praktiknya, terminologi “kemandirian anggaran” ini tidak atau belum dapat diimplementasikan secara penuh, baik dari aspek besaran anggaran yang diajukan ataupun nomenklatur program dan kegiatannya belum dapat mengakomodasi kebutuhan sesuai dengan karakteristik wewenang, tugas dan fungsi Lembaga legislatif.

Mekanisme perencanaan dan penganggaran di lingkup DPR melibatkan seluruh *stakeholder* Alat Kelengkapan Dewan (AKD), yaitu Pimpinan, Komisi, Badan, dan Sekretariat Jenderal termasuk anggaran untuk Fraksi sehingga menghasilkan besaran usulan anggaran DPR. Besaran usulan anggaran DPR tersebut dikonsultasikan dengan pemerintah, dalam hal ini Dirjen Anggaran, dan Badan Anggaran DPR sebelum dilaporkan oleh BURT dalam Rapat Paripurna DPR.

Konteks “kemandirian anggaran DPR” dalam hal ini dapat dipahami bahwa, ketika rancangan anggaran DPR tersebut telah ditetapkan dalam Rapat Paripurna yang merupakan kekuasaan tertinggi dalam pengambilan keputusan di DPR, maka Usulan Anggaran DPR tersebut menjadi bagian dari APBN yang dapat diubah pada saat pembahasan APBN antara Pemerintah dan DPR. Namun demikian, pemerintah dengan menggunakan terminologi ‘Pagu Anggaran’, baik pagu indikatif, pagu anggaran, dan terakhir pagu alokasi yang intinya berdasarkan perpektif pemerintah membagi anggaran kepada seluruh kementerian



dan Lembaga, termasuk untuk anggaran DPR dengan pendekatan “Pagu Anggaran” yang selalu terjadi deviasi negative atau lebih kecil antara Usulan Anggaran DPR yang telah ditetapkan dalam Rapat Paripurna dengan perolehan Pagu Anggaran dari Pemerintah.

Dalam rangka menjaga akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (4) UU MD3, “DPR menetapkan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran DPR dalam peraturan DPR sesuai dengan ketentuan perturan perundang-undangan”. DPR telah menyusun Peraturan DPR tentang Pertanggungjawaban Pengelolaan Anggaran DPR, namun sampai kini belum mendapatkan masukan dari Kementerian Keuangan.

Perencanaan dan penganggaran di lingkup DPR-RI, berdasarkan Tata Tertib DPR-RI secara singkat adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan DPR bersama dengan BURT menetapkan Arah Kebijakan Umum Pengelolaan Anggaran DPR (AKUPA) pada setiap tahun yang selanjutnya

diserahkan kepada Sekretaris Jenderal untuk dilaksanakan.

2. Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dan Sekretariat Jenderal berdasarkan AKUPA menyusun rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada BURT untuk dikompilasi menjadi usulan anggaran DPR. Fraksi mengusulkan anggaran melalui Sekretaris Jenderal.
3. Pimpinan BURT dapat mengundang Pimpinan Fraksi untuk melakukan pembahasan usulan anggaran Fraksi yang disampaikan melalui Sekjen.
4. BURT melakukan kompilasi dan sinkronisasi usulan anggaran yang disampaikan oleh AKD dan Sekretariat Jenderal, termasuk usulan anggaran Fraksi.
5. BURT melakukan pembahasan hasil kompilasi dan sinkronisasi anggaran dengan Pimpinan AKD dan Sekretariat Jenderal.
6. BURT melakukan pembahasan bersama dengan Badan Anggaran terhadap Rancangan Anggaran DPR berdasarkan usulan AKD dan Setjen.
7. BURT dapat mengundang Pemerintah untuk memberikan

masukan terhadap Rancangan Anggaran DPR sebelum dilaporkan dalam Rapat Paripurna.

8. BURT menyampaikan Laporan Rancangan Anggaran DPR dalam Rapat Paripurna untuk ditetapkan menjadi Usulan Anggaran DPR.

Sekretaris Jenderal selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, menyusun laporan keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Sebagai entitas pelaporan, laporan keuangan DPR tersebut sebelumnya telah diperiksa BPK dan diberi opini atas laporan keuangan.

Laporan Keuangan DPR telah memperoleh **opini** WTP 12 kali dari BPK-RI atau predikat tertinggi dari 4 (empat) opini yang dikeluarkan oleh BPK-RI. Opini Badan Pemeriksa Keuangan merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pengawasan Pengelolaan Keuangan Negara di DPR secara intern dilakukan oleh Inspektorat Utama melalui kegiatan Audit, Reviu, Pemantauan, dan Evaluasi serta Kegiatan Pengawasan lainnya yang penekanannya berfungsi sebagai *Quality Assurance* dan *Consulting*. Sementara itu secara ekstern, Laporan Keuangan DPR diperiksa oleh BPK RI setiap tahun. ●



## Mengenal *House of Commons* Inggris

Inggris merupakan *unitary state* atau negara kesatuan yang dikenal dengan sebutan *United Kingdom* (UK) yang terdiri dari : England, Wales dan Irlandia Utara. Di Inggris, kekuasaan membahas dan mengesahkan undang-undang atau memegang kekuasaan legislatif adalah *House of Commons*. Jadi, *House of Commons* atau Majelis Rendah adalah lembaga perwakilan rakyat di Inggris. Publik Inggris memilih anggota Parlemen (MPs) untuk mewakili kepentingan dan perhatian mereka di *House of Commons*.

Selain dapat mempertimbangkan dan mengusulkan undang-undang baru, Anggota parlemen di Majelis Rendah juga dapat memeriksa kebijakan pemerintah dengan mengajukan pertanyaan kepada menteri tentang masalah terkini baik di Majelis Bersama atau di Komite. Karena itu, pemerintah harus mendapatkan dukungan para anggota Majelis Rendah untuk bisa menerapkan undang-undang yang mereka ajukan.

Biasanya pemerintah dan partai-partai yang berposisi menempati kursi yang berseberangan di Majelis Rendah. Akan tetapi sejak

Mei 2010, setelah terbentuknya koalisi antara Partai Konservatif dan Partai Liberal Demokrat, para anggota parlemen dari kedua partai ini duduk di sisi yang sama. Anggota parlemen dari Partai Konservatif dan Partai Liberal Demokrat yang tidak diangkat menjadi pejabat pemerintah, duduk di belakang mereka.

Berbeda dengan praktik di Indonesia yang mana anggota parlemen atau DPR yang diangkat menjadi menteri mengundurkan diri, maka di Inggris menteri adalah anggota parlemen dan karenanya tidak mundur ketika masuk kabinet. Karena Inggris menganut sistem pemerintahan parlementer dimana kekuasaan pemerintah terdapat pada perdana menteri dan menteri.

Meskipun kekuasaan sebagai kepala negara berada di tangan Ratu, namun Ratu tidak mempunyai kekuasaan politik. Hal itu karena ratu hanya berperan sebagai simbol kedaulatan dan persatuan negara. Dengan demikian dapat dikatakan Inggris menerapkan sistem pemerintahan parlementer dengan bentuk pemerintahan monarki konstitusional atau monarki parlementer dengan sistem kenegaraan yang terdesentralisasi.

Inggris menerapkan sistem dua partai (*two party system*) yaitu partai konservatif dan partai buruh. *House of Commons* sendiri terdiri dari 659 orang yang dipilih dengan *equal size districts* (sistem distrik dengan porsi yang sama). Masa tugasnya selama lima tahun. Atas dasar kebutuhan politik,

Perdana Menteri akan menetapkan pemilihan dan jika kabinet mendapat mosi tidak percaya atau gagal, maka kabinet tersebut harus membubarkan diri.

#### MEKANISME RAPAT

Jika di DPR kita mengenal adanya Rapat Kerja, maka di Inggris, terdapat mekanisme persidangan yang disebut dengan disebut *Prime Minister's Questions*. Pertanyaan pertama dari anggota parlemen biasanya di seputar kegiatan atau agenda perdana menteri (*open questions*). Mekanisme rapat ini diselenggarakan di setiap Rabu siang. Perdana menteri menjawab pertanyaan dari para anggota parlemen selama setengah jam. Penanya kemudian melanjutkan dengan pertanyaan kedua, bisa tentang apa saja, tapi biasanya tentang isu-isu politik terkini.

Pemimpin oposisi dapat menindaklanjuti pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dan atau bisa juga mengajukan pertanyaan dengan topik-topik lain. Pemimpin oposisi merupakan satu-satunya anggota parlemen yang dibolehkan mengajukan pertanyaan lanjutan dengan topik yang sama (*follow-up questions*) kepada perdana menteri.

Ketua parlemen bertugas mengatur dan memastikan agar tanya jawab dengan perdana menteri ini berlangsung tertib. Selain ketua juga ada beberapa wakil ketua dan mereka dipilih oleh para anggota parlemen lain. Ketua parlemen harus adil dan tidak berpihak, jadi ketika ia terpilih menjadi ketua ia mundur dari partai politik dan tidak

diperbolehkan terlibat dalam masalah-masalah politik, bahkan ketika mereka pensiun nanti.

Mekanisme pemungutan suara di Majelis Rendah dinamakan *division*. Prosesnya diawali dengan permintaan ketua parlemen kepada para anggota untuk menyuarakan pendapat atau posisi mereka atau satu rancangan undang-undang (RUU). Jika hasilnya sama kuat antara yang mendukung dan menentang, ketua akan memutuskan dilakukannya pemungutan suara.

Kemudian setiap anggota parlemen, satu per satu, akan maju dan menyampaikan suara mereka. Para petugas akan mencatat nama dan suara mereka, apakah mendukung atau menentang RUU. Setelah selesai, hasil penghitungan suara akan diumumkan. Ketika sebagian besar anggota parlemen menolak, para anggota parlemen dapat melakukan pemungutan suara atas amendemen undang-undang, bukan keseluruhan RUU. Proses RUU menjadi UU bisa memakan waktu berbulan-bulan, karena harus melewati beberapa tahap baik di Majelis Rendah maupun di Majelis Tinggi (*House of Lords*).

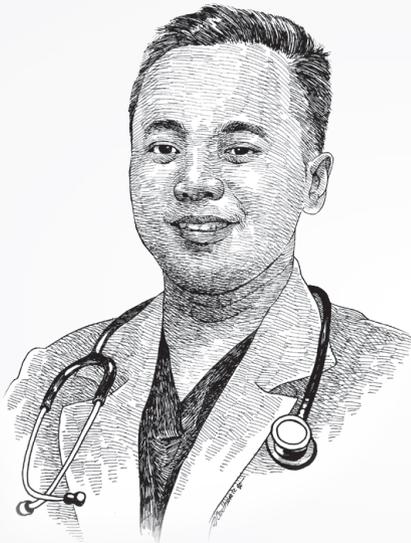
Semua anggota Majelis Rendah memang punya hak suara, tapi otonomi ada di pemerintah-pemerintah daerah. Jadi hal ini membuat beberapa masalah atau isu tidak lagi dipegang oleh para anggota parlemen yang berkantor di Westminster. Kekuasaan atau kewenangan tersebut berada di tangan para anggota Parlemen Skotlandia, Parlemen Wales, dan Parlemen Irlandia Utara. ● skr/es

#### Referensi:

- House of Commons <https://www.parliament.uk/business/commons/>
- Parlemen Bubar, Inggris Gelar Pemilu Dini 12

Desember

<https://internasional.kompas.com/read/2019/11/07/08223901/parlemen-bubar-inggris-gelar-pemilu-dini-12-desember?page=all>



# Happy Hypoxia pada Pasien Covid-19

dr. Mada Taruna Sakti Anwar  
Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia  
Post Intership RSUD Pasar Rebo Jakarta Timur

Beberapa bulan terakhir, berita tentang Covid-19 (*Corona Virus Disease 2019*) selalu menjadi *spotlight* hampir di setiap berita. Penyakit yang diakibatkan oleh virus Corona ini memang sedang menjadi pandemi di dunia setelah dinyatakan demikian oleh WHO. Banyak istilah terkait dengan Covid-19 yang masih belum dimengerti sepenuhnya karena penyakit ini tergolong baru dibandingkan penyakit lain sehingga masih belum terlalu banyak dipelajari oleh para ilmuwan. Salah satu istilah itu adalah *Happy Hypoxia*. Lantas, apa itu *Happy Hypoxia*? Berbahayakah?

## PENYEBAB COVID-19

Sudah banyak diketahui, penyakit Covid-19 disebabkan oleh virus korona yang memiliki nama resmi Virus SARS-CoV-2 (*Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus 2*). Mengapa ada nomor 2 di belakang nama virus Corona? Karena untuk membedakan dengan penyakit SARS yang pernah heboh tahun 2003 silam. Virus penyebab penyakit SARS tahun 2003 ini diberi nama Virus SARS-Cov-1.

Jika dilihat dari namanya, penyebab Covid-19 dan SARS 2003 adalah virus



yang memiliki golongan (famili) sama, yaitu Corona, tetapi jenisnya (spesies) berbeda. Contoh spesies lain dari famili Corona adalah virus penyebab MERS yang *booming* sekitar tahun 2012. Famili Corona memang rata-rata menginfeksi saluran pernapasan manusia sehingga gejala dan tanda penyakit Covid-19, SARS 2003, dan MERS 2012 hampir mirip.

## PENGARUH INFEKSI VIRUS COVID-19 TERHADAP TUBUH MANUSIA

Beberapa studi mengatakan bahwa Covid-19 dapat menyebar melalui

udara. Virus ini bisa menginfeksi manusia setelah terhirup bersama napas hingga sampe ke dalam paru. Virus ini juga bisa menginfeksi mata manusia sehingga membuat gejala sakit mata, seperti mata kemerahan, gatal, dan berair. Selain itu, virus ini bisa masuk ke saluran pencernaan ketika kita makan tanpa cuci tangan dan ternyata ada virus ini di tangan kita sehingga membuat gejala diare dan nyeri perut. Namun, tanda dan gejala yang paling sering muncul berkaitan dengan pernapasan karena sebagian besar virus ini akan menyerang paru. Oleh karena

itu, penggunaan masker yang benar hingga menutupi lubang hidung dan mulut, *face shield*, menghindari mengucek mata, dan cuci tangan sesering mungkin dengan sabun atau minimal dengan *handsanitizer* menjadi cara yang cukup ampuh untuk mencegah tertular virus ini.

Secara umum, terjadinya penyakit Covid-19 pada manusia dapat dibagi menjadi tiga fase. Fase pertama adalah fase awal infeksi. Pada fase ini, sistem imun manusia belum terlalu merespons terhadap kehadiran virus. Oleh karena itu, virus mampu berkembang biak memperbanyak diri di dalam paru. Hal ini dapat memicu kerusakan pada jaringan paru. Tanda dan gejala belum muncul atau sudah ada tetapi tidak terlalu parah menyerupai orang flu pada umumnya, yaitu demam, batuk, dan pilek.

Fase kedua adalah fase keterlibatan paru. Pada fase ini, sistem imun manusia sudah mulai merespons terhadap kehadiran virus melalui proses peradangan. Sistem imun akan membunuh virus yang telah ada dan menghalangi virus untuk berkembang biak sehingga jumlah virus dapat ditekan. Tidak hanya dampak positif, proses peradangan ternyata juga membawa dampak negatif, yaitu turut serta membuat kerusakan pada jaringan paru. Pada fase ini, tanda dan gejala sudah mulai berat dan mulai tampak kelainan pada rontgen paru.

Fase ketiga adalah fase peradangan yang berlebihan. Pada fase ini sistem imun memberi respons yang luar biasa untuk menghilangkan virus dari dalam tubuh dengan menciptakan banyak zat yang disebut *sitokin*. Oleh karena itu, pada fase ini dikenal dengan istilah 'badai sitokin'. Badai sitokin memicu

kerusakan paru semakin parah dan membuat fungsi tubuh manusia berjalan tidak normal hingga dapat menimbulkan kematian. Sebenarnya, tujuan sistem imun baik untuk membunuh virus tetapi responnya yang berlebihan malah membawa kerugian. Memang, sesuatu yang berlebihan itu tidak baik.

### **HAPPY HYPOXIA PADA PASIEN COVID-19**

*Hypoxia* (hipoksia) adalah kondisi dimana kadar oksigen dalam tubuh kurang dari normal. Kadar normal oksigen pada manusia berkisar 95-100 persen atau sekitar 75-100 mmHg. Penurunan kadar oksigen ini akibat kerusakan yang terjadi pada paru. Umumnya, penurunan kadar oksigen sedikit saja di bawah nilai normal sudah memunculkan tanda dan gejala seperti pusing, sesak napas, napas cepat, denyut nadi cepat, keringat dingin, hingga gelisah. Namun, pada pasien Covid-19, tanda dan gejala ini tidak muncul. Kondisi inilah yang dikenal dengan istilah *happy hypoxia*, dimana kadar oksigen sudah turun tetapi pasien seakan-akan masih terlihat seperti orang normal.

Mengapa *happy hypoxia* bisa terjadi? Jawabannya belum diketahui pasti melalui penelitian. Namun, kandidat jawaban pertama yang dapat diajukan adalah tipe hipoksia pada pasien Covid-19. Pada pasien Covid-19, tipe hipoksia yang terjadi berupa penurunan kadar oksigen yang tidak disertai dengan peningkatan kadar karbon dioksida, malah sedikit turun. Tidak hanya itu, saraf pada paru menjadi tidak sensitif akibat adanya badai sitokin, kerusakan pada jaringan paru, dan efek langsung dari Covid-19. Faktor-faktor ini membuat otak tidak terlalu berespon terhadap hipoksia yang terjadi.

Jika tanda dan gejala mulai muncul ketika kadar oksigen masih sedikit di bawah nilai normal, pasien dapat segera ke rumah sakit dan dokter dapat menolong pasien segera. Namun, jika pasien datang ke rumah sakit ketika kadar oksigen sudah jauh di bawah normal, biasanya pasien sudah tidak sadar atau bernapas, dokter akan mengalami kesulitan untuk mempertahankan hidup pasien. Inilah bahaya di balik *happy hypoxia*.

### **BAGAIMANA MENANGANI HAPPY HYPOXIA?**

Karena *happy hypoxia* sangat berbahaya, penting bagi pasien Covid-19 terutama yang tidak bergejala untuk mewaspadai kondisi tersebut. Lantas, bagaimana cara agar kita dapat segera tahu jika kadar oksigen sudah di bawah 95 persen? Ada alat bernama pulse oksimeter yang dapat digunakan untuk memonitor kadar oksigen kita. Cara menggunakannya cukup mudah. Kita hanya perlu menjepitkan jari jempol atau telunjuk tangan ke dalam oksimeter. Tidak terasa sakit! Oksimeter akan menampilkan kadar oksigen dan denyut nadi kita dalam satu menit. Kekurangannya adalah tidak semua oksimeter akurat, terutama jika kadar oksigen sudah di bawah normal.

Hipoksia baik yang bergejala ataupun tidak perlu segera ditangani oleh dokter untuk diberikan terapi oksigen. Pada pasien hipoksia yang masih bisa bernapas, oksigen diberikan melalui selang atau masker oksigen. Namun, pada pasien hipoksia yang sudah tidak sadar atau bernapas, oksigen diberikan melalui alat bantu napas (ventilator) dan perlu dirawat di ruang ICU. ●

# Menantang Tenang ke Tebing Appalarang

MENEMPUH PERJALANAN SEJAUH 186  
KM, ATAU SEPANJANG 5 HINGGA 6 JAM  
BERKENDARA DARI KOTA MAKASSAR,  
KETENANGAN DAN KEINDAHAN  
PEMANDANGAN LAUT BIRU DAPAT  
DITEMUI DI TEBING APPALARANG YANG  
TERLETAK DI DESA ARA, KECAMATAN  
BONTOBAHARI, KABUPATEN  
BULUKUMBA, SULAWESI SELATAN.



Pantai ini berbeda dengan pantai-pantai lainnya karena lokasinya berada di tebing-tebing karst yang menjulang tinggi.

Tebing karang yang memanjang dengan pemandangan laut biru-kehijauan itu, akan memanjakan mata dan menenangkan hati serta pikiran siapapun yang mengunjunginya.

Di sekitar tebing, terhampar jembatan kayu yang menjorok ke laut. Dari atas jajaran kayu tersebut, pengunjung bisa berjalan-jalan sambil sekadar memotret elok dan indah panorama disekitarnya. Tak heran, keindahannya disandingkan dengan pemandangan serupa seperti di Devil's Tear, Nusa Penida, Bali atau bahkan seperti Raja Ampat, Papua Barat.

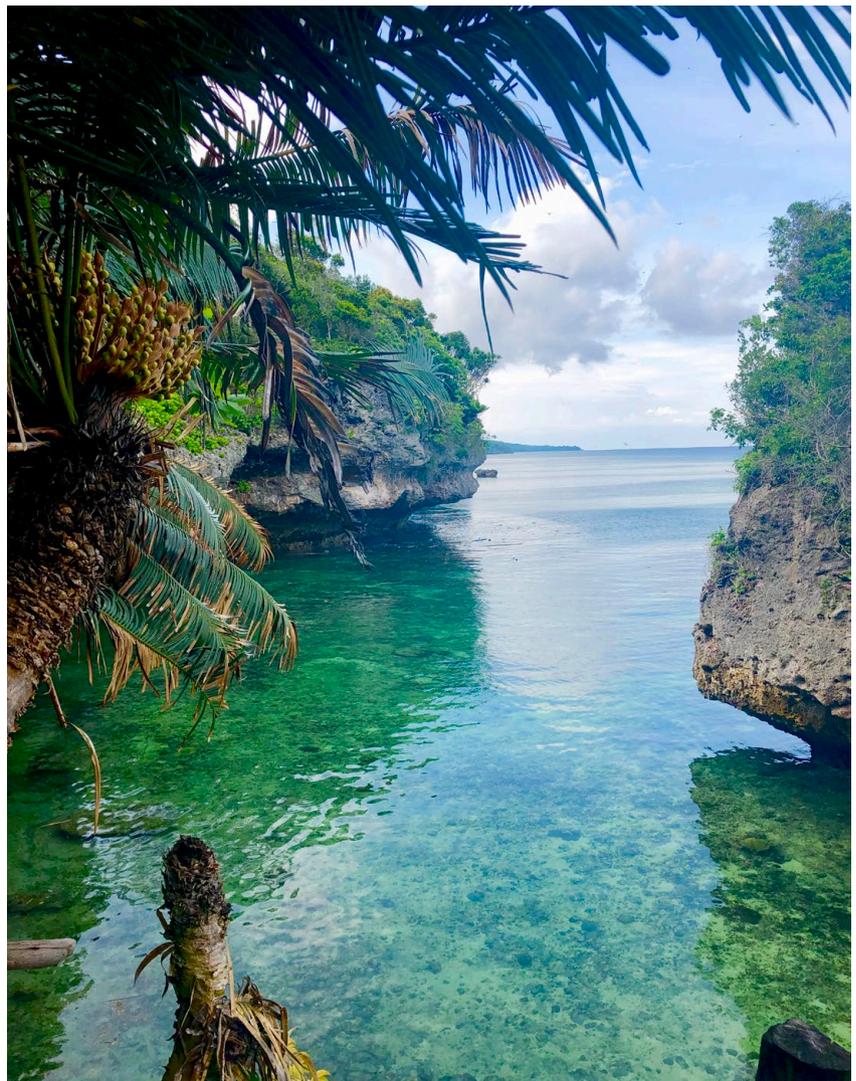
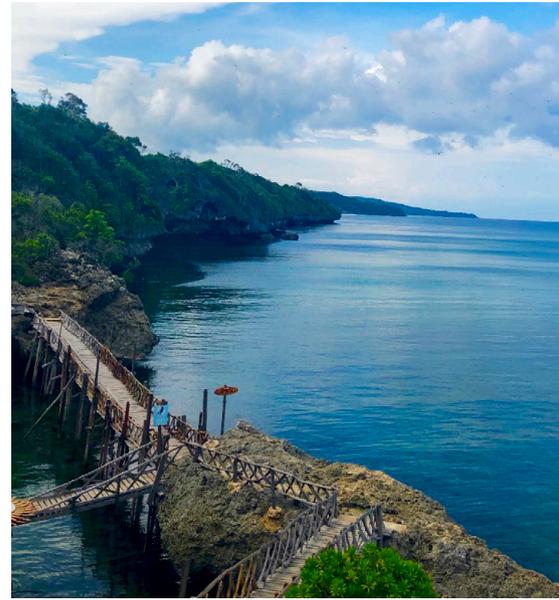
Meski terbilang cukup baru karena mulai dipopulerkan pada November 2014 lalu, setelah dirintis oleh masyarakat setempat sejak tahun 2011, fasilitas yang terdapat pada objek wisata ini cukup memadai. Terdapat area parkir dan toilet umum, bahkan juga terdapat pondok-pondok penjual souvenir dan makanan yang tak jauh dari pintu masuk tebing.

Berdasarkan informasi dari laman Pesona Indonesia, nama Appalarang sendiri berasal dari Bahasa Konjo yaitu Appa yang berarti ujung dan Ralang yang artinya dalam atau curam. Persis sesuai namanya, objek wisata ini dikelilingi dengan tebing-tebing memanjang yang cukup curam.

Sayangnya, belum tersedia penginapan di Appalarang. Jika ingin bermalam di sekitar lokasi wisata, pengunjung bisa mendirikan tenda atau bisa juga beristirahat di gazebo-gazebo yang disediakan. Makanan yang dijual di sekitar juga masih sebatas makanan instan dan cemilan ringan, sehingga membawa bekal makanan sendiri bisa jadi pilihan. Keuntungannya, tiket masuk masih belum diberlakukan, tetapi

pengunjung harus membayar parkir.

Ada banyak kegiatan yang bisa dilakukan saat berwisata ke Appalarang. Selain aktivitas *mainstream* seperti berfoto, pengunjung juga berenang dan memompa adrenalin dengan *Cliff jumping*, yakni dengan melompat dari tebing. Meski lautnya cukup tenang dan kedalamannya pas untuk melompat, tetap perlu utamakan keamanan dan keselamatan. Pengunjung bisa tanyakan ke petugas pantai, mana spot yang aman untuk berenang dan melompat. Jangan lupa, amankan ponsel agar tidak tercebur ke air laut. Selamat berlibur! ● atw/es



# Mulyadi: Sehat dengan Bersepeda

Menyalurkan hobi yang berhubungan erat dengan peningkatan kesehatan tubuh menjadi manfaat tersendiri dikala masa pandemi Covid-19 ini. Hal ini yang menjadi hobi bagi salah satu Anggota Komisi V DPR RI Mulyadi yang sejak lama mempunyai hobi bersepeda.

Selain memiliki manfaat bagi peningkatan imun, bersepeda baginya merupakan sarana untuk meningkatkan silaturahmi dengan para kerabat. Hobi bersepeda ini diawali ketika 10 tahun lalu bertemu dengan kerabatnya saat SD yang memiliki hobi bersepeda, lalu ia pun sepakat untuk terus bersepeda dengan kerabatnya tersebut.

“Lebih dari sepuluh tahun lalu ketemu dengan teman teman SD, yang suka sepedaan bareng, lalu bernostalgia tentang keterampilan bawa sepeda, lalu mengingat usia dan kondisi fisik, kita sepakat untuk olahraga bareng dengan bersepeda. Di samping jaga silaturahmi kita ingin tetap jaga kesehatan dengan bersepeda,” ujar Mulyadi.

Politisi Partai Gerindra ini mengaku, ia bersama komunitas sepeda gunung yang didirikannya, JoB.com (Jonggol Bike Community), rutin bersepeda setiap Selasa sore dan Minggu pagi. Tak tanggung-tanggung, sekali bersepeda ia pun menghabiskan jarak rata-rata 25 kilometer. Baginya, bersepeda ini kegiatan yang sangat bagus saat pandemi



Mulyadi bersama JoB.com foto bersama di Kawah Putih Ciwidey, Soreang, Bandung. Foto: Dok/MAH

selama tetap menjaga protokol kesehatan. Ini juga menjadi bagian dari upaya menjaga kesehatan dan meningkatkan imun tubuh.

Menyalurkan hobi dengan bersepeda diketahui memiliki manfaat yang cukup banyak. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa orang dengan gaya hidup aktif secara fisik, memiliki kadar kebugaran 32 persen lebih tinggi daripada orang yang tidak aktif. Dalam hal ini, gaya hidup aktif dapat berupa melakukan beragam olahraga, termasuk di dalamnya bersepeda.

Dengan berolahraga, seseorang akan dapat meningkatkan suasana hati karena adanya pelepasan hormon adrenalin dan endorfin. Selain itu, dengan berolahraga, rasa kepercayaan diri juga akan

ikut meningkat dengan adanya pencapaian target yang dibuat, misalnya saat berhasil bersepeda 10 kilometer.

Selain membakar kalori, bersepeda juga dapat membantu membentuk dan memperkuat otot, khususnya otot di sekitar glutes, paha belakang, paha depan, dan betis. Sehingga membuat tubuh menjadi sehat dan bugar.

Dalam menjalankan rutinas hobinya ini, Mulyadi mempunyai slogan berupa 3S yakni **Sholat, Sehat dan Senyum**. Melalui bersepeda ini ia pun juga bisa menyapa senyum terhadap masyarakat yang ditemuinya, sehingga tak hanya bermanfaat dari aspek kesehatan, tetapi bersepeda juga bermanfaat dari aspek sosial. ● hs/es

# Seberapa Penting Gadget bagi Anggota DPR

Sekarang ini perkembangan teknologi komunikasi dan elektronik semakin canggih dan berkembang serta melesat dengan pesatnya dengan tujuan agar memudahkan aktivitas manusia dalam berkomunikasi, berbagi informasi dan mencari informasi, melakukan transaksi, mengirim berkas, bermain games dan lain sebagainya. Bahkan, banyak orang yang menganggap *gadget* sudah menjadi kebutuhan primer yang harus dipenuhi untuk membantu dan memudahkan manusia dalam segala bidang. Terlebih di masa pandemi seperti saat ini dengan aturan di rumah saja, banyak kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan *gadget*.

alu, apa sih pentingnya *gadget* bagi Anggota Dewan? melalui youtube channel Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi yang bernama 'Mr Parleman', Dede berhasil 'kepo' *gadget* beberapa anggota dewan yang saat itu tengah melakukan kegiatan kunjungan spesifik bersama di Kabupaten Bandung.

Anggota pertama Dede 'kepo' *gadget*-nya adalah Andreas Hugo Pareira, kepada Andreas Dede bertanya 'Apasih pentingnya *gadget* bagi seorang Andreas?'. Bagi Andreas, di era modern seperti saat ini, alat komunikasi sudah menjadi kebutuhan primer. Bahkan bangun tidur, yang pertama Andreas cari adalah *handphone* bukan istri, sontak pernyataannya itu disambut tawa oleh Dede.

"Handphone sudah melekat di hidup kita. Gradasi kebutuhan hidup manusia itu, kalau dulu kebutuhan primer sekunder dan tersier. Makan minum (primer) kemudian kebutuhan sekunder dan tersier, dalam hidup ini komunikasi menjadi kebutuhan primer manusia tingkatnya di bawah makan minum.

Bahkan bangun tidur yang pertama dicari Handphone," katanya.

Dari channel youtube Mr. Parleman berdurasi kurang dari 20 menit itu juga terungkap ternyata ada anggota dewan yang gagap teknologi (gaptek). Pernyataan 'gaptek' yang keluar dari mulut seorang Rano Karno bermula dari pertanyaan Dede tentang 'Penting nggak punya *handphone* yang canggih?' "Saya termasuk orang yang gaptek, saya punya *handphone* yang penting bisa komunikasi via *WhatsApp*, bisa untuk zoom dan kalkulator," katanya.

Tak ada rasa gelisah bagi Rano jika sehari tidak memegang *handphone*, tapi sebagai wakil rakyat yang kerap menerima aspirasi melalui berbagai media termasuk *handphone*, memantau informasi atau berita menjadi hal yang tak terlewatkan.

Saat ditanya *handphone* di kunci atau tidak, Rano dengan tegas menjawab 'ya'. Saat ditanya 'Password diketahui istri atau tidak?' Rano menjawab "Tidak, bukan hanya istri bahkan anak pun tidak tahu," katanya, seraya menjelaskan, tidak memberitahu *password* kepada orang bahkan istri dan anak tujuannya adalah untuk *security*.

Setelah 'kepo' *gadget* rekan kerjanya, Dede pun berbagi kisah. Baginya ukuran *handphone* menjadi yang utama. 7.2 Inch adalah ukuran yang pas bagi seseorang dengan mata plus seperti-nya. "Saya suka yang layarnya besar mudah di lihat kalau buka *WhatsApp*, baca berita hingga main games sebagai hiburannya," katanya.

Untuk kekuatan *handphone* sendiri, Dede membutuhkan baterai yang tahan lama, paling tidak 1 hari satu kali *charger*, pasalnya hampir semua pekerjaan Ia kerjakan dengan *handphone*. "Saya ga peduli mereknya apa, yang penting layarnya besar, baterainya kamera bagus kalau selfie makin paten," tutupnya. ● rmn/es



Dede Yusuf saat mewawancarai Rano Karno. Foto: Eman/MAH



PIMPINAN dan ANGGOTA DPR RI  
serta SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI  
mengucapkan

**SELAMAT HARI**



**SUMPAH  
PEMUDA**

**28 OKTOBER**

